

SATU DATA KETENAGAKERJAAN SUMATERA SELATAN

2025

Abstract Data

Database Ketenagakerjaan Sumatera Selatan adalah sistem informasi terpadu yang menghimpun, mengolah, dan menyajikan data serta informasi yang berkaitan dengan seluruh aspek ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Database Ketenagakerjaan Sumatera Selatan berfungsi sebagai **jantung informasi** yang menjamin bahwa pembangunan ketenagakerjaan bersifat kolektif, terarah, dan berkelanjutan, memberikan perlindungan bagi pekerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Data yang disajikan memberi informasi penting keadaan sesungguhnya kondisi ketenagakerjaan dari periode satu ke periode berikutnya. Komponen data utama yang disajikan antara lain :

- Pelatihan dan Produktivitas : informasi tentang Balai Latihan Kerja (BLK), program/kejuruan pelatihan, peserta pelatihan, balai latihan komunitas, Lembaga pelatihan kerja swasta, akrediatasi, uji kompetensi, instruktur pelatihan dan tingkat penyerapan lulusan.
- Penempatan dan Perluasan Kerja : informasi yang berhubungan dengan jumlah pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan, pekerja migran, tenaga kerja asing, remiten / pendapatan dr tenaga kerja dan petugas pengantar kerja.
- Hubungan industrial : data Lembaga hubungan industrial, serikat pekerja, kasusu perselisihan hubungan industrial, penyelesaian kasus dan mediator sebagai ujung tombak pembinaan hubungan industrial.
- Pengawasan Norma Ketenagakerjaan : pembinaan norma ketenagakerjaan di Perusahaan, wajib lapor ketenagakejraan perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan, Kecelakaan kerja, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan klasifikasi Perusahaan.

Mengurangi pengangguran yang ada salah satunya Adalah menyiap pencari kerja dengan bekal keterampilan dan keahlian. Pencari kerja yang tersebar di kabupaten / kota dilatih dan diberi keterampilan sesuai dengan pasar kerja. Pelatihan Berbasis Kompetensi di tahun 2024 diikuti oleh 3.294 peserta dan dinyatakan lulus 3.288 orang dan dinyatakan Lulus Uji Kompetensi sebanyak 1.488 orang dari 1.678 peserta yang ikut Ujian Kompetensi. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang ada sebanyak 204 lpks dan 89 lps sudah terakreditasi, juga melakukan pelatihan keterampilan sesuai kejuruan yang ada bagi pencari kerja dengan ditunjang 743 instruktur.

Penyerapan peserta diperusahaan tempat magang cukup tinggi, dari 176 peserta magang, sebanyak 55,90% berhasil terserap di dunia kerja setelah menyelesaikan program magang. Pelaksanaan magang di kabupaten belum mencerminkan keterlibatan daerah yang maksimal, hal ini dari 17 kabupaten/kota yang ada, baru 23,53% atau 4

daerah yang melaksanakan pemagangan. Keterbatasan tempat magang (perusahaan) juga menjadi kendala tersendiri disamping anggaran yang tersedia. Tahun 2024 sebanyak 7.692 perusahaan terdaftar, baru 0,26% atau 20 perusahaan yang melaksanakan Program Pemagangan Dalam Negeri.

Penyerapan pencari kerja di tahun 2024 sebanyak 14.349 orang atau 72,90% dari pencaker terdaftar 19.736 orang, dengan jumlah lowongan 18.337. Selain mengisi lowongan kerja di dalam negeri, pekerja migran Indonesia memilih untuk bekerja di luar negeri, ada 1.736 pekerja migran yang ditempatkan pada tahun 2024, (577 disektor formal dan 576 disektor informal).

Sumatera Selatan pada tahun 2024 Tenaga Kerja Asing yang bekerja tercatat ada 1.435 orang yang bekerja di 101 perusahaan. Pekerja Asing berkewarganegaraan Republik Rakyat China tercatatt sebanyak 1.106 orang atau 77,07% dari keseluruhan jumlah tenaga kerja asing yang terdaftar dengan pendapatan dari Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing sesuai Peraturan Daerah Nomor 60 tahun 2023), sebesar Rp.933.933.600

Lembaga Hubungan Industrial bukan sekadar pelengkap struktur organisasi, melainkan tulang punggung stabilitas ekosistem ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan yang terdaftar ada 2.603 pp, Perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama 2.603 pkb, Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang didaftarkan tercatat sebanyaj 1.508 sp/sb dan ada 762 Lembaga Kerjasama Bipartit.

Kasus perselisihan hubungan industrial tahun 2024 tercatat sebanyak 252 kasus. kasus yang diselesaikan oleh mediator / anjuran mencapai 128 kasus, sementara penyelesaian melalui Perjanjian Bersama ada 117 kasus.

Tahun 2024: Kenaikan kembali melambat secara drastis, dengan sebagian besar wilayah mencatat kenaikan yang relatif kecil, seringkali di bawah 2% (seperti Provinsi, Banyuasin, Musi Banyuasin). Tahun 2025: Terdapat proyeksi kenaikan yang seragam di angka 6,50% untuk seluruh wilayah yang tercantum, kecuali untuk "Provinsi" yang sedikit lebih rendah.

Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Sumatera Selatan merupakan upaya penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan adil bagi seluruh pekerja. Namun, seperti halnya di daerah lain, pelaksanaan ini masih menghadapi berbagai tantangan dan terus diupayakan untuk ditingkatkan. Penerapan Norma K3 bertujuan melindungi pekerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK), serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif

Kecelakaan kerja tahun 2024 tercatat sebanyak 11.727 kasus yang melibatkan 7.021 pekerja, kecelakaan kerja yang terjadi ditempat kerja 7.820 Kasus (66,68%) dan sisanya 33,32% (3.097 kasus) terjadi diluar tempat kerja (perjalanan pergi ketempat kerja atau pulang dari tempat kerja). Korban kecelakaan ditempat kerja 4.893 orang atau 69,69% dan kecelakaan diluar tempat kerja ada 2.128 orang (30,31%)

Perusahaan yang telah terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online 4.735 perusahaan. Hal ini masih sangat kecil bila dibandingkan jumlah perusahaan yang ada di Data Base Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebanyak 7.692 perusahaan.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang wajib dimiliki perusahaan sebanyak 981 P2K3 atau 20,72% dari jumlah perusahaan yang terdaftar pada WLKP Online. Keberadaan P2K3 harus terus didorong untuk dibentuk di perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Selatan, P2K3 sebagai ujung tombak dalam menjalan SMK3. Agar kecelakaan kerja yang banyak terjadi (7820 kecelakaan ditempat kerja) dapat ditekan jumlahnya serta dicegah agar kejadian tersebut tidak terulang.

ILO merekomendasikan 1 Pegawai Pengawas mengawasi 20.000 pekerja formal di negara berkembang. Tenaga Kerja formal yang tercatat sebanyak 1.684.209 pada akhir tahun 2024 (BRS No. 66/11/16/Th. XXVI, 5 November 2024) dapat ditarik kesimpulan, pegawai pengawas yang diperlukan sebanyak 84 orang masih ada kekurangan sebesar 53,57% atau 45 pegawai pengawas.

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan Data Base Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, besar harapan kami buku database ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan data bidang ketenagakerjaan.

Buku Database ini merupakan implementasi dari kegiatan Satu Data Ketenagakerjaan sesuai Permenaker No.15/2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan khususnya ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Data yang disajikan merupakan data sekunder yang diperoleh kabupaten/kota. Untuk mendukung keakuratan data, juga menggunakan data primer hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menerima setiap kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan penyusunan database ketenagakerjaan dimasa mendatang.

Palembang, ……2025.

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. INDRA BANGSAWAN,S.H.,M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700509 199199203 1 001

DAFTAR ISI

Bagian I Gambaran Umum 1

A. PENDAHULUAN 2
B. LATAR BELAKANG 3
C. TUJUAN 5
D. METODELOGI 5
E. RUANG LINGKUP 6
F. PROFIL SUMATERA SELATAN 7

Bagian II Ketenagakerjaan Umum 11

A. PENDUDUK YANG BEKERJA (PYB) 13
1. Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha 13
2. Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan 14
3. Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 15
4. Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja 16
5. Pekerja Paruh Waktu menurut Jenis Kelamin 16
6. Pekerja Formal dan Informal 17

B. PENGANGGURAN 19
1. Pengangguran Menurut Jenis Kelamin 20
2. Pengangguran Mneurut Daerah Tempat Tinggal 20
3. Pengangguran Menurut Pendidikan 21
4. Setengah Penganggur Menurut Jenis Kelamin 23
5. Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota 23
6. Kesempatan Kerja di Kabupaten/Kota 25

Bagian III Ketenagakerjaan Khusus 28

A. BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS 29
1. Pelatihan Berbasis Kompetensi 29
2. Lembaga Pelatihan Kerjasama Swasta (LPKS) 32
3. Magang (Kerja) Dalam Negeri 33

B. BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERJA 36
1. Pencari Kerja, Lowongan Kerja dan Penempatan Kerja 37
2. Pekerja Migran Indonesia 39
3. Tenaga Kerja Asing 43

C. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL, SYARAT KERJA & JAMINAAN SOSIAL 46

1. Peraturan Perusahaan (PP) 47
2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 48

3. Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) 50
4. Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit)..... 51
5. Perselsisihan hubungan Industrial 52
6. Mediator Hubungan Industrial 57
7. Upah Minimum 58

D. BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN 59
1. Perusahaan Terdaftar..... 60
2. Keselamatan dan Kesehatan kerja 63
3. Sistem Manajemen K3 65
4. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK) 66

DAFTAR TABEL

Tabel 1,	Data Ketenagakerjaan	2
Tabel 2,	Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan	8
Tabel 3,	Jumlah Penduduk Sumatera Selatan	9
Tabel II.1	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan kerja (2020-2024)	12
Tabel II.2	Pekerja Sektor Formal dan Informal Tahun 2024	17
Tabel II.3	Pekerja Laki-laki disektor Formal dan Informal Tahun 2024	18
Tabel II.3	Pekerja Perempuan disektor Formal dan Informal Tahun 2024	19
Tabel II.5	Jumlah Pengangguran Sumatera Selatan, Agustus 2020-2024	19
Tabel II.6	Pengangguran Terbuka Kabupaten / Kota	24
Tabel II.7	Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota	26
Tabel III-A.1	Pelatihan Berbasis Kompetensi di BLK Provinsi Sumatera Selatan	31
Tabel III-B.1	Pencari kerja, Lowongan, Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2024.	38
Tabel III-B.2	Pekerja Migran Indonesia Sektor Formasl-Informal Tahun 2024	42
Tabel III-B.3	Tenaga Kerja Asing, Perusahaan, Asal Negara dan Wilayah Kerja	44
Tabel III-B.4	Tenaga Kerja Asing dan Perusahaan Tahun 2024	45
Tabel III-C.1	Lembaga Hubungan Industrial Tahun 2024	47
Tabel III-C.2	Kasus, Teaga Kerja terlibat dan Penyelesaian Kasus Tahun 2025 .	56
Tabel III-C.3	Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025....	59
Tabel III-D.1	Kasus Kecelakaan Kerja di Cover BPJS Ketenagakerjaan.....	64

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Distribusi dan perubahan Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha	13
Grafik II.2	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal	14
Grafik II.3	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	15
Grafik II.4	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja	16
Grafik II.5	Tren Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin	17
Grafik II.6	Tren Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin	20
Grafik II.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tempat Tinggal	21
Grafik II.8	Persentase Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi	22
Grafik II.9	Tren Tingkat Pengangguran Menurut Jenis Kelamin	23
Grafik III-A.1	Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2020-2024	30
Grafik III-A.2	LPKS dan Akreditasi Provinsi Sumatera Selatan	32
Grafik III-A.3	Penyerapan Peserta Magang Dalam Negeri	34
Grafik III-A.4	Pemagangan Dalam Negeri Tahun 2020-2024	35
Grafik III-B.1	Pencari Kerja, Lowongan, Penempatan Tenaga Kerja	37
Grafik III-B.2	Pekerja Migran Indonesia (Formal & Informal)	41
Grafik III-C.1	Pertumbuhan Perusahaan memiliki PP	48
Grafik III-C.2	Pertumbuhan Perusahaan Memiliki PKB	49
Grafik III-C.3	Lembaga Hubungan Industrial SP/SB	50
Grafik III-C.4	Lembaga Hubungan Industrial LKS Bipartit	51
Grafik III-C.5	Kasus Hubungan Industrial, Mediator dan Penyelesaian melalui Perjanjian Bersama	52
Grafik III-C.6	Kasus Perselisishan Hubungan Industrial	54
Grafik III-D.1	Jumlah Perusahaan yg beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan.	60
Grafik III-D.2	Jumlah Pekerja di Perusahaan Provinsi Sumatera Selatan	62
Grafik III-D.3	Penerapan Sistem Manajemen K3	65

Bagian I
Gambaran Umum

Implementasi Satu Data Ketenagakerjaan di instansi pusat dan daerah merupakan kebijakan tata kelola pemerintah di sektor ketenagakerjaan, untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk. Ini dicapai melalui penyediaan data yang berkualitas, terstandardisasi, dan mudah diakses, baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat.

Melalui Permenaker Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan, yang baru disahkan dan diberlakukan diharapkan tata kelola data ketenagakerjaan semakin baik.

A. PENDAHULUAN.

Sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas sebagai produsen data, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan menyusun Buku Data Ketenagakerjaan Sumatera Selatan. Dinas Tenaga Kerja berupaya untuk menghasilkan Tata Kelola data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah dibagipakaikan antar Instansi daerah melalui pemenuhan prinsip – prinsip Data Indonesia, yaitu Satu Standar Data, Satu Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi atau Data Induk. Buku Data Ketenagakerjaan Sumatera Selatan diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Daerah dalam penyelenggaraan tata Kelola data ketenagakerjaan, mendorong keterbukaan dan transparansi data ketenagakerjaan, serta semakin meningkatkan kualitas dan integritas data ketenegakerjaan yang mendukung kebijakan pemerintah di sektor Ketenagakerjaan. Data Ketenagakerjaan yang akan di kumpulkan pada tahun 2024 sesuai dengan Produsen Data yang telah disetujui dalam Sidang Penetapan daftar Data di Forum SDK, yaitu: Penempatan Daftar Data pelatihan dan Produktivitas, Penempatan Tenaga kerja dan Pengembangan kesempatan kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos TK serta Pengawasan ketenagakerjaan dan K3.

Kewajiban dan tanggungjawab Dinas Provinsi untuk mengumpulkan Data Ketenagakerjaan sebanyak 41 item untuk Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota 26 item.

Tabel 1 : Data Ketenegakerjaan Provinsi dan Kabupaten

NO	DATA BIDANG KETENAGAKERJAAN	DINAS PROVINSI	DINAS KAB/KOTA
1	Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	5 Data	4 Data
2	Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	14 Data	15 Data
3	Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9 Data	7 Data
4	Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3	13 Data	-
	Jumlah Data	41 Data	26 Data

Menetapkan daftar data prioritas beserta standar datanya yang akan dikumpulkan untuk tahun 2023/2024. Adapun data yang tepat / akurat, harus memenuhi empat faktor penting, yaitu:
Harus relevan antara data dan tujuan penggunaan. Data yang diperlukan berbeda untuk tujuan berbeda, sehingga butuh direncanakan dengan baik.

1. Ketepatan waktu. Jadi data tersebut harus dapat menggambarkan situasi terkini.
2. Reliabilitas data, sangat bergantung jumlah sampel yang dibutuhkan agar tingkat presisi bisa dijaga serta memastikan sampling framework-nya valid, sehingga kesimpulan yang diambil memang dapat memberikan gambaran akurat tentang target populasi.
3. Akses data.

B. LATAR BELAKANG

Implementasi satu data ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan tata kelola data ketenagakerjaan yang lebih baik, efektif, dan terpadu di seluruh instansi terkait. Ini mencakup penyatuan persepsi tentang prinsip data ketenagakerjaan, penggunaan standar data dan metadata yang baku, serta interoperabilitas antar sistem. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pengambilan keputusan terkait ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun daerah

Kompleksitas urusan di bidang ketenagakerjaan menuntut akurasi perencanaan, evaluasi serta pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pelaksanaan. Karena itu, sangat penting bagi kita menerapkan budaya literasi data dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan ketenagakerjaan.

Budaya literasi data adalah budaya yang terkait dengan kemampuan membaca, menganalisis dan membuat konklusi berpikir berdasarkan data yang ada. Budaya yang menghendaki keterukuran yang fact-based atau berdasarkan data dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengkritisi setiap keputusan yang diambil. Syarat mutlak yang harus dipenuhi agar budaya literasi data dapat diterapkan dalam pembangunan ketenagakerjaan yakni adanya dukungan ketersediaan data ketenagakerjaan yang berkualitas, yaitu akurat, relevan, up to date, lengkap, dan terpadu.

Data ketenagakerjaan yang berkualitas menjadi sangat penting karena data sejatinya merepresentasikan fakta atau keadaan yang sebenarnya dari suatu kejadian. Data dapat diolah menjadi informasi yang memberikan pengetahuan, dan jika disajikan secara periodik dan berkala maka akan didapatkan gambaran historis atau sejarah dari suatu fakta. Yang tentu saja akan sangat penting dan berguna untuk pengampilan kebijakan dan keputusan dalam membuat suatu perencaan pembangunan ketenagakerjaan, mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan, serta melakukan evaluasi pembangunan ketenagakerjaan.

Untuk itu, sebagai salah satu upaya dalam menyediakan data ketenagakerjaan yang lengkap dan disajikan secara periodik dan berkala, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan menyusun Buku Data Ketenagakerjaan.

Data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah, yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut, maka dari itu data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat di terima oleh penerima. Data dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara, atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Suatu informasi bisa saja menjadi data apabila informasi tersebut digunakan kembali untuk pengolahan sistem informasi selanjutnya.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan dan pemecahan masalah

ketenagakerjaan saat ini dan masa datang. Kebijakan, strategis dan program ketenagakerjaan ditentukan oleh kondisi data dan informasi yang baik. Apabila telah tersusun kebijakan, strategi dan program maka kemungkinan besar masalah ketenagakerjaan akan dapat dipecahkan secara benar pula.

Untuk dapat menyediakan data dan informasi bidang ketenagakerjaan yang akurat dan benar tersebut, sangat ditentukan oleh dukungan system informasi yang baik dan handal. Sistem informasi yang dimaksud disini menyangkut arus data dan informasi dari sumber data ke tempat pengolahan dan seterusnya ke pengguna data dan informasi khususnya pengambil dan penyusun kebijakan.

Ketenagakerjaan bukanlah semata-mata masalah pengangguran saja, melainkan masalah yang lebih luas dan kompleks. Bila kita berbicara masalah tenaga kerja maka yang diperhatikan adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan/keahlian, jenis pekerjaan, tingkat upah, produktivitas, norma-norma ketenagakerjaan, lowongan dan penempatan, perluasan kerja, hubungan industrial, demo buruh, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Serikat Pekerja, Perjanjian Kerja, pengawasan tenaga kerja, tenaga kerja asing, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) dan masih banyak lagi.

Jumlah Penduduk Usia Kerja pada akhir tahun 2024 sejumlah 6.579.733 orang atau 74,45% dari Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 (Proyeksi BPS) 8.837.301 jiwa, dengan Jumlah Angkatan Kerja sebanyak 4.659.809 orang atau 52,73%.

Tingkat Keterampilan dan kompetensi tenaga kerja Indonesia secara umum masih kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri, khususnya Sumatera Selatan juga masih kalah bersaing dengan tenaga kerja dari Pulau jawa. Perusahaan yang beroperasi di Sumatera Selatan sebagian masih mendatangkan tenaga kerja dari Pulau Jawa ataupun dari luar negeri.

Pendidikan dan keterampilan tenaga kerja akan berpengaruh pada kesempatan kerja dan tingkat penghasilan. Tingkat pengangguran akan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan pada umumnya, sedangkan tingkat penghasilan pekerja akan menimbulkan kerawanan pada hubungan industrial di perusahaan-perusahaan. Konflik yang muncul antara pemilik modal dengan pekerja seringkali menimbulkan kondisi hubungan industrial yang tidak kondusif, dan berpengaruh pada tingkat produksi perusahaan dan produktifitas tenaga kerja. Pada akhirnya perusahaan akan mengalami penurunan hasil produksi dan keuntungan perusahaan yang berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan pekerja.

Data yang terkumpul akan sulit dipahami jika tidak diolah menjadi informasi yang relevan dengan kebutuhan, untuk itu diperlukan proses merubah data menjadi informasi yang bermakna dan berguna. Output bidang ketenagakerjaan baik itu hasil kinerja atau permasalahan direkap, selanjutnya dilakukan pemetaan. Data ketenagakerjaan yang bersumber dari kabupaten/kota di provinsi selanjutnya dipilah dan diolah sesuai kelompok data dan peruntukannya.

C. TUJUAN

Buku Satu Data Ketenagakerjaan disusun dan disajikan dengan tujuan untuk:

1. Menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan Sumatera Selatan yang relevan, komprehensif, berkualitas, dan terbaru (up to date) secara periodik dan berkala.
2. Sumber referensi pengambilan kebijakan dan keputusan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang ketenagakerjaan.
3. Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.15 tahun 2020 Tentang Satu Data Ketenagakerjaan, khususnya pasal 19 ayat (2) yang menyebutkan "Penyajian Data dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali setahun dan harus dalam bentuk sederhana agar mudah dimengerti"
4. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pembangunan ketengakerjaan.

D. METODOLOG

1. Jenis Data

Secara garis besar, ada dua jenis data yang disajikan dalam buku ini, yaitu:

a. Data Ketenagakerjaan Umum, adalah data ketenagakerjaan yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, dan bersifat makro. Termasuk dalam data jenis ini yaitu: Penduduk Usia Kerja (PUK), Angkatan Kerja (AK), Bukan Angkatan Kerja (BAK), Penduduk Yang Bekerja (PyB), dan Pengangguran Terbuka (TPT).

b. Data Ketenagakerjaan Khusus, adalah data ketenagakerjaan yang memiliki ciri-ciri sektoral dan bersifat mikro atau khusus dalam arti data tersebut dihasilkan dari proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan. Termasuk data dalam jenis ini yaitu data terkait substansi: Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, serta Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

2. Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data

Sumber data ketenagakerjaan dibedakan menjadi dua sesuai dengan jenis data ketenagakerjaan, yaitu:

a. Data Ketenagakerjaan umum bersumber dari data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sakernas dilakukan dengan cara pencacahan terhadap sampel terpilih dan diselenggarakan oleh BPS dua kali dalam setahun, yakni Periode Februari dan Periode Agustus. Hasil Sakernas periode Februari hanya dapat dilakukan estimasi sampai dengan level provinsi dan berita resminya dirilis pada bulan Mei. Sedangkan hasil Sakernas periode Agustus dapat dilakukan estimasi sampai dengan level kabupaten/kota dan berita resminya dirilis pada bulan November. Dalam buku Data Ketenagakerjaan ini, yang digunakan adalah hasil Sakernas Agustus.

b. Data ketenagakerjan khusus bersumber dari produsen data ketenagakerjaan, yaitu unit bidang teknis Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan kabupaten/Kota serta sumber lainnya seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Data ini dikumpulkan dengan cara kompilasi administrasi produk data–data ketenagakerjaan. Dalam buku Data Ketenagakerjaan ini, secara umum penyajian data dengan titik cut off bulan Desember Tahun 2024.

3. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan dua tools. Yang pertama, data ketenagakerjaan umum atau data hasil Sakernas Agustus 2024 diolah menggunakan paket program Statistics (SPSS). Sedangkan data ketenagakerjaan khusus yang berupa produk kompilasi administratif diolah dengan menggunkan paket program Microsoft Excel.

4. Analis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Ini adalah metode statistik yang berhubungan dengan aktivitas penghimpunan, penataan, peringkasan, dan penyajian data dengan maksud agar data menjadi lebih bermakna, mudah dibaca, dan mudah dipahami oleh pengguna. Melalui metode ini, data ketenagakerjaan yang sudah terkumpul dideskripsikan atau dibuat gambaran umum tentang karakteristiknya. Ukuran-ukuran yang dapat disajikan dengan metode statistik deskriptif ini berupa frekuensi, pemusatan data, penyebaran data, kecenderungan suatu gugus data, dan lain-lain. Agar lebih mudah dibaca dan dipahami, maka data diringkas dalam bentuk tabulasi dan/atau grafik/diagram.

E. RUANG LINGKUP

Buku Satu Data Ketenagakerjaan Sumatera Selatan ini merupakan salah satu bentuk penyediaan data ketenagakerjaan dengan format buku dan diterbitkan secara periodik satu kali setahun. Lingkup data yang disajikan mencakup:

1. Data Ketenagakerjaan Umum

2. Data Ketenagakerjaan Khusus bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Data Ketenagakerjaan Khusus bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
4. Data Ketenagakerjaan Khusus bidang Hubungan Industrial, Syarat kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
5. Data Ketenagakerjaan Khusus bidang Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan K3.

F. PROFIL SUMATERA SELATAN

Provinsi Sumatera Selatan secara astronomi terletak pada 1°-5° Lintang Selatan dan 102°-107° Bujur Timur dengan luas daerah seluruhnya 87.017.41 km². Secara geografis terletak di Pulau Sumatera dengan batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Secara topografi, wilayah Provinsi Sumatera Selatan di pantai Timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa (bakau). Sedikit makin ke barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih masuk kedalam wilayahnya semakin bergunung-gunung. Disana terdapat Bukit Barisan yang membelah Sumatera Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900-1.200 meter dari permukaan laut. Bukit barisan terdiri atas puncak Gunung Seminung (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), Gunung Patah (1.107 m) dan Gunung Bengkuk (2.125m). Disebelah Barat Bukit Barisan merupakan lereng. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai beberapa sungai besar. Kebanyakan sungai-sungai itu bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Ladan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi, sedangkan Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sunga Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak Sungai Musi.

Sumatera bagian selatan yang dikenal sebagai Provinsi Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 12 September 1950 yang awalnya mencakup daerah Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung dan keempat wilayah yang terakhir disebutkan kemudian mayang-mayang menjadi wilayah provinsi tersendiri akan tetapi memiliki akar budaya bahasa dari keluarga yang sama yakni bahasa Austronesia proto bahasa Melayu dengan pembagian daerah bahasa dan logat antara lain seperti Palembang, Ogan, Komering, Musi, Lematang dan masih banyak bahasa lainnya. Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya; pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara.

Tabel 2. : Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Luas km2	Kepadatan Jw/km2	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Ogan Komering Ulu	3.774,50	101,48	13	143	14
2	Ogan Komering Ilir	17.071,33	47,28	18	309	18
3	Muara Enim	6.763,91	94,76	22	246	10
4	Lahat	4.333,59	103,92	24	363	14
5	Musi Rawas	6.122,59	67,26	14	186	13
6	Musi Banyuasin	14.550,79	44,81	15	229	13
7	Banyu Asin	12.262,76	72,24	21	296	17
8	OKU Selatan	3.412,72	125,86	19	242	17
9	OKU Timur	4.369,25	154,30	20	325	7
10	Ogan Ilir	2.302,86	189,39	16	227	14
11	Empat Lawang	2.234,10	154,71	10	146	10
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1.842,56	111,47	5	65	6
13	Musi Rawas Utara	5.937,80	33,42	7	82	7
14	Palembang	352,51	4.874,87	18	-	107
15	Prabumulih	447,31	454,523	6	12	34
16	Pagar Alam	625,91	238,37	5	-	35
17	Lubuklinggau	367,73	669,09	8	-	72
	Sumatera Selatan	86.771,68	101,85	241	2.871	408

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan berdiri pada tanggal 15 Mei 1946 terdiri dari 13 (tigabelas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai ibukota Provinsi. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 13 Kabupaten, 4 Kotamadya, 241 Kecamatan, 461 Kelurahan, 2.780 Desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir jadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas 16.905,32 Ha, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.477 Ha.

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Jumlah Penduduk Sumatera Selatan di akhir tahun 2024 sebanyak 8.743.522 jiwa terdiri dari 4.453.902 Laki-laki dan 4.289.620 Perempuan. Kota Palembang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak 1.718.440 jiwa (845.670 laki-laki dan 840.403 perempuan) dengan kepadatan penduduk 4.840 jiwa/km2 dan Kota Pagaralam sebagai daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit sejumlah 149.199 jiwa yang terdiri dari 76.336 laki-laki dan 72.863 perempuan. Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling kecil, yaitu 33 jiwa/km2.

Tabel 3. : Jumlah Penduduk Sumatera Selatan Proyeksi BPS 2024 berdasarkan Sensus Penduduk 2020

No.	Kabupaten/Kota	Penduduk		Total
		Laki2	Perempuan	
1	Ogan Komering Ulu	195.963	187.076	383.039
2	Ogan Komering Ilir	414.241	392.844	807.085
3	Muara Enim	326.789	314.173	640.962
4	Lahat	230.040	220.241	450.281
5	Musi Rawas	210.467	201.320	411.787
6	Musi Banyuasin	334.624	317.326	651.950
7	Banyu Asin	453.461	432.441	885.902
8	OKU Selatan	222.014	207.521	429.535
9	OKU Timur	344.755	329.429	674.184
10	Ogan Ilir	221.026	215.115	436.141
11	Empat Lawang	177.547	168.094	345.641
12	Penukal Abab Lematang Ilir	103.708	101.676	205.384
13	Musi Rawas Utara	101.061	97.352	198.413
14	Palembang	860.882	857.558	1.718.440
15	Prabumulih	102.205	101.107	203.312
16	Pagar Alam	76.336	72.863	149.199
17	Lubuklinggau	123.892	122.154	246.046
	SUMATERA SELATAN	**4.499.011**	**4.338.290**	**8.837.301**

Terdapat selisih sekitar 160.721 jiwa lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Jika dihitung rasio jenis kelaminnya (Sex Ratio), angkanya berada di kisaran 103,7. Artinya, terdapat sekitar 103 hingga 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Sumatera Selatan. Pola dominasi jumlah laki-laki ini terlihat konsisten di hampir seluruh Kabupaten/Kota.

Data menunjukkan adanya ketimpangan distribusi penduduk yang cukup signifikan antara ibu kota provinsi dengan daerah kabupaten/kota lainnya.

Tiga wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak adalah:

- Kota Palembang (1.718.440 jiwa), Sebagai ibu kota provinsi, Palembang menjadi pusat konsentrasi penduduk terbesar, menampung sekitar 19,4% (hampir seperlima) dari total penduduk Sumatera Selatan. Tingginya angka ini menunjukkan kuatnya urbanisasi dan daya tarik ekonomi di Palembang dibandingkan daerah lain.

- Kabupaten Banyuasin (885.902 jiwa), Menempati posisi kedua. Sebagai wilayah penyangga (*hinterland*) yang berbatasan langsung dengan Palembang, Banyuasin mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat akibat limpahan dari ibu kota.

- Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) (807.085 jiwa): Wilayah ini memiliki populasi besar yang didukung oleh luas wilayah yang besar dan sektor perkebunan/pertanian yang dominan.

Di daerah kabupaten yang berbasis pertanian/perkebunan, jumlah laki-laki cenderung dominan secara signifikan. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja sektor perkebunan (sawit/karet) yang lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki, atau faktor migrasi masuk tenaga kerja pria ke wilayah tersebut.

Tersedianya Jalan Tol yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan (Palembang) dengan Provinsi Lampung (Bakauhuni) mempunyai dampak yang luas terhadap arus transportasi manusia dan barang. Hal ini berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi bagi Lampung dan Sumatera Selatan, juga berampak bagi pertumbuhan ekonomi dibeberapa ruas jalan umum Lintas Timur yang selama ini menjadi pusat lalu lintas barang dan manusia.

Pertumbuhan ekonomi Sumsel yang mencapai angka 5,03% (2024) didorong oleh dua mesin utama: sektor korporasi skala besar (dominasi laki-laki) dan sektor UMKM serta ekonomi riil (dominasi perempuan).

Sumatera Selatan menjadi salah satu tujuan investasi di Indonesia. Tahun 2024 Realisasi investasi di Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai Rp70,92 triliun. Angka ini melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar Rp41,5 triliun, serta target dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp64,82 triliun.

Rinciannya, investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp36,67 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp34,52 triliun. Beberapa sektor yang menjadi penyumbang utama investasi di Sumsel pada tahun 2024 adalah industri kertas dan percetakan, pertambangan, listrik gas dan air, industri makanan, serta tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 47.792 orang.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki berbagai sarana dan prassarana penunjang diantaranya adalah Bandara Sultan Machmud Badaruddin II (SMB II) yang terdapat di Kota Palembang, Bandara Atung Bungsu Kota Pagaralam, Bandara Banding Agung yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bandara Lubuk Linggau di Kabupaten Musi Rawas, Pelabuhan Palembang (Boom Baru) yang terletak di Kota Palembang juga Pelabuhan Penumpang khusus Feri di Tanjung Api Api Kabupaten Banyuasin.

Bagian II
Ketenagakerjaan Umum

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun hingga 64 tahun. Oleh karenanya, setiap orang yang mampu bekerja bisa disebut sebagai tenaga kerja.

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Ketenagakerjaan, definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 6.579.733 orang, naik sebanyak 91.972 orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 4.659.809 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 1.919.924 juta orang.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 4.659.809 orang, naik 71.641 orang dibanding Agustus 2023 (4.588.168). Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan sebesar 0,10 persen poin menjadi 70,82. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 3,86 persen, turun sebesar 0,25 persen poin dibandingkan Agustus 2023 (4,11 persen).

Sebanyak 2,79 juta orang (63,34 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 0,63 persen poin dibanding Agustus 2023 (62,97 persen) dan bekerja di formal sebanyak 1,69 juta orang. Persentase setengah pengangguran mengalami kenaikan sedangkan pekerja paruh waktu mengalami penurunan. Kenaikan setengah pengangguran sebesar 1,38 persen poin dan penurunan pekerja paruh waktu sebesar 2,47 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

Tabel II.1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja (2020-2024)

Jenis Kegiatan Utama	Agust 2020	Agust 2021	Agust 2022	Agust 2023	Agust 2024
Penduduk Usia Kerja	6.307.000	6.396.600	6.498.870	6.487.760	6.579.760
Angkatan Kerja	4.329.750	4.398.910	4.497.960	4.588.170	4.659.809
- Bekerja	4.091.341	4.179.700	4.289.700	4.399.660	4.480.100
- Pengangguran	238.360	219.200	208.260	188.510	179.709
Bukan Angkatan Kerja	1.977.300	1.997.700	1.991.910	1.899.590	1.919.950
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,65	68,77	69,31	70,20	70,82
- Laki-Laki	82,71	82,66	84,95	85,39	85,79
(Orang)				2.817.059	2.868.429
- Perempuan	54,25	54,54	53,32	55,54	55,35
(Orang)				1.771.111	1.791.380

Sumber : Data diolah, BPS BRS No.66/11/16 Th.XXVI, 5 November 2024

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 4.480.100 juta orang penduduk bekerja dan 179.710 juta orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 71.641 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 80.440 orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 8.800 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sejak Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 70,82 persen, naik 0,10 persen poin dibanding Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 85,79 persen, lebih t inggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,35 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,40 persen poin sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin.

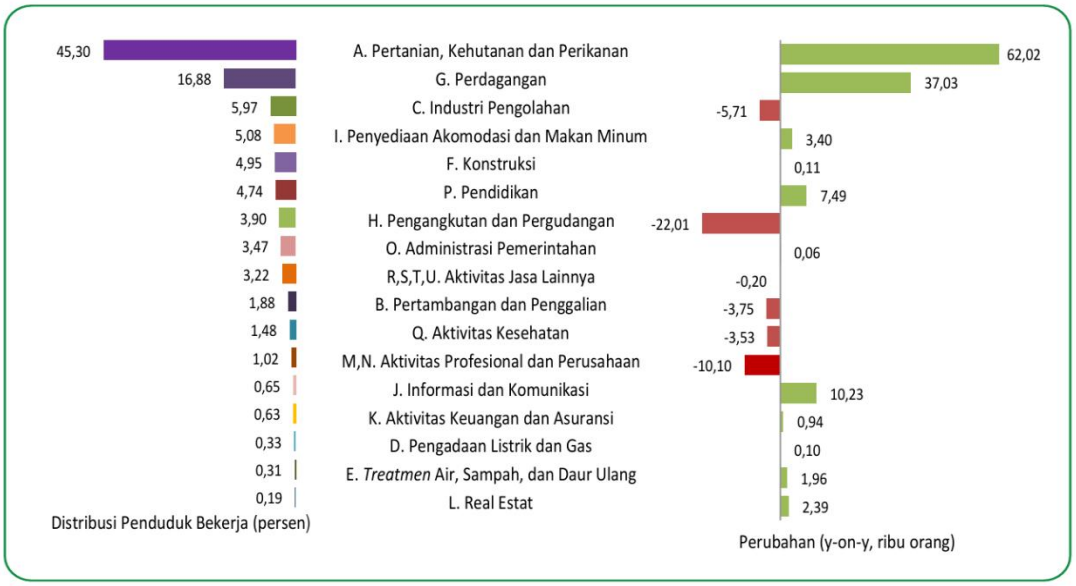
A. PENDUDUK YANG BEKERJA. (PYB)

Bekerja merupakan kegiatan seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan, keuntungan, maupun upah/gaji yang dilakukan paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir. Penduduk yang bekerja sebanyak 4,.480.100 orang, meningkat sebanyak 80.440 orang dari Agustus 2023. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (62,02 ribu orang). Untuk melihat struktur penduduk bekerja maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu.

1. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 45,30 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,88 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 5,97 persen.

Grafik II-1 Distribusi dan Perubahan Peduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha, Agustus 2024



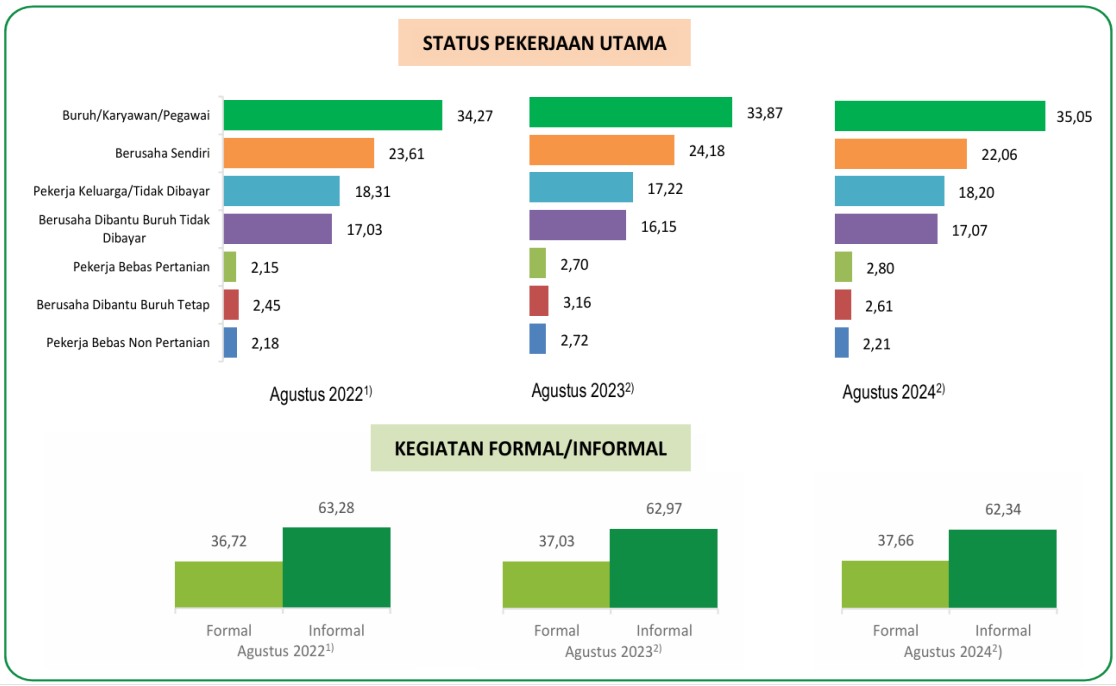
Sumber : BPS - BRS No.66/11/16 Th.XXVI, 5 November 2024

Dibandingkan Agustus 2023, tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (62,02 ribu orang); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (37,03 ribu orang); dan Informasi dan Komunikasi (10,23 ribu orang). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah Pengangkutan dan Pergudangan (22,01 ribu orang), Aktivitas Profesional dan Perusahaan (10,10 ribu orang): dan Industri Pengolahan (5,71 ribu orang).

2. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Pada Agustus 2024, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/ karyawan/ pegawai, yaitu sebesar 35,05 persen, sementara yang paling sedikit berstatus pekerja bebas non pertanian yaitu sebesar 2,21 persen. Dibandingkan Agustus 2023, status pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah buruh/karyawan/pegawai sebesar 1,18 persen poin. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar terdapat pada status berusaha sendiri sebesar 2,12 persen poin.

Grafik II-2 : Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal / Informal, Agustus 2022 – Agustus 2024



Sumber : BPS - BRS No.66/11/16 Th.XXVI, 5 November 2024

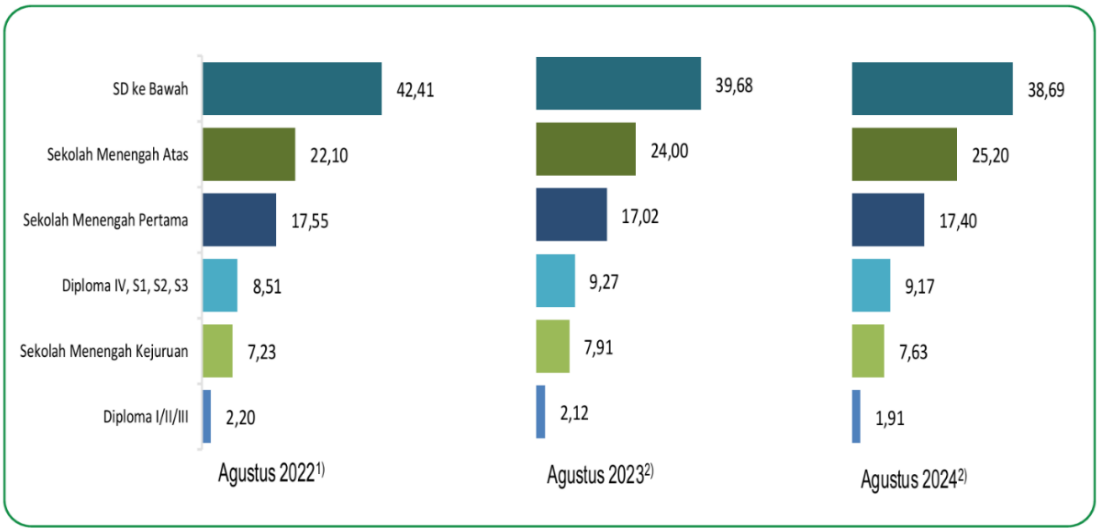
Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 2,79 juta orang (62,34 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,69 juta orang (37,66 persen). Dibandingkan Agustus 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 0,63 persen poin (Lampiran 1).

Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan /pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar).

3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 38,69 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 11,08 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022 dan Agustus 2023.

Grafik II-3 : Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2022 – Agustus 2024



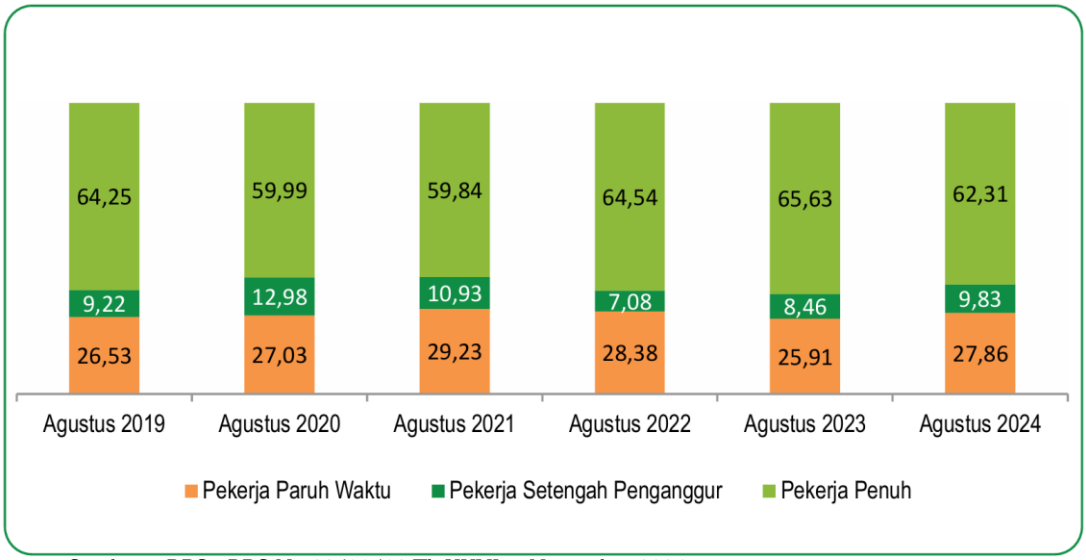
Sumber : BPS - BRS No.66/11/16 Th.XXVI, 5 November 2024

Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III, dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,99 persen poin, 0,28 persen poin, 0,21 dan 0,10 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (1,20 persen poin).

4. Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja.

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) dengan persentase sebesar 62,31 persen pada Agustus 2024. Sementara itu, 37,69 persen sisanya merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu). Dibandingkan Agustus 2023, persentase pekerja tidak penuh mengalami peningkatan sebesar 3,32 persen poin. Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu.

Grafik II-4 : Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja, Agustus 2019 – Agustus 2024

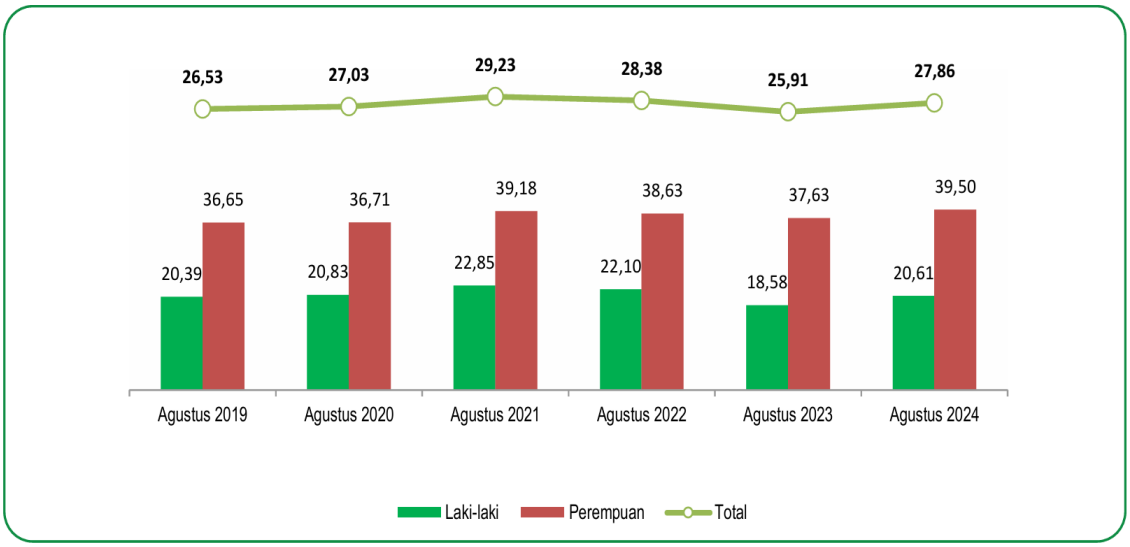


Sumber : BPS - BRS No.66/11/16 Th.XXVI, 5 November 2024

5. Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin

Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat pekerja paruh waktu di Indonesia pada Agustus 2024 sebesar 27,86 persen, artinya dari 100 orang penduduk bekerja terdapat sekitar 27-28 orang pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2023, tingkat pekerja paruh waktu mengalami peningkatan sebesar 1,95 persen poin. Pada Agustus 2024, tingkat pekerja paruh waktu perempuan (39,50 persen) lebih tinggi dibanding pekerja paruh waktu laki-laki (20,61 persen). Dibandingkan Agustus 2023, tingkat pekerja paruh waktu laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 2,03 persen poin dan 1,87 persen poin

Grafik II-5 : Tren Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen), Provinsi Sumatera Selatan, Agustus 2019 – Agustus 2024



Sumber : BPS - BRS No.66/11/16 Th.XXVI, 5 November 2024

6. Pekerja Formal dan Informal

Beberapa pihak seringkali mendefinisikan kegiatan informal hanya berdasarkan status pekerjaan. Namun dalam pendekatan batasan kegiatan formal dan informal diambil dari kombinasi antara jenis pekerjaan dan status pekerjaan seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2 : Jumlah Pekerja sektor Formal dan Informal Tahun 2024.

Status Pekerjaan	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana & TU	Tenaga penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Tani	Tenaga Produksi, Operasional & Pekerja	Lainnya	Total
Berusaha Sendiri	21.792	6.338	6.271	313.318	46.372	403.709	190.405	-	988.205
Berusaha dibantu Pekerja tdk Tetap / Pekerja Keluarga / Tdk dibayar	1.234	840	589	176.000	11.534	535.384	39.165	-	764.746
Berusaha Dibantu Pekerja Tetap dan Dibayar	5.332	8.115	550	31.525	4.773	41.916	24.721	-	116.932
Buruh/Karyawan/ Pegawai	251.026	30.389	185.366	143.401	121.080	271.969	493.666	73.582	1.570.479
Pekerja Bebas Pertanian	-	-	-	-	-	118.239	7.297	-	125.536
Pekerja Bebas Nonpertanian	2.184	-	147	5.499	17.504	-	73.510	-	98.844
Pekerja Keluarga/Tdk Dibayar	1.441	415	1.334	146.854	22.439	601.725	41.150	-	815.358
Total	**283.009**	**46.097**	**194.257**	**816.597**	**223.702**	**1.972.942**	**869.914**	**73.582**	**4.480.100**

Pekerja Formal Pekerja Informal

Merujuk pada batasan kegiatan formal dan informal bahwa dari 4.480.100 orang yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan, sebanyak 1.953.505 orang (43,60 %) bekerja di sektor formal dan 2.526.595 (56,40 %) masih bekerja di sektor informal. Dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu (2023), persentase pekerja di sektor informal mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,80 persen poin. Fakta ini sedikit berbeda dengan pembahasan di bab sebelumnya yang menyatakan bahwa persentase tingkat setengah penganguran di Sumatera Selatan mengalami peningkatan. Para pekerja yang termasuk kategori setengah pengangguran pada umumnya bekerja di berbagai sektor pekerjaan informal, sehingga menyebabkan jumlah pekerja di sektor informal seharusnya juga ikut mengalami peningkatan. Namun hal ini dapat mengindikasikan bahwa terjadi sedikit perubahan jam kerja pada pekerjaan informal.

Tabel II.3 : Jumlah Pekerja Laki-Laki disektor Formal dan Informal Tahun 2024.

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaaan Utama								Total
	Tenaga Pro-fesional	Tenaga Kepemim-pinan	Pejabat Pelaksana & TU	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Tani	Tenaga Produksi, Operasional & Pekerja Kasar	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Berusaha Sendiri	8.773	4.587	6.271	106.374	21.853	322.669	147.466	–	617.993
Berusaha Dibantu Pekerja Tdk Tetap/ Pekerja Keluarga/ Tdk Dibayar	1.058	272	330	83.825	6.481	486.520	29.397	–	607.883
Berusaha Dibantu Pekerja Tetap dan Dibayar	4.933	6.629	550	22.364	3.313	32.487	22.184	–	92.460
Buruh/Karyawan/ Pegawai	82.441	25.020	101.276	78.655	45.560	214.547	439.370	70.985	1.057.854
Pekerja Bebas Pertanian	–	–	–	–	–	80.860	4.847	–	85.707
Pekerja Bebas Nonpertanian	1.515	–	147	2.863	10.094	–	67.203	–	81.822
Pekerja Keluarga/ Tdk Dibayar	1.333	–	–	40.081	6.630	156.152	12.818	–	217.014
Total	**100.053**	**36.508**	**108.574**	**334.162**	**93.931**	**1.293.235**	**723.285**	**70.985**	**2.760.733**

Jika dilihat dari aspek gender, baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan memiliki persentase pekerja informal di atas 50 persen. Persentase pekerja informal perempuan sebesar 60,33 persen. Persentase tersebut masih lebih besar bila dibandingkan dengan persentase pekerja informal laki-laki yaitu sebesar 55,24 persen.

Dibandingkan dengan data ketenagakerjaan tahun sebelumnya, persentase pekerja informal penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2024 menunjukkan pola berbeda. Persentase pekerja informal perempuan naik 1,25 persen poin, sedangkan persentase pekerja informal laki-laki turun 2,07 persen poin.

Tabel II.4 : Jumlah Pekerja Perempuan disektor Formal dan Informal Tahun 2024.

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaaan Utama								Total
	Tenaga Pro-fesional	Tenaga Kepemim-pinan	Pejabat Pelaksana & TU	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Tani	Tenaga Produksi, Operasional & Pekerja Kasar	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Berusaha Sendiri	13.019	1.751	–	206.944	24.519	81.040	42.939	–	370.212
Berusaha Dibantu Pekerja Tdk Tetap/ Pekerja Keluarga/ Tdk Dibayar	176	568	259	92.175	5.053	48.864	9.768	–	156.863
Berusaha Dibantu Pekerja Tetap dan Dibayar	399	1.486	–	9.161	1.460	9.429	2.537	–	24.472
Buruh/Karyawan/ Pegawai	168.585	5.369	84.090	64.746	75.520	57.422	54.296	2.597	512.625
Pekerja Bebas Pertanian	–	–	–	–	–	37.379	2.450	–	39.829
Pekerja Bebas Nonpertanian	669	–	–	2.636	7.410	–	6.307	–	17.022
Pekerja Keluarga/ Tdk Dibayar	108	415	1.334	106.773	15.809	445.573	28.332	–	598.344
Total	**182.956**	**9.589**	**85.683**	**482.435**	**129.771**	**679.707**	**146.629**	**2.597**	**1.719.367**

B. PENGANGGURAN

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan Agustus 2024. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,86 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur. Selama enam tahun terakhir, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024.

Tabel II-5. Jumlah Pengangguran Sumatera Selatan, Agustus 2020 – 2024

Jenis Kegiatan Utama	Agust 2020	Agust 2021	Agust 2022	Agust 2023	Agust 2024
Penduduk Usia Kerja	6.307.000	6.396.600	6.498.870	6.487.760	6.479.760
Angkatan Kerja	4.329.700	4.398.910	4.497.960	4.588.170	4.659.810
- Bekerja	4.091.341	4.179.700	4.289.700	4.399.660	4.480.100
- Pengangguran	238.359	219.2	208.26	188.51	179.710
TPT (%)	5,51	4,98	4,63	4,11	3,86

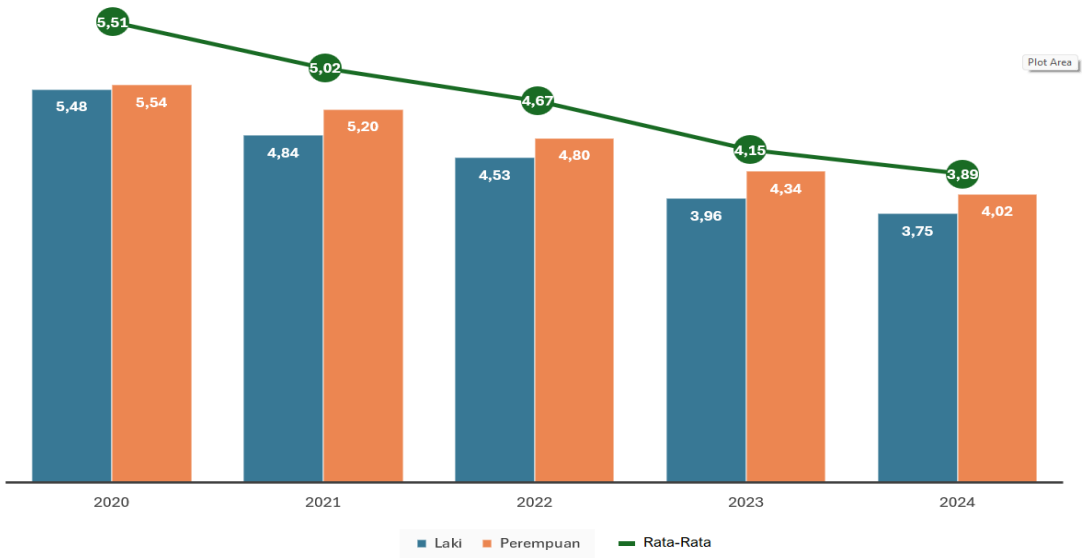
Sumber : Data diolah, BPS BRS No.66/11/16 Th.XXV,I 5 November 2024

Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,25 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 3,75 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,02 persen. TPT laki-laki dan perempuan turun dibandingkan Agustus 2023, masing-masing sebesar 0,21 persen poin dan 0,32 persen poin.

1. Pengangguran Menurut Jenis Kelamin

Pengangguran berdasarkan jenis kelamin pada Agustus 2024, tingkat pengangguran Laki-laki sebesar 4,02% mengalami penurunan sebesar 0,22 point dibanding Agustus 2023 sedangkan tingkat pengangguran perempuan sebesar 3,75% dibandingkan Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 0,21 point dari 3,965%. Namun tingkat pengangguran Perempuan berada dibawah tingkat pengangguran laki-laki dari Agustus 2020 sampai Agustus 2024.

Grafik II-6 : Tren Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2020 – Agustus 2024



Sumber : BPS - BRS No.66/11/16 Th.XXVI, 5 November 2024

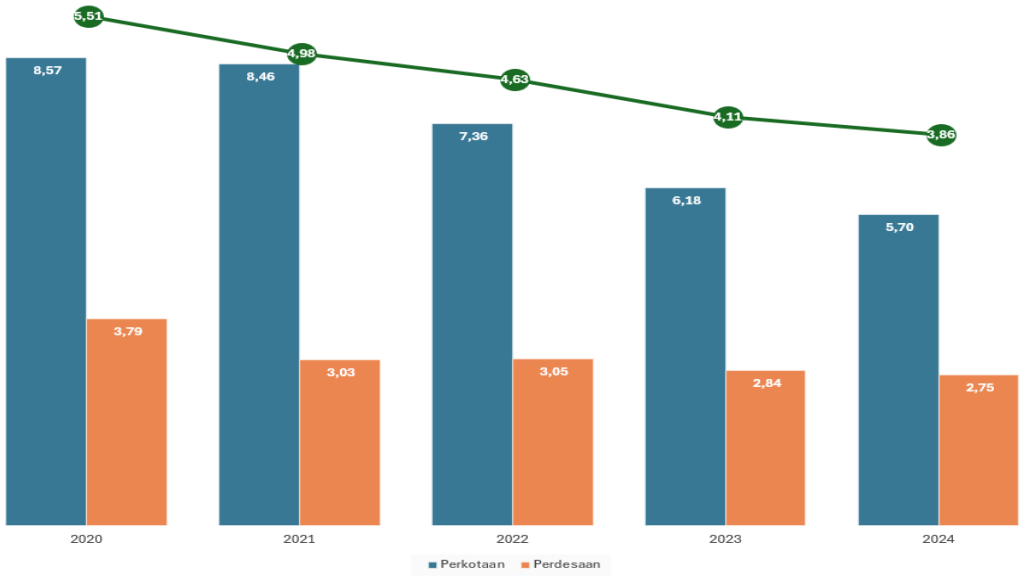
Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,25 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 3,75 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,02 persen. TPT laki-laki dan perempuan turun dibandingkan Agustus 2023, masing-masing sebesar 0,21 persen poin dan 0,32 persen poin.

2. Pengangguran Menurut Daerah Tempat Tinggal

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (5,70 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (2,75 persen). Dibandingkan Agustus 2023, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,48 persen poin dan 0,09 persen poin.

Perkotaan masih merupakan daerah dengan jumlah pengangguran yang banyak dibanding daerah perdesaan. Hal ini dikarenakan konsentrasi kegiatan ekonomi masih menumpuk di Ibu Kota Provinsi atau Ibu Kota Kabupaten. Dari Grafik 8 diatas terbaca tingkat pengangguran perkotaan berada diatas tingkat pengangguran provinsi, kondisi menjadi kebalikan pengangguran daerah perdesaan yang berada di bawah tingkat pengangguran provinsi.

Grafik II-7 : Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Daerah Tempat Tinggal Agustus 2020 – Agustus 2024



Sumber: BPS - BRS No.66/11/16 Th.XXVI, 5 November 2024

Sesuai grafik 8 diatas, tingkat pengangguran di perkotaan cenderung turun tiap tahunnya begitupun diperdesaan. Tahun 2020 tercatattt pengangguran perkotaan tercatat sebesar 8,57 persen mengalami penurunan 0,09 persen pada tahun 2021 (8,46 persen)

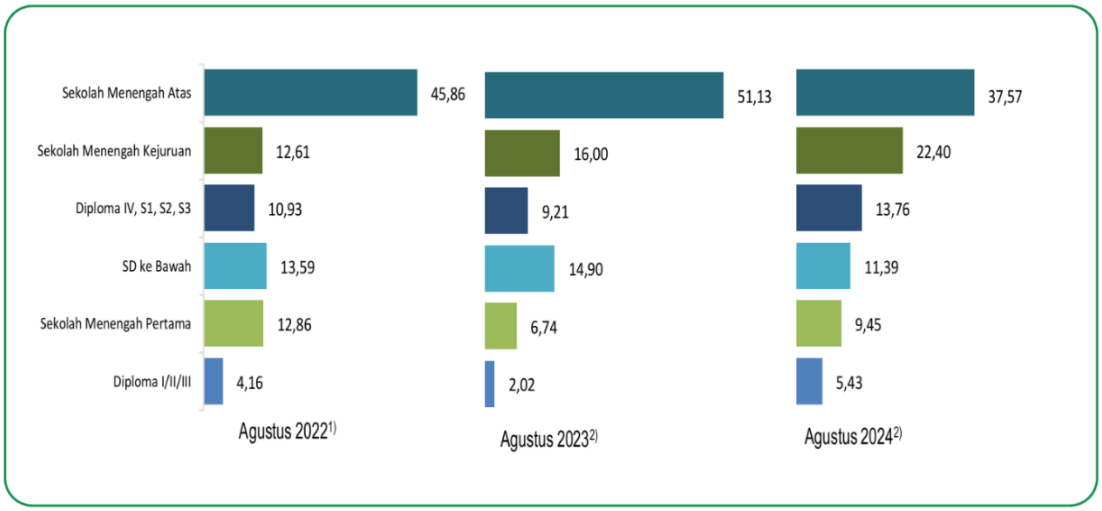
Tingkat pengangguran terbuka menurut daerah tempat tinggal mengalami penurunan di 4 tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024.Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pengangguran terbuka tertinggi diperkotaan terjadi pada tahun 2020 sebanyak 8,57 persen sedangkan angka pengangguran terbuka di kota terendah terjadi pada tahun 2024 sebanyak 5,70 persen. Disisi lain angka pengangguran terbuka di desa terjadi pada tahun 2020 sebanyak 3,79 persen dan angka pengangguran terbuka di perdesaan terjadi pada tahun 2024 sebanyak 2,75 persen.

3. Pengangguran Menurut Pendidikan

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT menurut pendididikan tertinggi yang ditamatkan juga mempunyai pola yang

hampir sama dari Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, kecuali tahun 2022. TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan pada Agustus 2024 yaitu sebesar 10,53 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 1,17 persen.

Grafik II-8. : Persentase Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2022 – Agustus 2024



Sumber : BPS - BRS No.66/11/16 Th.XXVI, 5 November 2024

Selama tiga tahun terakhir, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas. Pada Agustus 2024, persentase pengangguran tamatan Sekolah Menengah Atas sebesar 37,57 persen. Sementara itu, pengangguran tamatan Diploma I/II/III merupakan pengangguran dengan persentase terendah yaitu sebesar 5,43 persen

Pada Grafik II.9 tingkat pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh tamatan SMK pada tahun 2020 tercatat sebesar 13,52 persen. Selama lima tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 angka pengangguran mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Angka pengangguran tamatan SMK terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 7,81 persen terjadi kontraksi sebesar 0,17 persen menjadi 7,98 persen pada tahun 2023. Penurunan sebesar 4,49 persen dari angka pengangguran tahun 2021 (12,3 persen) tahun 2022 tercatat sebesar 7,81 persen.

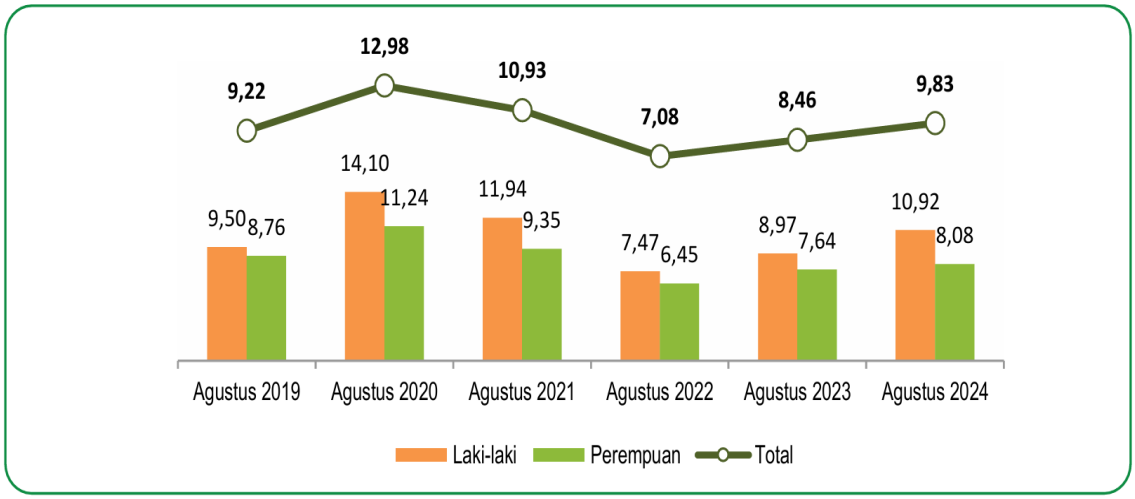
Dibandingkan Agustus 2023, penurunan TPT terjadi hanya pada tingkat pendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Atas. Penurunan terbesar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 2,72 persen poin. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami kenaikan TPT. Kenaikan terbesar pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III yaitu sebesar 6,30

4. Setengah Penganggur Menurut Jenis Kelamin

Setengah pengangguran adalah mereka yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat setengah pengangguran pada Agustus 2024 adalah sebesar 9,83 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar 9 - 10 orang yang termasuk setengah pengangguran. Dibandingkan Agustus 2023, tingkat setengah pengangguran mengalami peningkatan sebesar 1,37 persen poin.

Pada Agustus 2024, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 10,92 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 8,08 persen. Dibandingkan Agustus 2023, baik tingkat setengah pengangguran laki-laki maupun perempuan mengalami Gambar 5 Tren Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin (Persen) Provinsi Sumatera Selatan, Agustus 2019 – Agustus 2024 peningkatan masing-masing sebesar 1,95 persen poin dan 0,44 persen poin.

Grafik II-9 : Tren Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2019 – Agustus 2023



Sumber : BPS - BRS No.66/11/16 Th.XXVI, 5 November 2024

5. Tingkat Pengangguran Kabupaten / Kota

Pengangguran yang tersebar di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh faktor demografi dan wilayah. Pertumbuhan ekonomi dan fertilitas mempunyai pengaruh terhadap permintaan tenaga kerja dan jumlah kesempatan kerja. Jumlah penduduk dan urbanisasi dari perdesaan ke perkotaan mengakibatkan menumpuknya pencari kerja yang belum mendapat kesempatan kerja, hal ini juga akan memicu permasalahan lainnya. Tingkat pendidikan dan keterampilan pencari kerja juga mempengaruhi jumlah pengangguran baik diperdesaan maupun perkotaan.

Selain itu, jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, kurangnya penguasaan teknologi khususnya teknologi digital oleh masyarakat terhadap penyerapan tenaga kerja didaerah, juga disebabkan masih minimnya pemanfaatan teknologi digital di Indonesia. Meskipun di beberapa kota besar penggunaan teknologi digital sudah merambah hingga sektor transportasi, namun kebutuhan sektor ini terhadap tenaga kerja masih relatif kecil. Pengetahuan teknologi yang dimiliki oleh sebagian orang tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang luas. Hal ini akan berbeda bila penerapan teknologi tersebar luas dilini kehidupan masyarakat, secara langsung teknologi akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja dan jumlah pengangguran.

Tabel II-6. : Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, Agustus 2020 - 2024

No.	Kabupaten / Kota	Tingkat Pengangguran (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ogan Komering Ulu	6,01	4,7	4,39	4,14	4,05
2	Ogan Komering Ilir	3,29	3,01	3,75	3,23	3,38
3	Muara Enim	4,90	5,03	4,12	3,92	4,09
4	Lahat	4,18	3,6	4,02	3,41	3,11
5	Musi Rawas	3,28	2,78	1,92	1,95	1,94
6	Musi Banyuasin	4,79	3,99	4,4	2,58	2,13
7	Banyu Asin	4,73	3,84	3,39	3,35	3,24
8	Ogan Komering Ulu Selatan	3,28	3,23	1,83	1,81	1,8
9	Ogan Komering Ulu Timur	3,81	3,18	4,79	3,96	3,45
10	Ogan Ilir	4,91	3,07	2,15	2,1	2,65
11	Empat Lawang	3,61	2,41	3,59	3,09	2,84
12	Penukal Abab Lematang Ilir	3,74	3,61	4,31	3,99	3,72
13	Musi Rawas Utara	6,88	6,72	5,29	5,11	4,91
14	Kota Palembang	9,86	10,11	8,2	7,49	6,98
15	Kota Prabumulih	6,64	5,86	5,25	5,05	4,94
16	Kota Pagar Alam	2,5	1,64	3,62	2,71	2,34
17	Kota Lubuklinggau	7,41	6,27	5,94	5,64	5,29
	Sumatera Selatan	5,51	4,96	4,63	4,11	3,86

Sumber : Data diolah, BPS BRS No.66/11/16 Th.XXVI, 5 November 2024

Seiring perbaikan pertumbuhan ekonomi, persentase pengangguran Agustus 2021 sebesar 4,98 persen atau 219.200 orang mengalami kontraksi positif sebesar 0,56 point (19.159 orang) dibanding Agustus 2020 (5,51%). Hal ini memberikan sinyal positif untuk penurunan angka pengangguran di Sumatera Selatan, Agustus 2023 persentase pengangguran 4,11 persen atau 188.510 orang turun sebesar 0,52 point 19.750 orang dibanding tahun 2022 yang sebesar 4,63 persen (208.260 orang).

Angka pegangguran di Sumatera Selatan rata-rata dibawah 5 persen periode 2021 – 2024, tetapi pada tahun 2020 angka pengangguran menyentuh 5,51 persen atau 235.359 orang meningkat 1,03 persen (52.459 orang) dibanding Agustus 2019 sebesar 4,48 persen atau 185.900 pengangguran. Hal ini dikarenakan merebaknya wabah Covid 19 pada tahun tersebut yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Pada Agustus 2024 pengangguran di Sumatera Selatan 3,86 persen atau 179.710 orang mengalami penurunan sebesar 0,25 persen/8800 orang bila dibandingkan pengangguran Agustus 2023 sebesar 4,11 persen/188.510 orang.

Palembang sebagai Ibu Kota Provinsi dan merupakan pusat pemerintahan, ekonomi dan bisnis di Sumatera Selatan dengan kepadatan penduduk 4.569/km2 menjadi kota tujuan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan (urbanisasi). Pencari kerja yang ada tidak seimbang dengan ketersediaan lowongan, yang tidak terserap berakhir menjadi pengangguran dan atau setengah pengangguran. Pengangguran di Kota Palembang tercatat selama 5 tahun (2020-2024) diatas rata-rata TPT Sumatera Selatan. Pengangguran tertinggi Kota Palembang tercatat pada tahun 2021 – 10,11 persen dan terendah pada tahun 2024 sebesar 6,98 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka terendah di Kabupaten Pagar Alam pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka-nya tercatat pada angka 2,5 persen, dan 1,64 persen pada tahun 2021. Kabupaten OKU Selatan tingkat pengangguran terbuka-nya berada pada posisi paling rendah, tahun 2022 sebesar 1,83 persen dan 1,81 persen pada tahun 2023 dan 1,80 ditahun 2024.

6. Kesempatan Kerja di Kabupaten / Kota

Kesempatan kerja dapat dilihat dari banyaknya jumlah orang yang diterima bekerja dan tersedianya lapangan pekerjaan, terbukanya kesempatan kerja merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan ekonomi. Perluasan kesempatan kerja merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Lapangan kerja yang ada dan siap diisi oleh penduduk usia atau mereka yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan, pengangguran, ataupun mereka yang sewaktu-waktu siap untuk bekerja. Kesempatan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : adanya kesempatan kerja yang tersedia (demand for labor); tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan; usia tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja yang tersedia; Besarnya permintaan total masyarakat; Jumlah investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta; Kebijakan pajak dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan; Ekspor dan impor; dan Kerjasama dengan negara lain, untuk kesempatan kerja di luar negeri.

Tingat Penyerapan Angkatan Kerja pada Tabel II.7 menunjukan ada 3 (tiga) kabupaten/kota yang memiliki TPAK diatas rata-rata Provinsi. Tahun 2019 OKU Selatan tercatat sebesar 76,92 persen, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir TPAK tercatat sebesar 77,70 persen pada tahun 2020, TPAK sebesar 76,17 persen pada tahun 2021 terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, untuk tahun 2022 penyerapan tertinggi ada di Kabupaten Ogan Ilir sebesar 81,10 persen dan 19,39 persen penyerapan terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Tabel II-7. : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Selatan, Agustus 2020 - 2024

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ogan Komering Ulu	70.50	69.96	69.90	72.67	71,29
2	Ogan Komering Ilir	62.25	69.68	68.79	69.34	69,79
3	Muara Enim	68.46	69.57	72.53	72.99	72,57
4	Lahat	71.79	69.54	70.73	74.79	72,96
5	Musi Rawas	71.80	70.53	69.06	68.36	74,65
6	Musi Banyuasin	70.61	69.18	71.12	72.63	69,85
7	Banyu Asin	64.10	65.54	64.32	62.68	65,41
8	Ogan Komering Ulu Selatan	71.47	76.17	72.99	75.56	79,93
9	Ogan Komering Ulu Timur	71.70	71.31	67.93	76.53	77,12
10	Ogan Ilir	70.02	68.48	81.10	73.38	78,00
11	Empat Lawang	75.89	72.30	71.17	72.41	77,98
12	Penukal Abab Lematang Ilir	77.70	73.13	79.82	79.39	79,02
13	Musi Rawas Utara	71.87	69.69	73.06	70.12	70,20
14	Palembang	65.41	63.93	64.48	67.51	62,54
15	Prabumulih	69.40	69.41	71.70	68.60	70,50
16	Pagar Alam	66.35	74.20	73.10	73.90	78,14
17	Lubuklinggau	70.25	73.60	67.93	70.88	71,24
	Sumatera Selatan	**68.65**	**68.77**	**69.31**	**70.72**	**70,82**

Sumber : Data diolah, BPS BRS No.66/11/16 Th.XXVI, 5 November 2024

Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar cenderung terjadi di daerah kabupaten hasil pemekaran, seperti Ogan Komering Ulu Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir dan Ogan Ilir. Sebagai kabupaten baru dan pusat pertumbuhan ekonomi baru memerlukan jumlah tenaga kerja yang besar, hal ini berdampak pada kesempatan yang dimiliki oleh penduduk local/setempat.

Beberapa kabupaten / kota angka penyerapan tenaga kerja berada dibawah rata-rata provinsi, yaitu Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin. Rendahnya penyerapan tenaga kerja dikarenakan ketersediaan kesempatan kerja tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja yang setiap tahun terus bertambah. Khusus untuk Kota Palembang penambahan pencari kerja sebagian dikarenakan faktor urbanisasi.

Penyerapan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 62,25 persen di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang pada tahun 2021 angka penyerapan partisipasi angkatan kerja sebesar 63,93 persen dan pada tahun 2022 penyerapan angkatan kerja sebesar 64,32 persen serta tahun 2023 sebesar 62,68 persen terjadi di Kabupaten Banyuasin. Kota Palembnag pada tahun 2024 penyerapannya berada pada 62,54%

Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan secara konstan walaupun tidak besar, di tahun 2020 TPAK provinsi sebesar 68,65 persen. Juga terjadi peningkatan sebesar 0,12 point di tahun 2021 (68,77 persen) hal ini terus berlanjut di tahun 2022 dengan angka penyerapan sebesar 69,31 persen meningkat 0,54 point dari tahun 2021. Tahun 2023 angka Tingkat Penyerapan Angkatan Kerja tercatat sebesar 70,72 persen, meningkat 1,41 point dari TPAK tahun 2022. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditahun 2024 menjadi salah satu kabupaten yang angka penyerapannya tinggi yaitu 79,02% dan Kabupaten OKU Selatan dengan penyerapan 79,93%.

Bagian III

Ketenagakerjaan Khusus

Data Ketenagakerjaan Khusus adalah data ketenagakerjaan yang memiliki ciri sektoral dan bersifat mikro, dihasilkan dari proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi terkait. Data ini meliputi data terkait daya saing tenaga kerja, pemberdayaan tenaga kerja, harmoni kerja, dan rambu kerja, serta bersumber dari produsen data ketenagakerjaan baik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan maupun sumber lainnya.

Data ini biasanya lebih spesifik dan mendalam, seperti : data lembaga pelatihan dan keterampilan, kualitas dan produktivitas tenaga kerja, seperti pelatihan dan pengembangan, data lembaga hubungan industrial, hubungan antara pekerja dan pengusaha, termasuk masalah serikat pekerja, perundingan kolektif, dan penyelesaian sengketa, Peraturan dan standar yang berlaku di dunia kerja, seperti upah minimum, jam kerja, dan kondisi kerja yang aman. Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditempat kerja.

Hasil dari semua pelaksanaan kegiatan bidang ketenagakerjaan diukur melalui pengukuran Indek Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK), untuk tolak ukurnya keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan disuatu daerah diukur melalui Indikator Ketenagakerjaan Umum dan Indikator Khusus, yaitu: Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kerja, dan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan.

Pembangunan / pembinaan bidang ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan dibagi dalam dua katagori, yaitu:

- Sumber Daya Manusia, dititik beratkan pada pembekalan keterampilan, peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja.
- Pembinaan Hubungan Industrial dan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan dan Keselamtan dan Kesehatan Kerja (K3), kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan pada perusahaan dan pekerja dalam melaksanakan kegiatan produksi sesuai ketentuan dan peraturan ketenagakerjaan (regulasi).

Hasil kinerja bidang ketenagakerjaan tahun 2024 dalam bentuk data yang disusun mampu memberi gambaran sampai dimana kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota melaksanakan program kegiatan dan anggaran selama satu tahun. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan kerja kolektif, sinkronisasi program kegiatan antara provinsi dan kabupaten / kota menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil kinerja bidang ketenagakerjaan tahun 2024

A. BIDANG PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.

Data pelatihan vokasi dan produktivitas merujuk pada informasi terkait program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja individu maupun perusahaan. Data ini mencakup berbagai aspek, termasuk jenis pelatihan, jumlah peserta, materi pelatihan, metode pelaksanaan (offline, online, atau blended), serta hasil dan dampak dari pelatihan tersebut terhadap produktivitas.

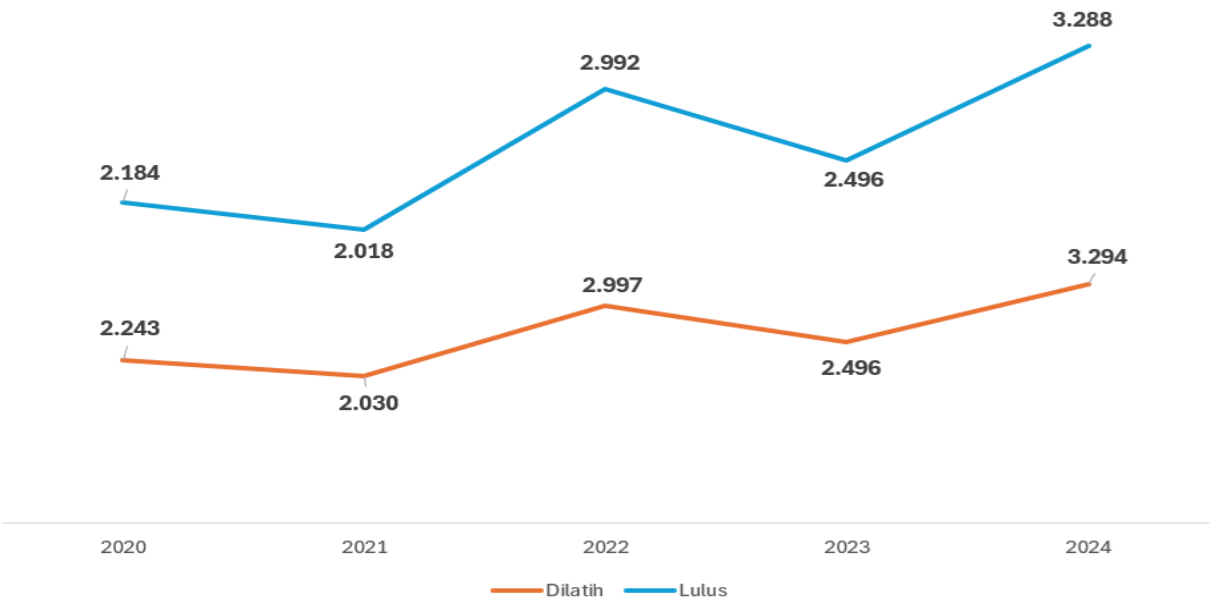
1. Pelatihan Berbasis Kompetensi

   Tahun 2024 merupakan data pelatihan dan kondisi BLK/LLK yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Data yang berisi : luas balai pelatihan, jumlah instruktur, kapasitas pelatihan, jumlah pelatihan yang dilaksanakan, kondisi sssarana dan prasssarana, uji kompetensi bagi lulusan pelatihan, lulusan pelatihan yang dapat ditempatkan, kejuruan apa yang paling diminati.

   Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tiap tahunnya mengalami fluktuasi jumlah peserta pelatihannya. Sebagian besar pelaksanaan Pelatihan Berbasis

Kompetensi masih dibiayai Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan, Anggaran Belanja Daerah dan kerjasama dengan Pihak Ketiga (BUMN, Dinas Vertikal dan Perusahaan Swasta).
Data jumlah peserta Pelatihan berbasis Komeptensi selama 5 tahun terakhir dapat dibaca pada Grafik A1. dibawah.

Grafik III-A.1 : Peserta Pelatihan Berbasis Komptensi Tahun 2020 - 2024



Sumber : Data diolah Bidang Lattas - Disnakertrans Prov. Sumsel 2024

Peserta yang dilatih tahun 2020 sebanyak 2.243 dengan tingkat kelulusan 97,37% / 2.184 orang. Tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 9,50% (213 peserta) dibanding tahun 2020 dengan jumlah pelatihan 2.030 orang dan yang berhasil lulus sebanyak 2.018 / 99,41%. Untuk tahun 2022 terjadi kenaikan jumlah peserta pelatihan sebesar 967 orang menjadi 2.997 peserta dibanding 2030 peserta pelatihan di tahun 2022, namun hal ini tidak berlanjut ditahun 2023 yang hanya melatih sebanyak 2.496 orang atau mengalami penurunan sebesar 16,72% dengan jumlah kelulusan 100%. Trend kenaikan terjadi di tahun 2024 ,13 Balai Latihan Kerja yang ada berhasil meluluskan peserta Pelatihan berbasis Kompetensi sebanyak 3.288 / 99,82% dari jumlah peserta 3.294 orang.

Kelulusan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dari peserta 2.496 orang yang mengikuti pelatihan, dinyatakan lulus 100%, tahun 2022 dari 2.997 peserta yang mengikuti pelatihan dinyatakan lulus sebanyak 2.992 orang atau 99,83%, dan pada tahun 2021 nilai kelulusan peserta ada pada 99,41% dari 2.030 peserta pelatihan. Di tahun 2019 peserta yang mengikuti pelatihan tercatat sebanyak 6.433 orang dan yang dinyatakan lulus sesuai persyaratan Pelatihan Berbasis Kompetensi hanya 99,11% dari 6.379 orang peserta pelatihan. Kelulusan terendah terjadi pada tahun 2020 dari 2.243 peserta yang dinyatakan lulus 2.184 orang atau 97,37%.

Balai Latihan Kerja yang dimiliki kabupaten / kota ada 12 BLK yang diakui Kementerian Ketenagakerjaan, 1 Balai Latihan Kerja milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tiap Balai Latihan Kerja memiliki Jurusan Unggulan sesuai ketersediaan ruang kelas, workshop dan instruktur yang kompeten. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi unggulan banyak diminati oleh pencari kerja karena lulusanya mudah mencari kerja di perusahaan ataupun berwirausaha karena jasa keterampilannya diperlukan oleh masyarakat umum.

Tabel III-A.1. : Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020 – 2024

No	Balai Latihan Kerja	Dilatih					Lulus				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prov. Sumsel	392	352	353	192	240	367	349	348	192	240
2	Palembang	64	80	192	288	240	64	80	192	287	240
3	Banyuasin	304	208	384	448	400	304	200	384	448	400
4	Ogan Komering Ulu	112	192	208	336	352	112	192	208	336	352
5	Lahat	320	208	384	384	480	320	208	384	384	480
6	Ogan Komering Ilir	64	208	512	240	176	64	208	512	240	176
7	Lubuk Linggau	480	176	176	80	496	480	176	176	80	492
8	Prabumulih	96	80	96	128	128	93	80	96	128	128
9	Muara Enim	171	320	254	64	274	96	320	254	64	274
10	Musi Rawas	80	80	144	192	240	132	79	144	192	240
11	Musi Banyuasin	140	32	84	48	164	132	32	84	48	162
12	Pagaralam	-	64	160	96	0	-	64	160	96	0
13	Ogan Ilir	20	30	50	128	104	20	30	50	128	104
	SUMSEL	**2.243**	**2.030**	**2.997**	**2.624**	**3.294**	**2.184**	**2.018**	**2.992**	**2.623**	**3.288**

Sumber : Data diolah, Bidang Lattas - Disnakertrans Prov. Sumsel 2024

Pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan tahun 2020 data yang mencatat 2.243 orang / 140 paket pelatihan. Pelaksanan Pelatihan berbasis Komptensi terus berlanjut di tahun 2021, Balai Latihan Kerja milik pemerintah yang ada di 12 Kabupaten/kota dan 1 BLK Provinsi Sumatera Selatan hanya melaksanakan 127 paket pelatihan dengan jumlah peserta 2.030 orang. Peningkatan peserta pelatihan sebanyak 967 orang menjadi 2.997 orang peserta (187 Paket) pada tahun 2022 dengan kelulusan 2.992 orang atau 98,83%. Antusias pencari kerja untuk mendapatkan keterampilan masih tinggi, namun pada tahun 2023 jumlah peserta pelatihan mengalami penurunan kembali, tercatat sebanyak 2.624 peserta pelatihan (164 Paket) dan yang dinyatakan lulus serta mendapat sertifikat ada 2.623 orang. Pelatihan Berbasis Kompetensi di tahun 2024 diikuti oleh 3.294 peserta dan dinyatakan lulus 3.288 orang dan dinyatakan Lulus Uji Kompetensi sebanyak 1.488 orang dari 1.678 peserta yang ikut Ujian Kompetensi.

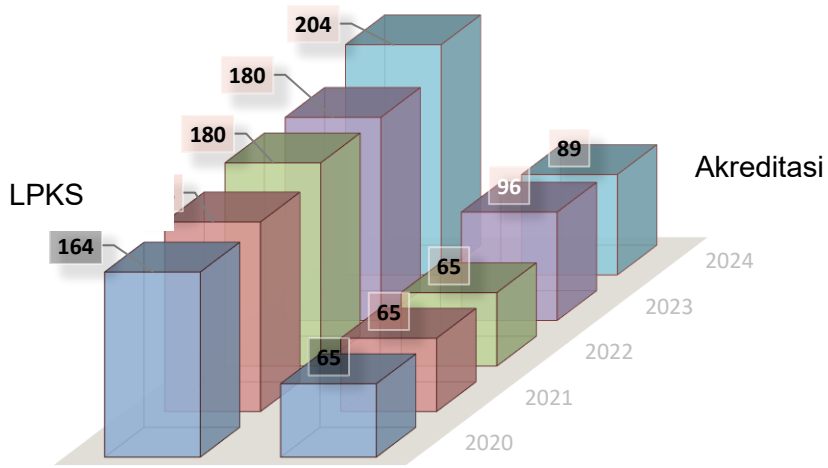
2. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

LPK Swasta berperan aktif dalam menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Hal ini membantu pemerintah mewujudkan visi untuk memiliki tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing global, serta berpartisipasi dalam pengembangan dan pemutakhiran SKKNI. LPK Swasta memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan menyediakan berbagai program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Dengan menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, LPK Swasta membantu meningkatkan "employability" (kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan) bagi pencari kerja. Banyak LPK juga memiliki jaringan dengan perusahaan untuk membantu penempatan kerja lulusannya, sehingga berkontribusi pada penurunan angka pengangguran.

LPK Swasta cenderung lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan industri. Ini memungkinkan mereka untuk segera mengadopsi tren dan teknologi terbaru dalam program pelatihan, membantu pemerintah memastikan bahwa angkatan kerja selalu relevan dengan dinamika pasar.

Grafik III-A.2 : Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Akreditasi Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020 – 2024



Sumber : Data diolah, Bidang Lattas - Disnakertrans Prov. Sumsel 2024

Beberapa LPK Swasta juga fokus pada pengembangan keterampilan kewirausahaan, yang mendukung program pemerintah dalam menciptakan lebih banyak wirausaha mandiri dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya LPK Swasta, pemerintah tidak perlu menanggung seluruh beban pelatihan tenaga kerja secara mandiri, sehingga dapat mengalokasikan sumber daya ke sektor lain yang membutuhkan.

Jumlah LPKS mengalami peningkatan tiap tahunnya, 2020 terdata sebanyak 164 LPKS yg tersebar di 17 kabupaten/Kota, Pasca pandemic Covid 19 LPKS tumbuh menjadi 168 dan terus bertambah menjadi 180 di tahun 2022 dan 2023 selanjutnya 204 lpks pada tahun 2024. Jumlah Instruktur yang terdaftar hingga tahun 2024 sebanyak 743.

Akreditasi bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPK Swasta) merupakan proses penilaian independen untuk memastikan bahwa LPK memberikan layanan pendidikan dan pelatihan berkualitas tinggi sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Ini bukan sekadar formalitas, melainkan esensial untuk menjamin mutu, kredibilitas, dan keberlanjutan operasional. LPK Swasta yang terakreditasi diakui secara nasional sebagai lembaga yang memenuhi standar kualitas. Ini meningkatkan kepercayaan masyarakat, calon peserta pelatihan, dan mitra industri, sehingga menarik lebih banyak peserta dan membuka peluang kerja sama. LPK terakreditasi memiliki peluang lebih besar untuk menjadi mitra pemerintah dalam berbagai program pelatihan, seperti Program Kartu Prakerja. Ini membuka sumber pendapatan baru dan memperluas jangkauan layanan LPK. Akreditasi LPK berlaku selama 5 (lima) tahun sehingaa ketika masa berlaku akreditasi berakhir, LPK mengajukan kembali akreditasi ke LA-LPK (Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja).

Jumlah LPK Swasta yang telah terakreditasi (Grafik III-A.1.2), ditahun 2020 ada 39,63% / 65 LPK Swasta yang ada 164 lpk, ditahun 2021 ada 38,69% / 65 lpk swasta yg terakrteditasi, dan 36,11% lpk swasta di tahun 2022. Terjadi lonjakan pada tahun 2023 jumlah LPK Swasta yang terakreditasi 53,33% (96 lpks) dari 180 lpks yang ada di Sumatera Selatan namun di tahun 2024 banyak masa berlaku akreditasi yang berakhir dan lembaga pelatihan kerja tidak mengajukan akreditasi baru, sehingga lpk swasta yang masih berlaku akreditasinya sebanyak 89 lpks dari 204 lpk yang terdaftar.

3. Magang (Kerja) Dalam Negeri

Kegiatan Pemagangan yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda memasuki dunia kerja secara lebih siap. Program ini menyinergikan pendidikan dengan dunia industri, sehingga peserta magang dapat langsung mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik kerja nyata.

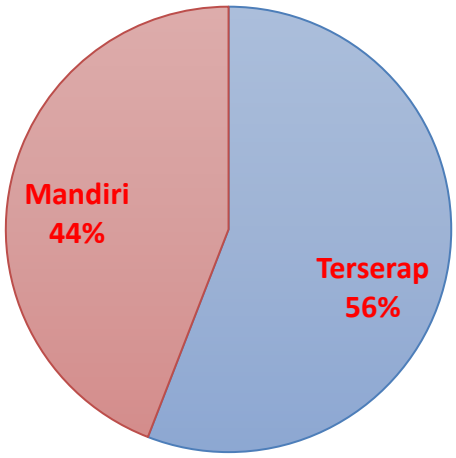
Di Indonesia, penyelenggaraan magang diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Beberapa poin penting dari regulasi ini adalah:

- Perjanjian Pemagangan: Harus ada perjanjian tertulis antara peserta magang dan penyelenggara magang yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak.

- Hak Peserta Magang: Peserta magang berhak mendapatkan bimbingan dari instruktur/mentor, fasilitas pelatihan, uang saku, dan sertifikat magang setelah menyelesaikan program.
- Durasi: Durasi magang disesuaikan dengan program, namun idealnya cukup untuk memberikan pengalaman substansial.
- Tidak Dipungut Biaya: Peserta magang tidak boleh dipungut biaya selama mengikuti program magang.
- Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah melalui Kemnaker dan Disnakertrans melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program magang untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Program magang di perusahaan akan membangun koneksi yang kuat antara institusi pendidikan dan perusahaan, sehingga lulusan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja, peserta diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja (SDM). Program magang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah yaitu mengurangi / menurunnya angka pengangguran serta difokuskan pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah, seperti pariwisata, industri kreatif, dan teknologi.

Grafik III-A.3 : Penyerapan Peserta Magang Dalam Negeri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024



Sumber: Data diolah, Bidang Lattas - Disnakertrans Prov. Sumsel 2024

Diagram lingkaran Grafik III-A.3 memberikan gambaran tentang penyerapan peserta magang yang dilaksanakan pada tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan diikuti oleh 195 peserta diselenggrakan di 4 kabupaten/kota pada 20 perusahaan.

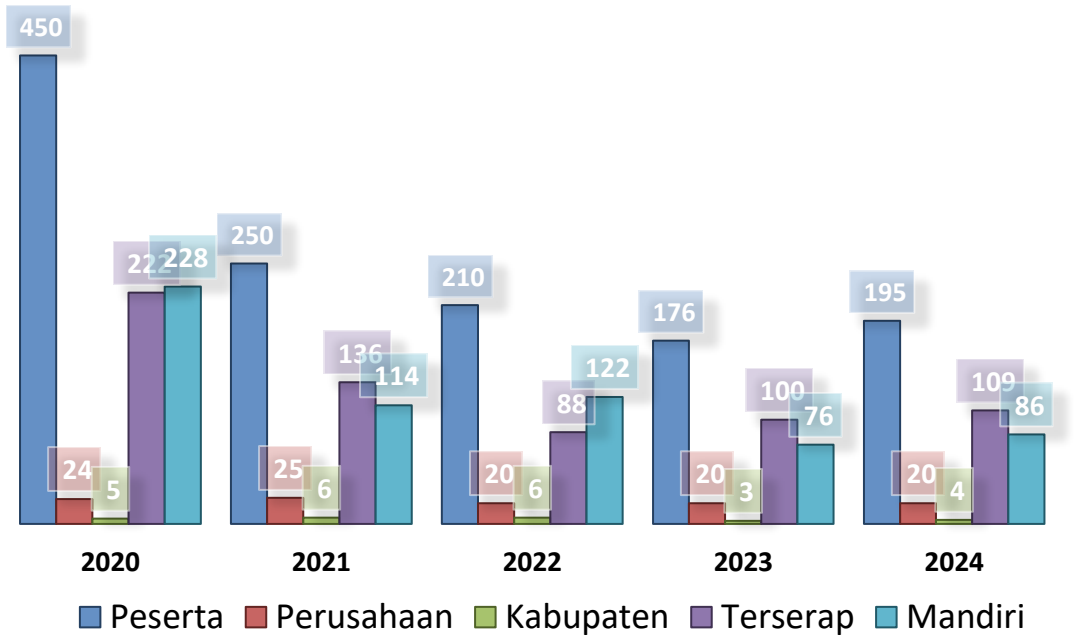
Penyerapan peserta diperusahaan tempat magang cukup tinggi, dari 176 peserta magang, sebanyak 55,90% berhasil terserap di dunia kerja setelah menyelesaikan program magang. Angka ini mengindikasikan bahwa program magang yang

diselenggarakan cukup efektif dalam mempersiapkan peserta untuk memasuki dunia kerja. Meskipun tingkat penyerapan sudah cukup baik, masih ada ruang untuk peningkatan. Sebanyak 44,10% peserta magang belum berhasil mendapatkan pekerjaan setelah program selesai. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas program magang agar seluruh peserta dapat memperoleh manfaat yang optimal.

Pelaksanaan magang di kabupaten belum mencerminkan keterlibatan daerah yang maksimal, hal ini dari 17 kabupaten/kota yang ada baru 23,53% atau 4 daerah yang melaksanakan pemagangan. Keterbatasan tempat magang (perusahaan) juga menjadi kendala tersendiri disamping anggaran yang tersedia. Tahun 2024 sebanyak 7.692 perusahaan terdaftar, baru 0,26% atau 20 perusahaan yang melaksanakan Program Pemagangan Dalam Negeri.

Potensi Pemagangan masih sangat besar untuk lebih ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, mengingat jumlah lulusan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi tiap tahunnya serta jumlah pengangguran yang ada di Ibu Kota Kabupaten dan Kota Palembang sendiri.

Grafik III - A.4 : Pemagangan Dalam Negeri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020–2024



Sumber: Data diolah, Bidang Lattas - Disnakertrans Prov. Sumsel 2024

Grafik III-A.4 di atas memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan program pemagangan dalam negeri di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020 hingga 2024. Data yang disajikan mencakup jumlah peserta, perusahaan mitra, kabupaten yang terlibat, peserta yang terserap di dunia kerja, dan peserta yang memilih untuk berwirausaha mandiri.

Jumlah peserta program mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Terjadi peningkatan pesat pada tahun 2020, namun kemudian menurun drastis pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, atau minat peserta.

Perusahaan mitra relatif stabil, menunjukkan minat yang cukup konsisten dari sektor swasta untuk berpartisipasi dalam program magang dalam negeri ini. Meskipun jumlah kabupaten yang terlibat mengalami sedikit perubahan, program ini cenderung terkonsentrasi di beberapa kabupaten tertentu. Ini bisa disebabkan oleh faktor seperti potensi ekonomi, infrastruktur, atau dukungan pemerintah daerah.

Peserta magang yang berhasil terserap di dunia kerja mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini menjadi perhatian serius karena salah satu tujuan utama program adalah meningkatkan kesempatan kerja bagi peserta. Dan peserta yang memilih untuk berwirausaha mandiri cenderung meningkat, meskipun fluktuatif. Ini menunjukkan bahwa program tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan untuk bekerja di perusahaan, tetapi juga mendorong jiwa kewirausahaan.

Perubahan Struktur Pekerjaan: Peningkatan jumlah tenaga kerja secara keseluruhan dapat mengindikasikan pergeseran dari sektor informal ke sektor formal, atau dari sektor padat karya ke sektor padat modal. Hal ini menuntut adanya penyesuaian program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang baru.

Produktivitas Tenaga Kerja: Jika kenaikan jumlah tenaga kerja diikuti dengan peningkatan produktivitas, maka hal ini dapat dianggap positif. Namun, jika produktivitas menurun, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, seperti kualitas tenaga kerja, teknologi, dan manajemen.

Upah dan Kesejahteraan Pekerja: kenaikan jumlah tenaga kerja dapat mendongkrak upah karena tingkat produktivitas juga ikut naik. Hal ini dapat berdampak positif pada kesejahteraan pekerja dan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

B. BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERJA

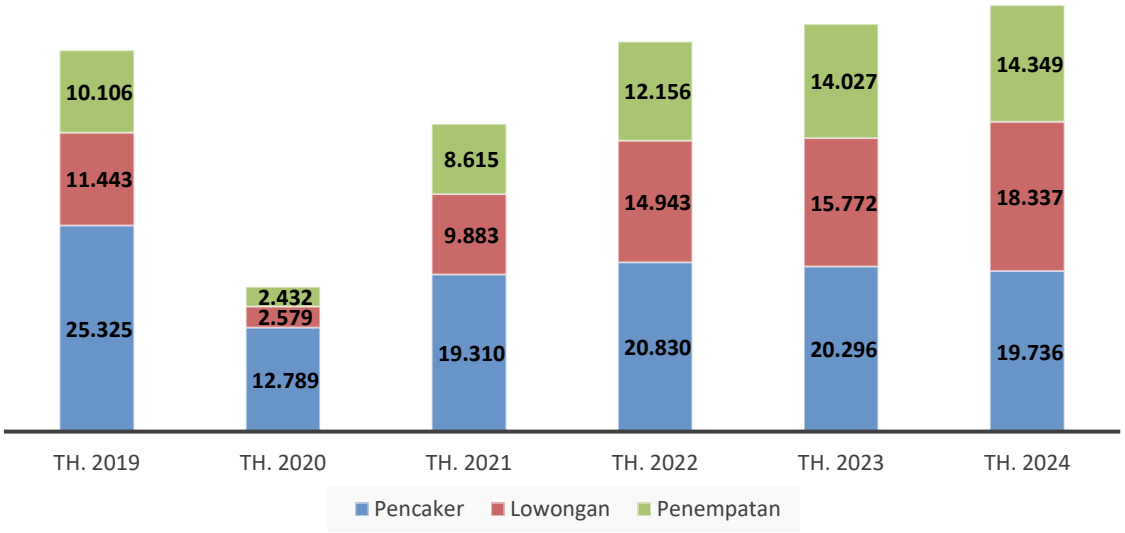
Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 4.659.809 orang, naik 71.639 orang dibanding Agustus 2023. Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 0,10 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 3,86 persen, turun sebesar 0,25 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Penduduk yang bekerja sebanyak 4.480.100 juta orang, meningkat sebanyak 80.441 orang dari Agustus 2023. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (62.026 orang).

1. Pencari Kerja, Lowongan Kerja dan Penempatan Kerja

Pencari Kerja (pencaker) dan pengangguran trendnya mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan penduduk, namun tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang berkualitas / kompeten sesuai tuntutan pasar kerja. Hal ini mengakibatkan lowongan kerja yang tersedia tidak dapat terserap oleh pasar kerja khususnya di Sumatera Selatan.

Data pencari kerja, lowongan kerja dan penyerapan/penempatan tenaga kerja merupakan kompilasi data yang dikumpulkan oleh 17 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, melalui pendataan Kartu Kuning (Ak.1) secara manual, laporan perusahaan dan kinerja Pegawai Pengantar Kerja yang ada. Selain itu pendataan pencari kerja baik dalam negeri ataupun luar negeri dapat dilakukan melalui portal https://karirhub.kemnaker.go.id .

Grafik III-B.1 : Pencari Kerja – Lowongan Kerja – Penempatan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2019 – 2024



Sumber : Data diolah, Bidang Pentakerja - Disnakertrans Prov. Sumsel

Grafik A2.1. menggambarkan lowongan pekerjaan yang tersedia tidak semuanya dapat diserap oleh pencari kerja. Pada tahun 2020 penyerapan tenaga kerja sebesar 94,56% (2.579 orang) dari 2.572 lowongan tersedia, namun pencaker yang terserap hanya sebesar 19,02 persen. Terjadi penurunan di tahun 2021 sebesar 87,17% dari lowongan yang ada begitupun tahun 2022 hanya 81,35%, sebaliknya terjadi kenaikan pada tahun 2023 sebesar 7,59 point menjadi 88,94%. Pada tahun 2024 penerapan pencari kerja sebesar 14.349 orang / 72,07 persen namun untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja hanya terserap 78,25 persen. Tahun 2024 jumlah Pencaker yang ditempatkan sebanyak 14.349 orang, 72,70 persen dari jumlah Pencaker Terdaftar, 78,25 persen dari Lowongan Kerja yang tersedia. Lowongan Kerja yang tidak dapat dipenuhi kualifikasinya oleh pencari kerja sebanyak 21,75% atau 3.988 lowongan kerja yang tidak terisi.

Tabel III - B.1 : Pencari Kerja – Lowongan Kerja – Penempatan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Pencari Kerja			Lowongan Kerja			Penempatan		
	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
Ogan Komering Ulu	665	358	1.023	223	206	429	210	200	410
Ogan Komering Ilir	516	895	1.411	397	757	1.154	319	719	1.038
Muara Enim	1.627	448	2.075	1.018	117	1.135	1.018	171	1.189
Lahat	1.144	302	1.446	802	181	983	802	181	983
Musi Rawas	1.102	268	1.370	216	81	297	216	81	297
Musi Banyuasin	582	747	1.329	793	1.850	2.643	790	1.850	2.640
Banyu Asin	1.788	1.250	3.038	750	1.241	1.991	349	515	864
Ogan Komering Ulu Selatan	422	306	728	248	208	456	202	171	373
Ogan Komering Ulu Timur	378	380	758	534	1.215	1.749	512	1.176	1.688
Ogan Ilir	726	699	1.425	425	735	1.160	306	668	974
Empat Lawang	410	501	911	217	306	523	217	306	523
Penukal Abab Lematang Ilir	234	57	291	57	25	82	57	25	82
Musi Rawas Utara	367	239	606	135	150	285	120	150	270
Kota Palembang	988	695	1.683	1.391	2.012	3.403	522	844	1.366
Kota Prabumulih	630	356	986	452	207	659	452	207	659
Kota Pagar Alam	165	115	280	75	115	190	75	115	190
Kota Lubuklinggau	221	155	376	635	563	1.198	403	400	803
Prov. Sumatera Selatan	11.965	7.771	19.736	8.368	9.969	18.337	6.570	7.779	14.349

Sumber : Data diolah, Bidang Pentakerja - Disnakertrans Prov. Sumsel

a. Pencari Kerja

Pencari Kerja terbanyak pada tahun 2024 terdapat di Kabupaten Banyuasin yaitu 3.038 pencaker disusul Kabupaten Muara Enim 2.027 pencaker dan Kota Palembang dengan jumlah pencaker yang terdaftar sebanyak 1.391 pencari kerja. Tenaga kerja terdaftar paling rendah ada di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yaitu tercatat sebesar 291 pencaker.

Pencari Kerja berjenis kelamin Laki-Laki terbanyak berada dari Kabupaten Banyuasin terdata sejumlah 1.788 orang, Muara Enim 1.627, Lahat 1.144 dan Musi Rawas 1.102 dengan Kota Pagaralam menjadi daerah dengan jumlah pencari kerja laki-laki terendah, 165 orang. Kabupaten Banyuasin dengan jumlah Pencari Kerja Perempuan terbanyak 1.250 orang, Ogan Komering Ilir 895 orang, Musi Banyuasin 747 orang dan Kabupaten Ogan Ilir 699 orang. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan jumlah pencari kerja perempuan sebanyak 57 orang. Kota Palembang pada tahun 2024

b. Lowongan Kerja

Lowongan Kerja yang ada sebanyak 3.403 lowongan, kemudian Kabupaten Musi Banyuasin dengann jumlah lowongan 2.643 lowongan dan Kabupaten Banyuasin ada 1.991 lowongan kerja. Kabupaten dengan Lowongan Kerja terendah ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tercata hanya sebanyak 82 lowongan.

Lowongan Kerja untuk laki-laki tercatat Kota Palembang menempati pertama sebanyak 1.391, Muara Enim 1.018, Lahat 802, dan Musi Banyuasin 793 orang, untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebanyak 57 lowongan untuk laki-laki. Untuk Lowongan Kerja Perempuan di Kota Palembang tersedia 2.012 lowongan, Kabupaten Musi Banyuasin 1.850, Banyuasin 1.241 dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 1.215 lowongan, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan jumlah lowongan kerja perempuan tercatat ada 25 lowongan.

c. Penempatan Tenaga Kerja

Penempatan Tenaga Kerja tahun 2024 tertinggi oleh Kabupaten Musi Banyuasin yaitu 2.640 orang, Ogan Komering Ulu Timur 1.688 orang dan Kota Palembang 1.366 orang ditempatkan. Penempatan Tenaga Kerja terendah ada di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebanyak 82 orang yang ditempatkan. Kabupaten Muara Enim merupakan kabupaten dengan jumlah Penempatan Tenaga Kerja laki-laki terbanyak pada tahun 2024 sebanyak 1.018 orang, disusul Kabupaten Lahat dengan jumlah tenaga kerja laki-laki yang ditempatkan sebanyak 802 orang, dan Musi Banyuasin dengan jumlah 790 tenaga kerja laki-laki. Sedangkan penempatan tenaga kerja laki-laki terendah ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, 57 orang.

Tenaga Kerja perempuan yang mengsisi lowongan tersedia pada tahun 2024 terbanyak ada di Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebanyak 1.850 orang, diurutan kedua tercatat sebanyak 1.176 tenaga kerja wanita di tempatkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan Kota Palembang hanya menempatkan 844 tenaga kerja wanita dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan kabupaten dengan penempatan tenaga kerja perempuan terkecil yaitu 25 orang.

2. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja. PMI bisa laki-laki maupun perempuan. PMI biasanya tidak berniat tinggal secara permanen di negara atau wilayah tempat mereka bekerja. Pekerja migran yang bekerja di luar negara asalnya disebut juga pekerja asing.

Ada banyak alasan mengapa banyak pemuda Indonesia memilih untuk menjadi pekerja migran. Beberapa faktor utama meliputi, Ekonomi: Upah yang lebih tinggi; Peluang mendapatkan gaji yang lebih besar di negara tujuan dibandingkan di Indonesia, terutama untuk pekerjaan tertentu; Kesulitan mencari pekerjaan, Tingkat pengangguran yang tinggi dan terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Faktor sosial yang melatarbelakangi orang bekerja ke luar negeri: Keinginan meningkatkan taraf hidup keluarga; Banyak yang ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka.

Skema G to G (Goverment to Goverment) dalam pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki banyak manfaat bagi Provinsi Sumatera Selatan, terutama dalam hal ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa di antaranya:

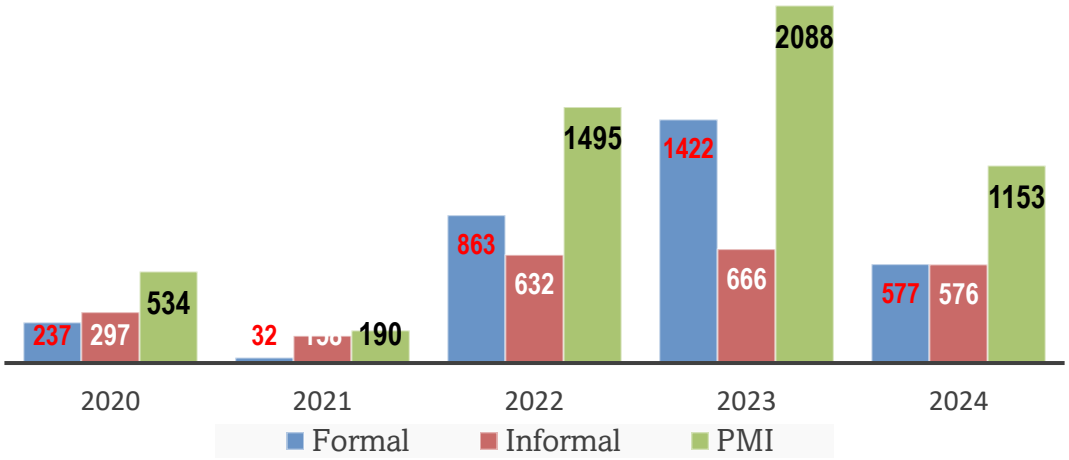
- Remitansi yang dikirim oleh PMI melalui skema G to G dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
- Proses perekrutan, pelatihan, dan pemberangkatan PMI melalui skema G to G dapat menciptakan lapangan kerja baru di daerah.
- Membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Memiliki standar pelatihan yang lebih tinggi dan terstruktur. Hal ini dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja internasional.
- Perlindungan yang Lebih dibandingkan dengan skema penempatan lainnya.

Secara spesifik untuk Provinsi Sumatera Selatan, skema Goverment to Government (G to G) dapat membantu mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mempercepat pembangunan daerah. Selain itu, program ini juga dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mengembangkan program penempatan PMI yang lebih baik dan berkelanjutan.

Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan program G to G sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti kualitas pelatihan, dukungan pemerintah daerah, serta kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dan negara tujuan.

Pada Desember 2023 jumlah PMI yang berasal dari Sumatera Selatan tercatat sebanyak 2.088 orang, meningkat 593 orang dari tahun 2022 (1.495 orang). Peningkatan ini dampak dari kebijakan dibukanya kran G to G dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia pasca Pandemi Covid-19. Peningkatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2022 sebesar 1.305 orang dibanding pengiriman PMI tahun 2021 yang tercatat hanya sebanyak 190 orang. Ada 1.736 pekerja migran yang ditempatkan pada tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 16,9% atau sebanyak 353 orang.

Grafik III – B.2 : Pekerja Migran Indonesia (Informal dan Formal) Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020 - 2024



Sumber : data diolah Bidang Pentakerja - Disnakertrans Prov. Sumsel 2024

Dari Grafik III-B.2, angka pengiriman PMI di tahun 2020 tercatat sebesar 534 orang dan tahun 2021 jumlah PMI yang ditempatkan tercatat hanya 190 orang. Pada tahun 2024 penempatan PMI sebanyak 1.153 orang terjadi penurunan yang sebanyak 935 pekerja migran Indonesia dibanding tahun 2023 (2.088 orang). Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat bekerja di sektor formal. Sektor formal yang biasanya menjadi tempat kerja PMI meliputi: Manufaktur, Konstruksi, Perikanan, Hospitality, Pertambangan, Transportasi, Kesehatan. PMI asal Suamatera Selatan yang bekerja di sektor formal terus meningkat seiring tingkat poduktivitas industri di luar negeri meningkat Pasca Covid 19, hal ini bias dilihat dari Grafik III- B2 diatas.

Tahun 2022 Pekerja Migran yang ditempatkan disektor formal tercatat sebanyak 863 orang, meningkat 831 atau 2.597% dan terus mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 1.422 pekerja migran meningkat 65%. Peningkatan ini merupakan kabar yang baik, mengindikasikan calon pekerja migran memahami perbedaan pekerja disektor informal dan formal. Terjadi penurunan yang sangat tajam Penempatan Migran sektor formal di tahun 2024 yaitu 577 pekerja migran atau menurun 845 orang dibanding tahun 2023.

Bila dilihat data yang terdapat pada Tabel III - B2. Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 telah mengirim PMI sebanyak 1.736 orang, bekerja di sektor informal sebanyak 1.006 dan disektorl formal sebanyak 730 orang. Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan daerah pengirim Pekerja Migran terbesar di Sumatera Selatan, pada tahun 2024 tercatat ada 372 orang yang menjadi PMI, disusul Kota Palembang dengan 294 orang pekerja migran, kemudian Ogan Ilir dengan 211 orang dan Kabupaten Lahat 168 orang pekerja migran.

Tabel III-B.2 : Pekerja Migran Indonesia, Sektor Formal dan Informal Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2024

No	Daerah Asal	PMI		
		Formal	Informal	Jumlah
1	Ogan Komering Ulu	50	47	97
2	Ogan Komering Ilir	248	124	372
3	Muara Enim	56	-	56
4	Lahat	75	93	168
5	Musi Rawas	-	67	67
6	Musi BanyuAsin	36	29	65
7	Banyu Asin	71	35	106
8	Ogan Komering Ulu Selatan	20	31	51
9	Ogan Komering Ulu Timur	94	-	94
10	Ogan Ilir	181	30	211
11	Empat Lawang	-	40	40
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1	-	1
13	Musi Rawas Utara	1	11	12
14	Kota Palembang	126	168	294
15	Kota Prabumulih	23	-	23
16	Kota Pagar Alam	22	45	67
17	Kota Lubuk Linggau	2	10	12
Total		1.006	730	1.736

Sumber: Data diolah, Bidang Pentakerja - Disnakertrans Prov Sumsel 2024

Pekerja Migran Indonesia Formal terbanyak dikirim dari Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, tercatat ada 248 orang yang menjadi PMI di tahun 2024, Kabupaten Ogan Ilir mengirim 181 orang untuk bekerja di luar negeri melalui jalur PMI Formal dan warga Kota Palembang yang menjadi PMI Formal tercatat sebanyak 126 orang. PMI formal adalah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada sektor yang terstruktur dan diatur, seperti manufaktur, konstruksi, transportasi, atau kesehatan, melalui skema penempatan resmi seperti agensi dan G to G.

Beberapa kelebihan pekerja migran sektor formal di antaranya: Gaji lebih tinggi, Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, Peluang pengembangan diri. Namun disamping itu calon pekerja migran dituntut untuk memiliki keterampilan dan penguasaan bahasa asing sesuai negara penempatan. Selain itu pekerja formal memiliki perlindunga hukum yang lebih pasti dari perusahaan dan negara tujuan.

Pekerja Migran sektor informal, merupakan hubungan yang lebih personal antara majikan dan pekerja. Sehingga rentan kehilangan pekerjaan karena konflik/ masalah yang terjadi di kedua belah pihak.

Kota Palembang tahun 2024 mencatat sebanyak 168 orang yang bekerja di sektor informal sebagai pekerja migran, sedangakan Kabupaten Ogan Komering Ilir tercatat sebanyak 124 orang dan 93 pekerja migran berasal dari Kabupaten Lahat.

Penduduk Sumatera Selatan yang menjadi Pekerja Migran Indonesia sebagian besar karena faktor ekonomi, pendidikan dan terbatasnya lowongan kerja. Daerah yang penduduknya banyak menjadi pekerja Migran Indonesia antara lain, Kota Palembang, Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir, ketiga wilayah tersebut tiap tahunnya mengirimkan PMI untuk bekerja ke Malaysia, dan Jepang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) perwakilan Sumatera Selatan gencar melakukan Sosialisasi dan Bimbingan kepada Calon Pekerja Migran dalam menentukan pilihan pekerjaan apa yang menjanjikan di Negara tujuan.

3. Tenaga Kerja Asing.

Tenaga kerja asing (TKA) adalah warga negara asing yang memiliki visa untuk bekerja di Indonesia. Untuk mempekerjakan TKA, pemberi kerja harus memiliki izin tertulis dari instansi berwenang di bidang ketenagakerjaan. Selain dampak positif yang didapat, perlu juga diwaspadai dampak negative atas kehadiran Tenaga Kerja Asing, antara lain : meningkatkan persaingan dalam pasar kerja, terutama untuk posisi-posisi yang membutuhkan keahlian khusus, kesenjangan pendapatan karena TKA seringkali dibayar lebih tinggi dibandingkan pekerja lokal dengan pekerjaan yang serupa, dan adanya perbedaan budaya dan gaya hidup antara TKA dan masyarakat lokal sehingga dapat menimbulkan masalah sosial, seperti konflik, diskriminasi, dan kriminalitas. Dampak positif yang bisa dirasakan antara lain :

Transfer teknologi, TKA seringkali membawa teknologi baru dan pengetahuan yang lebih maju, terutama dalam sektor industri seperti pertambangan, minyak dan gas, serta konstruksi. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk dalam negeri.

Pengembangan Sumber Daya Manusia: Interaksi dengan TKA dapat memberikan kesempatan bagi pekerja lokal untuk belajar keterampilan baru, meningkatkan kompetensi, dan memperluas jaringan profesional.

Investasi: Masuknya TKA seringkali diikuti dengan investasi asing langsung yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Fluktuasi jumlah TKA di Sumatera Selatan mencerminkan dinamika ekonomi global dan kondisi domestik. Kebijakan pemerintah, kebutuhan industri, dan ketersediaan tenaga kerja lokal merupakan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi jumlah TKA.

Tabel III-B.3 : Tenaga Kerja Asing, Perusahaan, Asal Negara dan Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020 - 2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Tenaga Kerja	721	1535	1304	1406	1435
Perusahaan	105	103	105	97	101
Asal Negara	18	19	17	17	17
Wilayah Kerja	14	14	14	14	14
Retribusi/Remitens	1.499.354.000	874.990.700	-	865.622.500	933.933.600

Sumber: Data diolah, Bidang Pentakerja - Disnakertrans Prov Sumsel 2024

Sumatera Selatan pada tahun 2024 Tenaga Kerja Asing yang bekerja tercatat ada 1.435 orang yang bekerja di 101 perusahaan. Pekerja Asing berkewarganegaraan Republik Rakyat China tercatatt sebanyak 1.106 orang atau 77,07% dari keseluruhan jumlah tenaga kerja asing yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Tranmsigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Pendapatan dari Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing sesuai Peraturan Daerah Nomor 60 tahun 2023), sebesar Rp.933.933.600 sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan dari Sektor Tenaga Kerja (Asing).

Menurunya Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA dikarenakan beberapa kabupaten/Kota telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sehingga retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA masuk ke Kas Daerah kabupaten/kota maisng-masing.

Tabel III - B.4. dibawah menyajikan data jumlah Tenaga Kerja Asing per kabupaten / kota beserta perusahaan yang mempekerjakan, pekerja asing terbanyak berada di kabupaten Muara Enim, yaitu 878 orang yang bekerja di 21 perusahaan. Pekerja asing di Muara Enim sebagian besar bekerja di proyek pembangkit listrik dan konstruksi, lain halnya dengan kabupaten Ogan Komering Ilir dari 165 pekerja berkewarganegaraan asing sebagian besar bekerja sebagai tenaga ahli di bidang Aneka Industri khususnya industri kertas dan Kabupaten Ogan Komering Ulu jumlah tenaga kerja asing terdaftar sebanyak 163 orang. Untuk Kota Palembang 81 pekerja asing yang ada bekerja di bidang industri pengolahan dan perhotelan pada 13 perusahaan yang berbeda.

Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing terbanyak konstruksi pembangkit listrik sebanyak 830 orang, seiring pembangunan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 di Kabupaten Muara Enim oleh investor dari Republik Rakyat China. Di Kabupaten Musi Banyuasin saat ini sedang dibangun PLTU Sumsel 5. Untuk industri pengolahan/aneka industri ada 223 orang yang bekerja tersebar di Kota Palembang, Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, OKU Timur dan Musi Banyuasin dan sebanyak 153 TKA bekerja di bidang konstruksi. Menurut jabatan yang diduduki tenaga kerja asing antara lain,

Pimpinan atau setingkat Manager sebanyak 249 orang, sebagai tenaga Professional sebanyak 215 orang tenaga kerja asing, untuk setingkat Supervisor ada 187 orang, untuk posisi Teknisi/Operator terdaftar sebanyak 742 orang dan sisanya pada posisi lain-lain sebanyak 41 orang.

Tabel III - B.4 : Tenaga Kerja Asing dan Perusahaan Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja	Perusahaan
1	Ogan Komering Ulu	163	9
2	Ogan Komering Ilir	165	5
3	Muara Enim	878	21
4	Lahat	2	2
5	Musi Rawas	26	9
6	Musi Banyuasin	29	7
7	Banyu Asin	67	17
8	Ogan Komering Ulu Selatan	2	2
9	Ogan Komering Ulu Timur	1	1
10	Ogan Ilir	13	5
11	Empat Lawang	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	2	2
13	Musi Rawas Utara	5	2
14	Kota Palembang	81	18
15	Kota Prabumulih	1	1
16	Kota Pagar Alam	-	-
17	Kota Lubuklinggau	-	-
	Prov. Sumatera Selatan	1 435	101

Sumber: Data diolah, Bidang Pentakerja - Disnakertrans Prov Sumsel 2024

4. Fungsional Pengantar Kerja

Jabatan fungsional pengantar kerja adalah jabatan PNS atau P3K yang bertugas melaksanakan pelayanan antar kerja di instansi pemerintah, seperti menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja. Tujuannya adalah untuk menurunkan angka pengangguran dengan menyediakan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja, serta peran lainnya seperti konsultan dan edukator. Tugas pengantar kerja, melaksanakan antar kerja yaitu menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja melalui berbagai layanan seperti informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta penempatan tenaga kerja. Pengantar kerja juga bertugas menyusun analisis data ketenagakerjaan, melakukan perencanaan tenaga kerja, serta memberikan dukungan dan informasi bagi kelompok rentan seperti disabilitas dan lansia

Pejabat Fungsional Teknis Pengantar Kerja yang diimiliki Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebanyak 62 orang, 5 orang diantaranya merupakan Pegawai dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), 23 pejabat berstatus Pegawai Negeri dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan 39 orang statusnya Pegawai Negeri Sipil. Dari 17 kabupaten/kota yang ada, 13 kabupaten/kota memiliki Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dan 4 kabupaten kota lainnya belum memiliki, yaitu Kabupaten Lahat, Banyuasin, Empat Lawang dan Kota Pagar Alam, 43 Pegawai berjenis kelamin Perempuan dan 19 pegawai berjenis kelamin Laki-Laki.

C. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL, SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL.

Pembinaan hubungan industrial di Sumatera Selatan, seperti di daerah lain, merupakan hal yang krusial untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Hubungan industrial yang efektif sangat bergantung pada kekuatan dan kredibilitas lembaga-lembaga yang terlibat. Sistem informasi dan teknologi yang digunakan harus terus diperbarui untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan.

Hubungan Industrial bukanlah semata-mata hubungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajemen dengan pekerja, namun lebih luas. Banyak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses produksi, investor/pengusaha, pemerintah dan pekerja itu sendiri. Regulasi yang dibuat pemerintah untuk mengatur hubungan antara pengusaha, pekerja dan serikat pekerja bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang saling menguntungkan, memberi manfaat, dan setara. Hubungan industrial yang kondusif antara pengusaha dan pekerja/buruh menjadi kunci utama untuk menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Lembaga Hubungan Industrial yang ada di perusahaan-perusahaan menjadi ujung tombak pembinaan hubungan industrial, sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan gagasan oleh pekerja kepada pengusaha, juga sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul diantara pekerja dengan pengusaha. Dinas Tenaga Kerja di provinsi dan kabupaten/kota sebagai pembina berperan aktif dalam menjaga kondusifitas hubungan industrial di perushaan pada khususnya dan di provinsi Sumatera Selatan pada umumnya.

Lembaga Hubungan Industrial bukan sekadar pelengkap struktur organisasi, melainkan tulang punggung stabilitas ekosistem ketenagakerjaan. Hubungan industrial yang harmonis tidak terjadi secara kebetulan; ia diciptakan melalui mekanisme *check and balance* yang dijalankan oleh lembaga-lembaga ini. Bukan hanya "pemadam kebakaran" saat ada masalah, tetapi lebih sebagai "arsitek" yang merancang fondasi kerjasama yang kuat. Tanpa lembaga-lembaga ini, hubungan kerja akan bersifat *hukum rimba*, yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak.

Tabel III-C.1 : Lembaga Hubungan Industrial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

NO	NAMA	PERU SAHAAN	PP	PKB	SP/SB	LKS
1	Ogan Komering Ulu	284	44	30	55	34
2	Ogan Komering Ilir	184	41	33	117	62
3	Muara Enim	403	154	82	115	87
4	Lahat	188	134	24	48	54
5	Musi Rawas	75	30	42	96	14
6	Musi Banyuasin	416	101	41	117	108
7	Banyuasin	439	390	85	341	95
8	OKU Selatan	74	17	4	4	4
9	OKU Timur	143	70	18	16	37
10	Ogan Ilir	97	55	17	75	30
11	Empat Lawang	35	37	15	6	14
12	Penukal Abab Lematang Ilir	36	15	9	22	4
13	Musi Rawas Utara	42	34	18	60	44
14	Palembang	4.679	1.231	346	366	145
15	Prabumulih	448	51	4	13	9
16	Pagar Alam	50	44	32	47	14
17	Lubuk Linggau	99	69	5	10	7
18	Prov. Sumatera Selatan	0	86	28	-	-
	Jumlah	7.692	2.603	837	1.508	762

Sumber: Data Diolah, Bidang Hubinsyaker - Disnakertrans Prov. Sumsel Tahun 2024

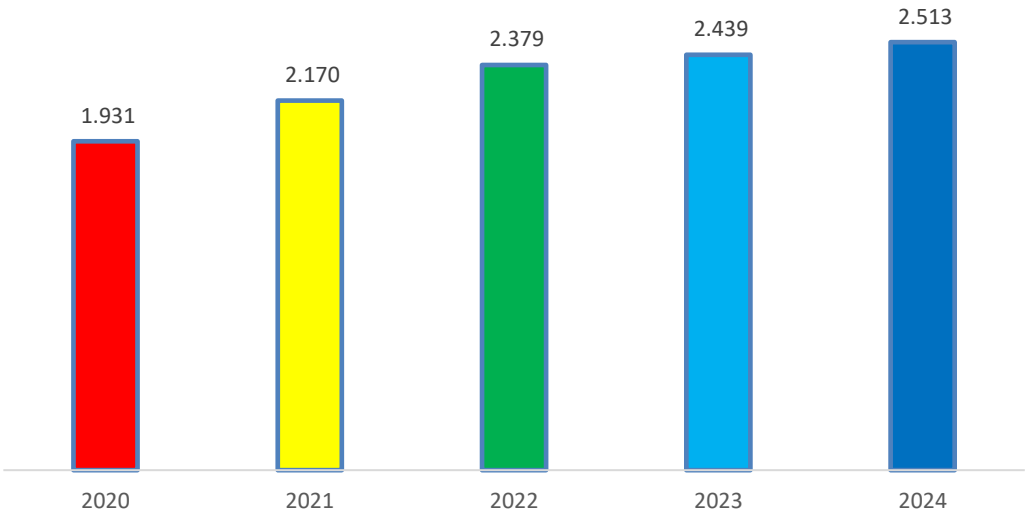
Pembinaan hubungan industrial yang efektif sangat bergantung pada kekuatan dan kredibilitas lembaga-lembaga yang terlibat. Upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, pemerintah mengeluarkan regulasi yang berhubungan dengan perangkat-perangkat hubungan industrial. Perangkat Hubungan Industrial yang terbentuk dan tersebar di kabupaten/kota menjadi sssarana pembinaan terhadap pekerja/buruh, pengusaha/manajemen dan serikat pekerja/serikat buruh.

1. Peraturan Perusahaan (PP)

Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan, sebanyak 2513 PP atau 33,65% dari jumlah Perusahaan yang tercatat di tahun 2024 (7.692 Perusahaan). Peraturan Perusahaan (PP) adalah dokumen penting yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang mempekerjakan minimal 10 orang, kecuali jika perusahaan tersebut sudah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan serikat pekerja. PP sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman tertulis yang mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

PP adalah perwujudan dari niat baik perusahaan untuk mengelola hubungan kerja secara profesional, adil, dan sesuai koridor hukum, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan perusahaan dan kesejahteraan pekerjanya.

Grafik III–C.1 : Pertumbuhan Perusahaan Memiliki Peraturan Perusahaan Tahun 2020-2024 Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Data diolah, Bidang Hubinsyaker – Disnakertrans Prov. Sumsel 2024

Grafik III – C1, menggambarkan dengan jelas pertumbuhan perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP), tren peningkatan dari tahun 2020 (1.931 perusahaan) hingga tahun 2024 (2.513 perusahaan) menunjukkan komitmen yang baik dari perusahaan dalam mengelola perusahaan agar terjadi hubungan industrial yang memberikan dampak positif bagi pekerja dan perusahaan itu sendiri.

Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) sebanyak 1.214 perusahaan atau 24,63% dari total perusahaan yang berada dalam wilayah Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin perusahaan yang telah memiliki PP ada 378 perusahaan setara dengan 80,94% dari total perusahaan yang ada (467 perusahaan) sedangkan Kabupaten Muara perusahaan yang telah memiliki PP ada 33,18% dari perusahaan yang terdaftar (428 perusahaan)

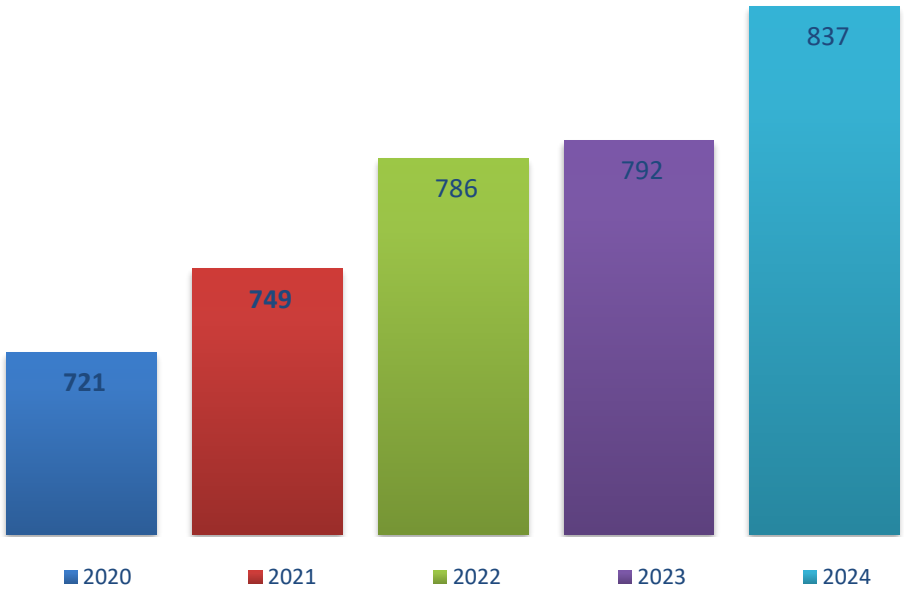
2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan kesepakatan tertulis antara serikat pekerja dan pengusaha yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta syarat-syarat kerja seperti upah, jam kerja, dan manfaat lainnya. Perjanjian ini dibuat melalui proses perundingan untuk mencapai kesepahaman dan berfungsi sebagai pedoman hubungan industrial di perusahaan.

Hingga tahun 2024 sebanyak 814 perusahaan. atau 10,58% dari jumlah perusahaan yang ada. Perjanjian Kerja Bersama adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai pihak yang berfungsi untuk memberikan jaminan dan mengatur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hal ini guna mewujudkan lingkungan kerja yang damai di dalam perusahaan.

Grafik III-C.2 ini secara jelas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam jumlah perusahaan di Sumatera Selatan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama selama periode lima tahun tersebut. Terjadi peningkatan sebanyak 28 PKB di tahun 2021 atau 749 perusahaan yang memiliki PKB dibanding data tahun 2020 (721 PKB). Pada tahun 2022 terjadi lonjakan perusahaan yang mendaftarkan PKB, ada 37 perusahaan yang mendaftarkan PKB baru atau merivisi / memperbaharui PKB menjadi 786 PKB, tahun berikutnya (2023) hanya 6 perusahaan yang mendaftarkan PKB (792 PKB) dan pada akhir tahun 2024 jumlah perusahaan yang memiliki PKB terdaftar sebanyak 837 PKB atau terjadi lonjakan sebanyak 45 perusahaan.

Grafik III–C.2 : Pertumbuhan Perusahaan Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2020-2024 Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Data diolah, Bidang Hubinsyaker – Disnakertrans Prov. Sumsel 2024

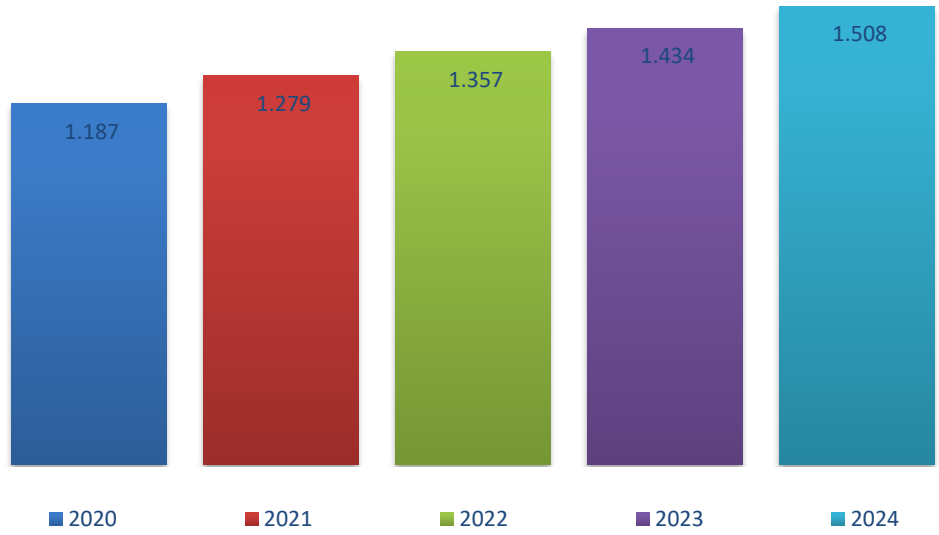
Kota Palembang terdapat 346 perusahaan yang telah mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama atau 7,47% dari jumlah perusahaan yang ada, Kabupaten Musi Banyuaisn ada 85 perusahaan yang memiliki PKB atau sekitar 19,36% dan Kabupaten Muara Enim dengan 20,35% dari jumlah perusahaan yang ada atau 82 perusahaan yang memiliki PKB.

Prosentse tertinggi perushaan yang memiliki PKB dibandingkan jumlah Perusahaan pada tahun tersebut di kabupaten / kota Pagaralam 64% (32 PKB) dari jumlah Perusahaan yang terdaftar 51 perusahaan, kabupaten Empat Lawang 42% (15 PKB) dibandingkan jumlah Perusahaan yang terdaftar 35 perusahaan, selanjutnya Kabupaten Musi Rawas Utara dari 47 perusahaan yang telah mendaftarkan PKB ada 18 perusahaan (38,30%) dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dari 36 perusahaan yang ada dan telah memiliki PKB ada 9 perusahaan (25%).

3. Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB)

Organisasi buruh yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan umum seperti upah, jam dan kondisi kerja. Melalui kepemimpinan, serikat pekerja / serikat buruh melakukan kesepakatan dengan majikan atas nama anggota serikat dan merundingkan kontrak buruh dengan majikan. Ada 19,60% (1.508 SP/SB) yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, jumlah ini relatif kecil bila dilihat dari jumlah perusahaan yang ada, 7692 perusahaan.

Grafik III-C.3 : Lembaga Hubungan Industrial – Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Data diolah, Bidang Hubinsyaker – Disnakertrans Prov. Sumsel 2024

Pertumbuhan jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh dari tahun 2020 hingga tahun 2024 bertambah sebanyak 321 serikat pekerja atau 21,29%. Tahun 2021 bertambah 92 serikat pekerja, 78 serikat pekerja di tahun 2022, di tahun 2023 ada 77 serikat pekerja yang didirikan dan tahun 2024 sebanyak 74 serikat pekerja baru yang berdiri.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah organisasi serikat pekerja terus bertambah selama periode lima tahun tersebut, maka ini memperkuat kesimpulan bahwa terjadi peningkatan kuantitas organisasi serikat pekerja di Provinsi Sumatera Selatan.

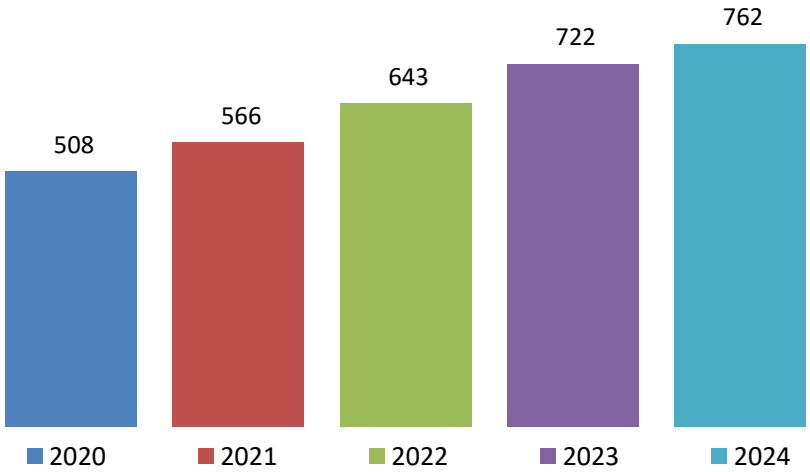
Peningkatan konsisten dalam grafik menunjukkan pertumbuhan kuantitas organisasi pekerja di Sumsel. Namun, pertumbuhan kuantitas ini tidak lantas berarti hilangnya tantangan, karena SP/SB di Sumsel tetap aktif dalam perjuangan hak-hak normatif (seperti upah dan jaminan kerja) di tengah dinamika hubungan industrial yang kompleks.

4. Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit)

LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Tahun 2024 tercatat sebanyak 762 LKS Bipartit di Sumatera Selatan atau 9,91% bila dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada (7.962 perusahaan). Paling jelas adalah peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terjadi secara konsisten setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran, kepatuhan, atau upaya dari pihak terkait (perusahaan dan pekerja/serikat pekerja) dalam membentuk lembaga dialog sosial di tingkat perusahaan

Laju Peningkatan Melambat: Meskipun jumlahnya terus meningkat, laju peningkatannya cenderung melambat di periode terakhir (2023 ke 2024) dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan 2023-2024 (40) adalah yang terkecil dalam rentang waktu yang ditampilkan.

Grafik III-C.4 : Lembaga Hubungan Industrial – LKS Bipartit Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Data diolah, Bidang Hubinsyaker – Disnakertrans Prov. Sumsel 2024

Tahun dengan peningkatan tertinggi, Peningkatan jumlah LKS Bipartit paling signifikan secara mutlak terjadi antara tahun 2022 dan 2023 (bertambah 79 lembaga). Pencapaian Tertinggi: Jumlah LKS Bipartit tertinggi tercatat pada tahun 2024 dengan total 762 lembaga.

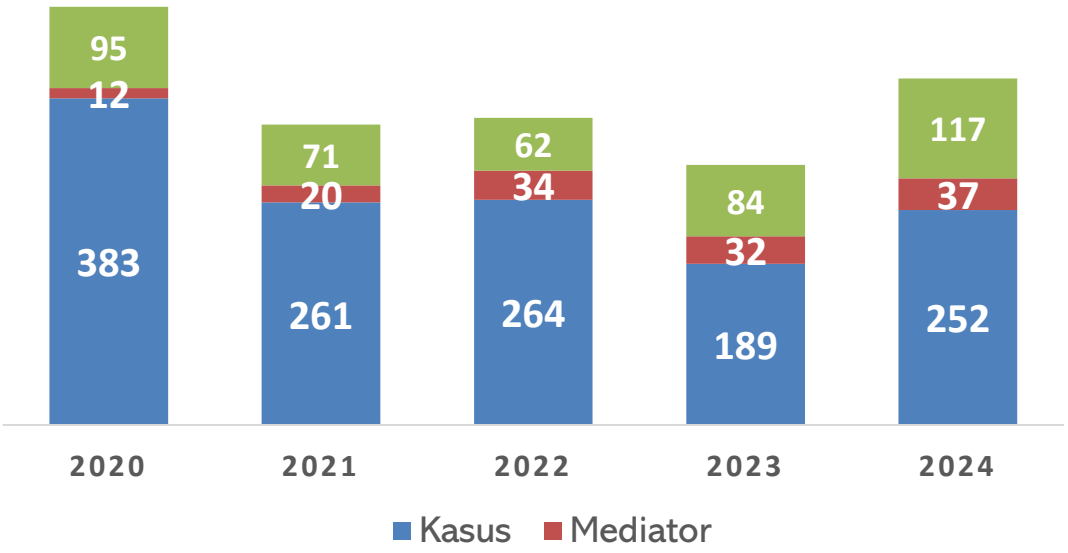
Pembinaan hubungan industrial yang efektif sangat bergantung pada kekuatan dan kredibilitas lembaga-lembaga yang terlibat. Upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, pemerintah mengeluarkan regulasi yang berhubungan dengan perangkat-perangkat hubungan industrial. Perangkat Hubungan Industrial yang terbentuk dan tersebar di kabupaten/kota menjadi sssarana pembinaan terhadap pekerja/buruh, pengusaha/manajemen dan serikat pekerja/serikat buruh.

Pembinaan hubungan industrial di Sumatera Selatan merupakan proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dari semua pihak. Dengan upaya bersama, diharapkan dapat tercipta hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

5. Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan hubungan industrial merupakan dinamika yang sering terjadi dalam dunia kerja, termasuk di Sumatera Selatan. Perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha, seringkali menjadi pemicu utama terjadinya perselisihan. Perselisihan yang terjadi di Sumatera Selatan memiliki karakteristik yang khas, dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang unik. Untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan, diperlukan upaya bersama dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, pengusaha, pekerja, dan masyarakat.

Grafik III-C.5 : Kasus Hubungan Industrial, Mediator dan Penyelesaian melalui Perjanjian Bersama (PB) Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 Tahun



Sumber : Data diolah; Bidang Hubinsyaker – Disnakertrans Prov. Sumsel

Dari Grafik III-C.5. dapat dibaca bahwa jumlah Kasus Hubungan Industrial di Sumatera Selatan pada tahun 2020 tercatat 383 kasus dengan jumlah Mediator 12 orang berhasil menyelesaikan kasus sebanyak 95 Perjanjian Bersama atau 24,80%. Pada tahun 2023 kasus yang dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) oleh 32 mediator sebesar 84 PB atau 44,44% dari 189 kasus yang masuk. Terjadi kenaikan sebanyak 33 kasus yang diselesaikan dengan PB menjadi 117 dari tahun 2024.

Grafik batang bertumpuk tersebut menunjukkan tren penurunan jumlah kasus hubungan industrial yang dilaporkan (ditandai dengan batang biru) sejak tahun 2020. Penurunan ini cukup signifikan, dari 383 kasus di tahun 2020 menjadi 252 kasus di tahun 2024.

Di sisi lain, jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan Perjanjian Bersama (PB) menunjukkan fluktuasi, tetapi secara umum memiliki proporsi yang cukup konsisten terhadap total kasus.

- Tahun 2020: Terdapat 383 kasus hubungan industrial yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, 12 kasus diselesaikan melalui mediasi oleh mediator, dan 95 kasus diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB). Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus, yaitu sebanyak 276 kasus, tidak diselesaikan melalui mediasi atau PB.
- Tahun 2021 : Jumlah kasus menurun drastis menjadi 261 kasus. Kasus yang diselesaikan oleh mediator meningkat menjadi 71 kasus melalui Perjanjian Bersama oleh 34 mediator
- Tahun 2022: Jumlah kasus sedikit meningkat menjadi 264 kasus. Mediasi oleh 34 mediator dan penyelesaian melalui PB sedikit menurun menjadi 62 kasus.
- Tahun 2023: Terjadi penurunan kasus yang signifikan menjadi 189 kasus. Kasus yang diselesaikan melalui mediasi tetap tinggi dengan 32 mediator, dan penyelesaian melalui PB meningkat menjadi 84 kasus.
- Tahun 2024: Jumlah kasus kembali naik sedikit menjadi 252 kasus. Meskipun demikian, kasus yang diselesaikan oleh mediator 37 mediator mencapai angka tertinggi penyelesaian melalui Perjanjian Bersama ada 117 kasus.

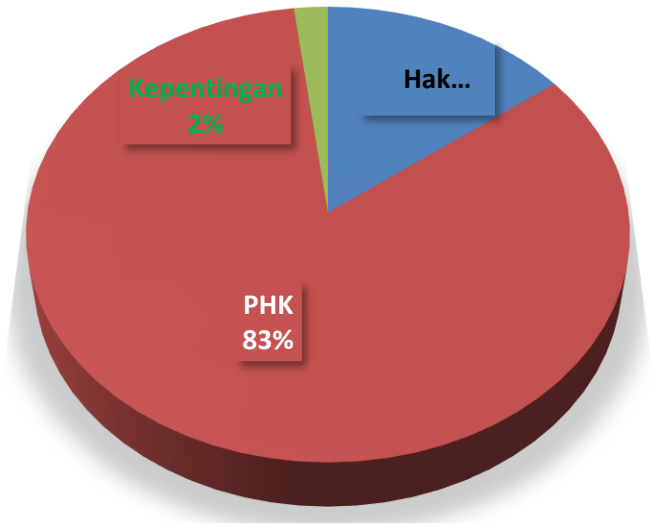
Meskipun total kasus yang dilaporkan terus menurun, efektivitas peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Sumatera Selatan cenderung meningkat. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan oleh mediator, mencapai puncaknya pada tahun 2024. Sebaliknya, penyelesaian melalui Perjanjian Bersama (PB) menunjukkan fluktuasi, namun tetap menjadi metode penyelesaian yang dominan di antara kedua kategori yang disajikan (mediator dan PB). Peningkatan peran mediator ini bisa jadi merupakan indikasi bahwa para pihak yang berselisih (pekerja dan pengusaha) semakin menyadari pentingnya penyelesaian damai di luar pengadilan.

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dominasi Tinggi dengan jumlah 210 kasus PHK yang mencakup lebih dari 80% dari seluruh perselisihan menunjukkan bahwa isu pemutusan hubungan kerja adalah sumber utama konflik dalam hubungan industrial di wilayah/lingkup data ini.

Perselisihan ini kemungkinan besar berpusat pada dua hal, yaitu : alasan PHK: Ketidaksepakatan pekerja/buruh terhadap alasan yang diajukan perusahaan (misalnya efisiensi, pelanggaran aturan, atau kondisi ekonomi).

Hak dari akibat pemutusan hubungan kerja antara lain : Ketidaksepakatan mengenai besaran hak yang diterima, yaitu perhitungan Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH).

Grafik III-C.6 : Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Masuk Tahun 2025, Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Data diolah; Bidang Hubinsyaker – Disnakertrans Prov. Sumsel

Isu Normatif dari Perselisihan Hak dengan jumlah 37 kasus Perselisihan Hak merefleksikan adanya sengketa terkait pemenuhan hak-hak normatif pekerja/buruh yang sudah dijamin oleh undang-undang, perjanjian kerja, atau Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan perselisihan antara pekerja dengan perusahaan antara lain : Pembayaran upah yang tidak sesuai atau terlambat, Perhitungan dan pembayaran upah lembur yang tidak benar, Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), cuti tahunan, atau tunjangan lainnya dan Isu tentang status karyawan (kontrak vs. tetap).

Implikasi dari kasus Perselisihan Hak, meskipun lebih kecil dari PHK, persentase 14,68% menunjukkan adanya ketidakpatuhan perusahaan atau perbedaan penafsiran yang signifikan terhadap aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Kasus perselisihan Kepentingan ini muncul bukan karena pelanggaran hak, tetapi karena adanya ketidaksepakatan dalam proses pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja (misalnya kenaikan upah, penambahan fasilitas, atau perubahan jam kerja) yang belum diatur dalam PP/PKB yang berlaku.

Kasus ini berpusat pada negosiasi dan syarat kerja di masa depan. Jumlah yang sangat kecil (hanya 5 kasus) 1,98%, umumnya mencerminkan salah satu dari dua hal, yaitu : Hubungan industrial di wilayah tersebut cenderung stabil dalam negosiasi PKB, dan Hanya sedikit perusahaan yang memiliki Serikat Pekerja aktif yang bernegosiasi untuk PKB baru.

Secara komperatir dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Kasus Pemutusan Hubungan Kerja, mempunyai dampak yang besar bagi kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Sengketa PHK tidak akan selesai dengan mudah karena akan berujung pada jumlah dan perhitungan kompensasi yanag akan dibayarkan perusahaan kepada pekerja.

- Perselisihan karena tidak ada kesepakatan dalam Hak dan Kewajiban yang dibicarakan dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama berpusat pada isu kepatuhan normatif. Isu normatif pada pemberian hak cuti, besaran upah dan lembur yang diberikan perusahaan kepada pekerja.

Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial oleh Mediator melalui jalan Perjanjian Bersama (PB) dan Anjuran, sesuai data yang ada pada Tabel III-C2 merupakan indikator keberhasilan mediasi. Anjuran adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh mediator atau Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial.

Palembang (Kota Palembang) mencatatkan Jumlah Kasus tertinggi, yaitu 81 kasus. Kasus ini melibatkan 212 Tenaga Kerja. Banyuasin berada di urutan kedua dengan 43 Kasus yang melibatkan 198 Tenaga Kerja.

Musi Banyuasin memiliki 33 Kasus dengan jumlah Tenaga Kerja terbanyak, yaitu 229 Tenaga Kerja. Muara Enim memiliki 23 Kasus, namun jumlah Tenaga Kerja (777) yang terlibat sangat dominan, bahkan melampaui separuh dari total Tenaga Kerja keseluruhan di Provinsi Sumsel (1.551). Ini adalah titik data yang sangat signifikan.

Pergerakan jumlah Kasus perselisihan tenaga kerja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sesuai daftar Tabel III-C2 diatas, dapat dibaca sebagai berikut :

Tabel III-C.2 : Kasus, Tenaga Kerja Terlibat Dan Penyelesaian Kasus Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah		Total		
		Kasus	T. Kerja	PB	Anjuran	Proses
1	Ogan Komering Ulu	3	3	-	3	1
2	Ogan Komering Ilir	7	8	5	2	-
3	Muara Enim	23	777	7	16	-
4	Lahat	11	19	5	6	-
5	Musi Rawas	11	27	4	7	-
6	Musi Banyuasin	33	229	20	13	-
7	Banyuasin	43	198	13	30	-
8	OKU Selatan	-	-	-	-	-
9	OKU Timur	-	-	-	-	-
10	Ogan Ilir	5	41	3	2	-
11	Empat Lawang	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-
14	Palembang	81	212	26	48	7
15	Prabumulih	6	8	5	1	-
16	Pagar Alam	-	-	-	-	-
17	Lubuk Linggau	26	26	26	-	-
18	Prov. Sum Sel	3	3	3	-	-
	Jumlah	**252**	**1.551**	**117**	**128**	**7**

Sumber : Data diolah; Bidang Hubinsyaker – Disnakertrans Prov. Sumsel

Beberapa Kabupaten/Kota menunjukkan nol kasus, yaitu: OKU Selatan, OKU Timur, Empat Lawang, PALI, Musi Rawas Utara, dan Pagar Alam. Kota Palembang memiliki jumlah penyelesaian kasus perselisihan melalui PB (Perjanjian Bersama) sebanyak 26 kasus dan melalui Anjuran tercatat 48 kasus. Kabupaten Musi Banyuasin tercatat 20 kasus perselisihan diselesaikan dengan penada tanganan Perjanjian Bersama (PB) dan 13 kasus diselesaikan melalui Anjuran. Kabupaten Banyuasin juga mencatatkan angka penyelesaian kasus dengan Perjanjian Bersama sebanyak 13 kasus dan penyelesaian perselisihan melalui Anjuran sebanyak 30 kasus. Kabupaten Muara Enim dari 23 kasus perselisihan yang masuk dan dimediasi oleh Mediator, ada 7 kasus yang selesai dengan Perjanjian Bersama dan 16 kasus dengan Anjuran. Lubuk Linggau tidak mencatatkan penyelesaian PB atau Anjuran, namun memiliki 26 Kasus dan 26 Tenaga Kerja yang seluruhnya masih dalam Proses (22).

Efektivitas Penyelesaian (PB vs. Anjuran): Secara keseluruhan, Anjuran (128) lebih banyak dikeluarkan daripada penyelesaian melalui Perdamaian (PB: 117). Ini mengindikasikan bahwa mediator lebih sering harus mengeluarkan rekomendasi formal (Anjuran) karena kesepakatan damai (PB) tidak selalu tercapai.

Meskipun hanya 23 kasus, kasus di Muara Enim melibatkan 777 Tenaga Kerja, menunjukkan bahwa setiap kasus rata-rata melibatkan sekitar 33.7 Tenaga Kerja (777/23). Ini kemungkinan merupakan perselisihan hubungan industrial yang melibatkan serikat pekerja besar.

Pengecualian: Musi Banyuasin adalah salah satu wilayah di mana jumlah PB (20) lebih tinggi daripada Anjuran (13), menunjukkan efektivitas mediasi yang baik dalam mencapai kesepakatan langsung.

6. Mediator Hubungan Industrial

Dalam dunia kerja yang dinamis, perselisihan antara pekerja dan pengusaha adalah hal yang lumrah terjadi. Untuk menjaga agar konflik tidak berlarut-larut dan berujung pada kerugian bagi semua pihak, peran mediator sangatlah penting. Di Sumatera Selatan, mediator hubungan industrial berperan sebagai pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan secara damai dan adil. Peningkatan peran mediator ini bisa jadi merupakan indikasi bahwa para pihak yang berselisih (pekerja dan pengusaha) semakin menyadari pentingnya penyelesaian damai di luar pengadilan.

Mediator hubungan industrial adalah pegawai yang terlatih dan memiliki kompetensi dalam bidang hubungan industrial. Mereka bertindak sebagai fasilitator dalam perundingan antara pekerja (serikat pekerja) dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediator tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, namun mereka berperan aktif dalam mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mendorong kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.

Pegawai Mediator yang terdata hingga akhir tahun 2024 di Provinsi Sumatera selatan sebanyak 37 orang di 14 kabupaten/kota, ada 4 kabupaten/kota yang tidak memiliki mediator. Penyebaran Mediator ditiap kabupaten/kota juga tidak merata. Perbandingan yang timpang ini memiliki beberapa implikasi serius, antara lain:

- Kasus yang jauh lebih banyak, setiap mediator menangani rata-rata 5 kasus. Beban kerja yang tinggi ini dapat berdampak pada kualitas mediasi yang dilakukan, karena mediator mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk mendalami setiap kasus secara mendalam.
- Mediator yang terbatas dapat menyebabkan penumpukan kasus dan memperlambat proses penyelesaian sengketa. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak yang bersengketa.
- Beban kerja yang tinggi dan waktu yang terbatas dapat berpotensi menurunkan kualitas mediasi yang dilakukan. Mediator mungkin tidak dapat memberikan perhatian yang cukup pada setiap pihak yang bersengketa, sehingga kesepakatan yang dicapai mungkin tidak optimal.

Jumlah kasus dan Serikat Buruh /Serikat Pekerja cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, namun secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat. Sedangkan mediator juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun tidak sekencang peningkatan kasus dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh. Provinsi Sumatera Selatan masih membutuhkan lebih banyak mediator untuk menangani jumlah kasus yang terus meningkat.

Kasus perselisihan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah mediator. Ini mengindikasikan bahwa jumlah mediator yang ada belum sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga memiliki jumlah yang cukup signifikan, menunjukkan adanya upaya preventif sebelum kasus berlanjut ke tahap penyelesaian melalui mediator.

7. Upah Minimum

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Sumatera Selatan untuk tahun 2024 menimbulkan beragam permasalahan dan manfaat, yang mencerminkan upaya menyeimbangkan kebutuhan pekerja dan kemampuan dunia usaha.

Manfaat utama UMP/UMK adalah melindungi daya beli pekerja, terutama yang berpenghasilan rendah, agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok di tengah inflasi. Penetapan upah minimum yang layak membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan sosial di masyarakat. Kenaikan upah minimum dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara tidak langsung, karena pekerja akan membelanjakan lebih banyak uang untuk barang dan jasa, sehingga terjadi peningkatan perputaran ekonomi. Upah minimum yang layak dapat menjadi faktor penarik bagi angkatan kerja untuk masuk dan bersaing dalam pasar tenaga kerja.

Permasalahan juga akan muncul bila penetepan upah minimum yang tinggi. Peningkatan biaya tenaga kerja akibat kenaikan upah minimum dapat menjadi beban signifikan bagi perusahaan, terutama usaha kecil, yang berpotensi menyebabkan pengurangan penyerapan tenaga kerja atau bahkan pemutusan hubungan kerja jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa analisis ekonomi menunjukkan bahwa setiap kenaikan upah minimum berpotensi menurunkan penyerapan tenaga kerja, meskipun penelitian lain di Sumsel menemukan bahwa upah minimum dapat berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, menunjukkan kompleksitas masalah ini.

Tabel III-C3 menunjukkan tren kenaikan Upah Minimum (UMP/UMK) di delapan wilayah yang berbeda dari tahun 2021 hingga 2025. Secara konsisten, semua wilayah dalam tabel mengalami peningkatan upah minimum setiap tahunnya, menunjukkan adanya penyesuaian reguler terhadap inflasi dan/atau kebijakan pemerintah daerah

Tabel III-C.3 : Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Wilayah	Upah Minimum				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Provinsi	3.043.111	3.144.446	3.404.177	3.456.874	3.681.635
2	Palembang	3.270.933	3.289.409	3.565.409	3.677.592	3.916.635
3	Musi Rawas	3.195.273	3.299.758	3.404.177	3.564.933	3.796.653
4	Muara Enim	3.158.277	3.263.477	3.538.556	3.627.622	3.863.417
5	Banyuasin	3.091.934	3.194.895	3.442.243	3.488.289	3.715.028
6	Musi Banyuasin	3.147.036	3.251.832	3.502.873	3.547.745	3.778.348
7	Muratara	3.144.446	3.144.446	3.404.177	3.564.933	3.796.654
8	OKU Timur	3.165.519	3.210.655	3.464.303	3.520.941	3.749.696

Sumber : Data diolah; Bidang Hubinsyaker – Disnakertrans Prov. Sumsel

Meskipun selalu naik, laju kenaikan bervariasi secara signifikan dari tahun ke tahun dan antar wilayah Tahun 2022, Kenaikan cenderung rendah, banyak wilayah mencatat kenaikan sekitar 3,33% (seperti Provinsi, Muara Enim, Banyuasin, Musi Banyuasin). Wilayah Palembang memiliki kenaikan terendah, hanya sekitar 0,57%. Tahun 2023: Tahun ini menunjukkan persentase kenaikan tertinggi secara umum di sebagian besar wilayah, seringkali mencapai atau melebihi 8% (misalnya Provinsi, Palembang, Muara Enim, Muratara). Tahun 2024: Kenaikan kembali melambat secara drastis, dengan sebagian besar wilayah mencatat kenaikan yang relatif kecil, seringkali di bawah 2% (seperti Provinsi, Banyuasin, Musi Banyuasin). Tahun 2025: Terdapat proyeksi kenaikan yang seragam di angka 6,50% untuk seluruh wilayah yang tercantum, kecuali untuk "Provinsi" yang sedikit lebih rendah.

Tidak ada satu wilayah pun yang secara konsisten memiliki upah minimum tertinggi atau terendah. Palembang cenderung memiliki nilai upah minimum tertinggi di antara kabupaten/kota yang lain, sementara nilai UMP Provinsi berfungsi sebagai acuan dasar. Secara ringkas, tabel tersebut mendokumentasikan pertumbuhan upah minimum yang stabil, namun dengan fluktuasi signifikan dalam kebijakan persentase kenaikan tahunan.

D. BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KETENAGKERJAAN

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil di Sumatera Selatan. Secara garis besar peran Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai pembina dan penegak norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja di wilayah kerja pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Sumatera Selatan merupakan upaya penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan adil bagi seluruh pekerja. Namun, seperti halnya di daerah lain, pelaksanaan ini masih menghadapi berbagai tantangan dan terus diupayakan untuk ditingkatkan. Penerapan Norma K3 bertujuan melindungi pekerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK), serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Peran Bidang meliputi:

- Mendorong dan membina perusahaan besar/berisiko tinggi untuk menerapkan SMK3 secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga peningkatan kinerja K3
- Melakukan investigasi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) untuk mencari penyebab dan mencegah terulang kembali.
- Melakukan pemeriksaan teknis terhadap instalasi, peralatan, dan lingkungan kerja (misalnya bejana tekan, listrik, penangkal petir, lingkungan kerja fisik/kimia/biologi) untuk memastikan kelayakan dan kepatuhan standar.
- Mendorong penunjukan dan pembinaan Ahli K3 Umum di perusahaan yang wajib sesuai regulasi.

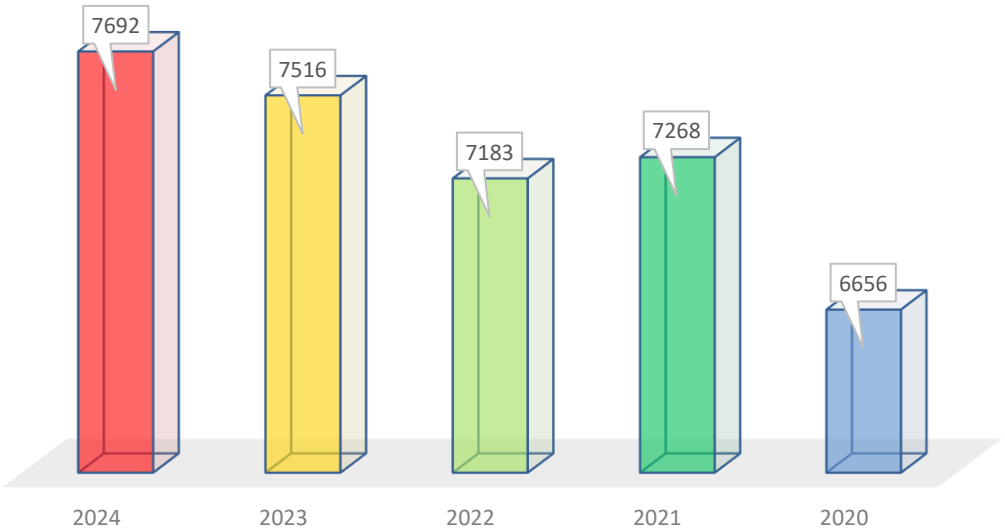
1. Perusahaan Terdaftar.

Grafik III – D.2. diatas menampilkan jumlah perusahaan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Secara umum, jumlah perusahaan di Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang semakin kondusif di provinsi tersebut. Secara umum, data menunjukkan tren pertumbuhan jumlah perusahaan di wilayah tersebut (diperkirakan Sumatera Selatan) selama periode 2020 hingga 2024. Jumlah perusahaan meningkat secara signifikan dari 6.656 entitas pada tahun 2020 menjadi 7.692 entitas pada tahun 2024. Terjadi kenaikan total sekitar 1.036 perusahaan atau sekitar 15.56% dalam kurun waktu 4 tahun. Hal ini mengindikasikan dinamika ekonomi yang positif dan peningkatan aktivitas bisnis di daerah tersebut.

Analisis perubahan tahun ke tahun memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan atau penurunan jumlah perusahaan. Periode Awal Pandemi (2020-2021) Pertumbuhan Tertinggi (+612/+9.18%), meskipun tahun 2020 merupakan awal dari Pandemi Covid-19 yang memukul keras ekonomi, pertumbuhan terbesar justru terjadi dari 2020 ke 2021. Interpretasi : Kenaikan signifikan ini mungkin disebabkan oleh : Pendataan Ulang : Adanya perbaikan atau intensifikasi pendataan perusahaan oleh instansi terkait. Adaptasi Bisnis : Munculnya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di sektor yang relevan dengan masa pandemi (e-commerce, logistik, kesehatan, dll.). Kemudahan

Perizinan: Adanya program pemerintah terkait kemudahan berusaha dan pendirian perusahaan (misalnya melalui OSS - *Online Single Submission*) yang mulai berdampak.

Grafik III - D.1 : Jumlah Perusahaan yang Beroperasi Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020-2024

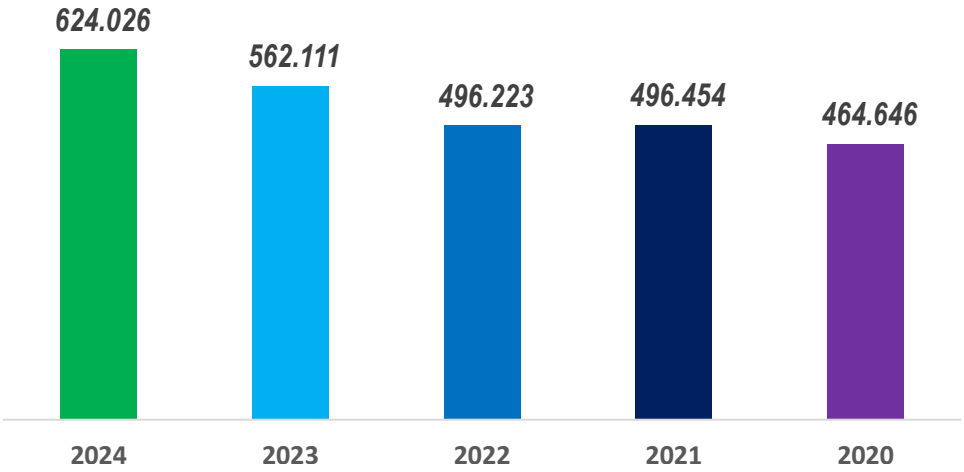


Sumber : Data diolah, Bidang Pengawasan Disnakertrans Prov. Sumsel 2024

Periode Puncak Pandemi dan Pemulihan Awal (2021 - 2022). Penurunan Pertama (-85 / -1.17%). Tahun 2022 mencatat satu-satunya penurunan jumlah perusahaan. Interpretasi: Penurunan ini kemungkinan merefleksikan. Dampak Jangka Panjang Pandemi: Perusahaan yang beroperasi dengan margin tipis dan tidak mampu bertahan terhadap tekanan ekonomi dan pembatasan operasional akhirnya gulung tikar (likuidasi) atau tidak lagi aktif terdata pada tahun 2022. Rasionalisasi Data: Pembersihan data perusahaan yang tidak aktif atau fiktif.

Periode Pemulihan Ekonomi (2022-2024) Pertumbuhan Kuat (+333/+4.64%). Ini menunjukkan pemulihan signifikan dan kuat setelah penurunan di tahun 2022. Interpretasi: Menggambarkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang solid, didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan stabilisasi harga komoditas (yang sangat relevan di Sumatera Selatan). Tahun 2023 ke 2024: Pertumbuhan Berlanjut (+176/+2.34%). Pertumbuhan masih terjadi, namun lajunya sedikit melambat dibandingkan periode 2022–2023. Interpretasi: Menandakan bahwa kondisi bisnis tetap kondusif, meskipun laju ekspansi mungkin mulai stabil atau menghadapi tantangan baru seperti inflasi atau suku bunga tinggi.

Grafik III-D.2 : Jumlah Pekerja di Perusahaan Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2019-2024



Sumber: Data diolah Bidang Binwasnaker - Disnakertrans Prov. Sumsel 2024

Grafik III – D.2 di atas menunjukkan tren kenaikan jumlah tenaga kerja di Sumatera Selatan dari tahun 2020 hingga 2024, ada sedikit penurunan sebanyak 231 buruh menjadi 496.223 dari jumlah buruh tahun 2021 sebanyak 496.454. Terus menagalami kenaikan jumlah buruh dari tahun 2022 hingga di tahun 2024 jumlah buruh yang tercatat ada 624.026 tenaga kerja local dan tenaga kerja asing. Ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi atau perubahan struktur ekonomi yang menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja meningkat. Peningkatan jumlah tenaga kerja ini memiliki beberapa implikasi terhadap pembinaan ketenagakerjaan di Sumatera Selatan:

- Perubahan Struktur Pekerjaan: Peningkatan jumlah tenaga kerja secara keseluruhan dapat mengindikasikan pergeseran dari sektor informal ke sektor formal, atau dari sektor padat karya ke sektor padat modal. Hal ini menuntut adanya penyesuaian program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang baru.
- Tingkat Pengangguran: Meningkatnya jumlah tenaga kerja berimpilkasi pada tingkat pengangguran yang menurun, hal ini diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat. Pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan distribusi manusia / pekerja dan barang.
- Produktivitas Tenaga Kerja: Jika kenaikan jumlah tenaga kerja diikuti dengan peningkatan produktivitas, maka hal ini dapat dianggap positif. Namun, jika produktivitas menurun, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, seperti kualitas tenaga kerja, teknologi, dan manajemen.
- Upah dan Kesejahteraan Pekerja: kanaikan jumlah tenaga kerja dapat mendongkrak upah karena tingkat produktivitas juga ikut naik. Hal ini dapat berdampak positif pada kesejahteraan pekerja dan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Secara keseluruhan, Bidang Norma Ketenagakerjaan dan K3 di Sumatera Selatan berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan penegak hukum yang perannya sangat krusial dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul di mana pekerja terlindungi dan produktivitas usaha tetap terjaga. Pembinaan yang efektif akan membantu perusahaan mencapai "Zero Accident" dan memenuhi hak-hak normatif pekerja.

Data menunjukkan bahwa ekosistem bisnis di Sumatera Selatan bersifat dinamis dan menunjukkan pertumbuhan yang solid (total kenaikan 15.56% dalam 4 tahun). Meskipun terdapat sedikit kontraksi pada tahun 2022, pemulihan pasca-pandemi sangat cepat. Pertumbuhan ini menjadi indikator positif bagi ekonomi daerah, namun sekaligus menjadi tantangan besar bagi Bidang Norma Ketenagakerjaan dan K3 dalam menjaga kepatuhan dan perlindungan pekerja di tengah peningkatan jumlah entitas yang harus diawasi.

Masalah kecelakaan kerja (KK) di Sumatera Selatan (Sumsel) merupakan isu serius yang secara langsung mencerminkan celah dan kelemahan dalam penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di banyak perusahaan. Meskipun data spesifik per tahun bervariasi, trennya menunjukkan volume kasus yang signifikan, yang mengancam perlindungan pekerja dan produktivitas daerah.

Kecelakaan kerja di Sumsel cenderung terkonsentrasi pada sektor-sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi provinsi dan memiliki tingkat bahaya inheren yang tinggi.

- Perkebunan (terutama Sawit): Sektor ini sering mencatat KK yang meningkat, melibatkan penggunaan alat berat, bahan kimia berbahaya (pestisida/herbisida), dan pekerjaan di area yang luas. K3 di perkebunan seringkali rentan karena kurangnya pengawasan di *site* yang tersebar.
- Konstruksi dan Manufaktur: Proyek pembangunan dan pabrik selalu menjadi penyumbang utama KK fatal, terutama terkait bekerja di ketinggian, tertimpa benda jatuh, dan penggunaan mesin/pesawat angkat angkut. Kasus fatal di perusahaan besar (seperti contoh di PT Pusri) sering menjadi sorotan dan menunjukkan perlunya standar K3 yang ketat, bahkan di BUMN besar.
- Pertambangan dan Energi: Operasi pertambangan batubara dan minyak/gas memiliki risiko ledakan, keruntuhan, dan paparan bahaya kimia/fisik yang tinggi.

Kecelakaan kerja tahun 2024 tercatat sebanyak 11.727 kasus yang melibatkan 7.021 pekerja, kecelakaan kerja yang terjadi ditempat kerja 7.820 Kasus (66,68%) dan sisanya 33,32% (3.097 kasus) terjadi diluar tempat kerja (perjalanan pergi ketempat kerja atau pulang dari tempat kerja). Korban kecelakaan ditempat kerja 4.893 orang atau 69,69% dan kecelakaan diluar tempat kerja ada 2.128 orang (30,31%)

Tabel III-D.1 : Kasus Kecelakaan Kerja yang Dicover BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Bulan	Lokasi Kejadian				Total Kasus	
		Di Tempat Kerja		Diluar tempat Kerja			
		Kasus	Korban	Kasus	Korban	Kasus	Korban
1	Januari	594	505	318	238	912	743
2	Februari	604	435	376	243	980	678
3	Maret	630	478	432	198	1.062	676
4	April	661	374	289	169	950	543
5	Mei	749	540	428	183	1.177	723
6	Juni	749	475	284	166	1.033	641
7	Juli	852	514	413	214	1.265	728
8	Agustus	862	488	430	236	1.292	724
9	September	715	441	336	204	1.051	645
10	Oktober	805	474	323	160	1.128	634
11	November	467	160	223	113	690	273
12	Desember	132	9	55	4	187	13
		7.820	**4.893**	**3.907**	**2.128**	**11.727**	**7.021**

Sumber : Data diolah BPJS Ketenagakerjaan Sumsel 2024

Kecelakaan yang terjadi ditempat kerja pada bulan Agustus tercatat sebanyak 862 kasus dengan korban 488 pekerja, ini merupakan kecelakaan yang tertinggi di tahun 2024. Sedangkan korban terbanyak terjadi pada bulan Juli 2024, 540 pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Total kecelakaan kerja yang terjadi di dalam tempat kerja ada 7.820 kasus dengan jumlah korban sebanyak 4.893 korban.

Sedangkan kasus kecelakaan kerja yang berada di luar tempat kerja / jam kerja pada tahun 2024 tercatat ada 3.907 kasus dengan jumlah korban ada 2.128 orang dan kesemuanya di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kasus kecelakan tertinggi terjadi di bulan Juli 2024, sebanyak 432 kasus namun jumlah korban tercatat 198 orang. Korban terbanyak pada kasus kecelakaan kerja terjadi di bulan Februari, 243 orang dan 376 kasus kecelakaan.

Beberapa faktor yang umumnya menjadi penyebab kecelakaan kerja di Sumatera Selatan, termasuk:

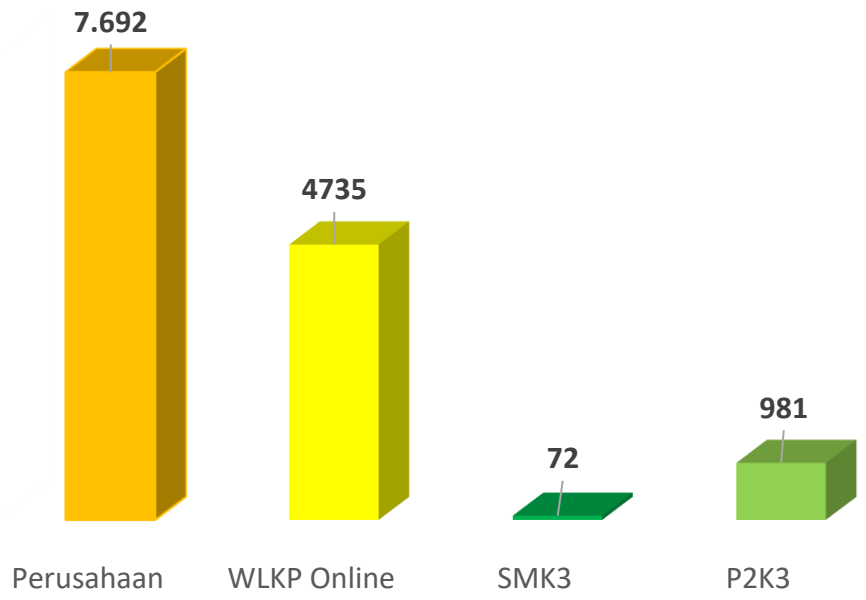
- Kurangnya kesadaran akan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) : Tidak semua pekerja dan perusahaan memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya K3, sehingga sering mengabaikan prosedur keselamatan.
- Peralatan kerja yang tidak memadai: Penggunaan alat kerja yang rusak, tua, atau tidak sesuai standar dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

- Lingkungan kerja yang tidak aman: Kondisi lingkungan kerja yang buruk, seperti pencahayaan yang minim, ventilasi yang buruk, atau tata letak yang tidak ergonomis, dapat memicu kecelakaan.
- Faktor manusia: Kelelahan, kurang konsentrasi, dan kesalahan prosedur kerja juga menjadi faktor penyebab yang signifikan.

3. Sistem Manajemen K3

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan langkah strategis dalam upaya mengurangi angka kecelakaan kerja di suatu wilayah, termasuk Sumatera Selatan. SMK3 yang terintegrasi dan efektif dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan risiko, peningkatan kesadaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan pada akhirnya penurunan angka kecelakaan.

Grafik III-D.3 : Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2024



Sumber : Data diolah, Bidang Binwasnaker - Disnakertrans Prov. Sumsel Tahun 2024

Dari Grafik III-D.3 diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah perusahaan yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebanyak 72 perusahaan di tahun 2024 atau baru 1,52% dari Jumlah Perusahaan yang telah terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online 4.735 perusahaan. Hal ini masih sangat kecil bila dibandingkan jumlah perusahaan yang ada di Data Base Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebanyak 7.692 perusahaan.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang wajib dimiliki perusahaan sebanyak 981 P2K3 atau 20,72% dari jumlah perusahaan yang terdaftar pada WLKP Online. Keberadaan P2K3 harus terus didorong untuk dibentuk di perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Selatan, P2K3 sebagai ujung tombak dalam menjalan SMK3. Agar kecelakaan kerja yang banyak terjadi (7820 kecelakaan ditempat kerja) dapat ditekan jumlahnya serta dicegah agar kejadian tersebut tidak terulang.

4. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK)

Pembinaan Norma Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan di perusahaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang tersebar di 9 Korwil. Pegawai Pengawas yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebanyak 43 pegawai, 3 struktural, dan 36 Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No. 81 tidak menetapkan formula tunggal atau angka pasti mengenai jumlah pengawas yang dibutuhkan untuk memeriksa semua perusahaan dalam satu tahun. Sebaliknya, Konvensi tersebut menyatakan bahwa jumlah pengawas harus "mencukupi" untuk menjalankan tugas secara efektif. ILO merekomendasikan 1 Pegawai Pengawas mengawasi 20.000 pekerja formal di negara berkembang. Tenaga Kerja formal yang tercatat sebanyak 1.684.209 pada akhir tahun 2024 (BRS No. 66/11/16/Th. XXVI, 5 November 2024) dapat ditarik kesimpulan, pegawai pengawas yang diperlukan sebanyak 84 orang masih ada kekurangan sebesar 53,57% atau 45 pegawai pengawas.

Pembinaan Norma Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pengusaha dan pekerja terhadap hak dan kewajiban sesuai undang-undang (misalnya upah, jam kerja, cuti, dll.). Memberikan panduan dan konsultasi untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial akibat pelanggaran norma kerja serta melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atau terencana terhadap perusahaan untuk memastikan tidak ada kekurangan pemenuhan hak pekerja.

Fungsi Utama Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan secara umum, mencakup: Pengawasan dan Penegakan Hukum: Melakukan kegiatan mengawasi dan menegakkan hukum terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan di semua tempat kerja, baik swasta, BUMN, maupun BUMD. Pegawai Pengawas juga diberikan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai peraturan perundang-undangan untuk menindak tindak pidana ketenagakerjaan. Memberikan pembinaan dan saran teknis kepada pengusaha, pekerja, dan pihak terkait mengenai cara mematuhi peraturan dan meningkatkan kondisi kerja yang layak. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan program pengawasan ketenagakerjaan, termasuk menganalisis potensi bahaya.

Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Memastikan setiap tempat kerja menerapkan syarat-syarat K3 yang diwajibkan sebelum dan selama proses produksi berlangsung. Memantau, mengevaluasi, dan mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja, serta memberikan rekomendasi tindakan mitigasi (misalnya penggunaan Alat Pelindung Diri/APD, penyediaan fasilitas P3K). Berperan dalam menciptakan budaya keselamatan yang kuat di tempat kerja melalui penyuluhan dan pelatihan K3 yang berkelanjutan. Melakukan investigasi jika terjadi kecelakaan kerja atau insiden untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Mendorong dan mengawasi pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai peraturan yang berlaku, terutama di industri berisiko tinggi. Melalui fungsi-fungsi ini, PPK berperan sentral dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan adil bagi pekerja Indonesia, terutama di sektor-sektor dengan potensi bahaya tinggi.

Bagian IV
Data Base Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan 2024

Data Base Ketenagakerjaan Bidang Pelatihan, (Vokasi) dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2024

PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020-2024

No	Balai Latihan Kerja	Dilatih						Lulus					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prov. Sumsel	1.554	392	352	353	192	240	1.546	367	349	348	192	240
2	Palembang	288	64	80	192	288	240	288	64	80	192	287	240
3	Banyuasin	800	304	208	384	448	400	784	304	200	384	448	400
4	Ogan Komering Ulu	304	112	192	208	336	352	304	112	192	208	336	352
5	Lahat	576	320	208	384	384	480	576	320	208	384	384	480
6	Ogan Komering Ilir	304	64	208	512	240	176	299	64	208	512	240	176
7	Lubuk Linggau	571	480	176	176	80	496	570	480	176	176	80	492
8	Prabumulih	304	96	80	96	128	128	298	93	80	96	128	128
9	Muara Enim	512	171	320	254	64	274	511	96	320	254	64	274
10	Musi Rawas	240	80	80	144	192	240	240	132	79	144	192	240
11	Musi Banyuasin	256	140	32	84	48	164	253	132	32	84	48	162
12	Pagaralam	704	-	64	160	96	0	687	-	64	160	96	0
13	Ogan Ilir	20	20	30	50	128	104	20	20	30	50	128	104
	SUMSEL	6.433	2.243	2.030	2.997	2.624	3.294	6.376	2.184	2.018	2.992	2.623	3.288

PESERTA LULUS PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

No	BLK Kabupaten/Kota	Peserta Pelatihan			Lulus Pelatihan			Penempatan
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	
1	Ogan Komering Ulu	287	65	352	287	65	352	109
2	Ogan Komering Ilir	100	76	176	100	76	176	-
3	Muara Enim	188	86	274	188	86	274	-
4	Lahat	216	264	480	216	264	480	118
5	Musirawas	48	192	240	48	192	240	30
6	Musi Banyuasin	59	105	164	57	105	162	14
7	Banyuasin	179	221	400	179	221	400	165
8	OKU Selatan	-	-	-	-	-	-	-
9	OKU Timur	-	-	-	-	-	-	-
10	Ogan Ilir	56	48	104	56	48	104	-
11	Empat Lawang	-	-	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-	-	-
14	Palembang	164	76	240	164	76	240	-
15	Prabumulih	48	80	128	48	80	128	16
16	Pagaralam	-	-	-	-	-	-	-
17	Lubuk linggau	456	40	496	452	40	492	226
18	UPTD BLKPPKT Sumsel	177	63	240	177	63	240	155
		1.979	**1.315**	**3.294**	**1.973**	**1.315**	**3.288**	**833**

UJI KOMPETENSI PESERTA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

No	BLK Kabupaten/Kota	Peserta Pelatihan			Uji Kompetensi	
		Lk	Pr	Jml	Lulus	Tdk Lulus
1	Ogan Komering Ulu	287	65	352	233	7
2	Ogan Komering Ilir	100	76	176	32	32
3	Muara Enim	188	86	274	64	16
4	Lahat	216	264	480	340	12
5	Musirawas	48	192	240	139	5
6	Musi Banyuasin	59	105	164	47	1
7	Banyuasin	179	221	400	342	26
8	OKU Selatan	-	-	-	-	-
9	OKU Timur	-	-	-	-	-
10	Ogan Ilir	56	48	104	-	-
11	Empat Lawang	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-
14	Palembang	164	76	240	131	13
15	Prabumulih	48	80	128	74	68
16	Pagaralam	-	-	-	-	-
17	Lubuk Linggau	456	40	496	-	-
18	UPTD BLKPPKT Sumsel	177	63	240	86	10
		1.979	**1.315**	**3.294**	**1.488**	**190**

PESERTA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI YANG DITEMPATKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020-2024

No	BLK Kabupaten/Kota	Peserta Pelatihan			Penempatan		
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1	Ogan Komering Ulu	287	65	352	89	20	109
2	Ogan Komering Ilir	100	76	176	-	-	-
3	Muara Enim	188	86	274	-	-	-
4	Lahat	216	264	480	53	65	118
5	Musirawas	48	192	240	6	24	30
6	Musi Banyuasin	59	105	164	5	9	14
7	Banyuasin	179	221	400	74	91	165
8	OKU Selatan	-	-	-	-	-	-
9	OKU Timur	-	-	-	-	-	-
10	Ogan Ilir	56	48	104	-	-	-
11	Empat Lawang	-	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-	-
14	Palembang	164	76	240	-	-	-
15	Prabumulih	48	80	128	6	10	16
16	Pagaralam	-	-	-	-	-	-
17	Lubuk Linggau	456	40	496	208	18	226
18	UPTD BLKPPKT Sumsel	177	63	240	114	41	155
		1.979	**1.315**	**3.294**	**555**	**278**	**833**

LEMBAGA PELATIHAN KETERAMPILAN SWASTA TERDAFTAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

NO	LOKASI	NAMA LPK	PELATIHAN / KEJURUAN	INSTRUKTUR	
				TETAP	TDK TETAP
1	KOTA PAGAR ALAM	PENJAHIT ANITA	Menjahit Mesin	2	-
2	KOTA PAGAR ALAM	SUSI SALON	Tata Kecantikan	2	-
3	KOTA LUBUK LINGGAU	LPK TOWER EDUCATION	Komputer, B. Inggris, Pangkas Rambut	8	-
4	KOTA LUBUK LINGGAU	LPMIK SARANA SUKSES UTAMA	Operator Komputer, Wirausaha	10	1
5	KOTA LUBUK LINGGAU	LPK RISYA	Ms. Office	4	3
6	KOTA LUBUK LINGGAU	LPK CHUBU	Bahasa Jepang	-	5
7	KOTA LUBUK LINGGAU	LPK BARLIAN SAFETY DRIVING	Mengemudi Mobil Keluarga	1	1
8	MUARA ENIM	LPK INDOCOMP	TIK, Fotographi	6	2
9	MUARA ENIM	LPK KAIZEN TRAINING INSTITUTE	Opr. Alat Berat, K3	2	2
10	MUARA ENIM	LPK ZAKIYAH	PKP 1 AK.10 - 11, Komputer	13	14
11	MUARA ENIM	LPK FAMILY COMPUTER	Operator / Teknik Komputer	4	-
12	MUARA ENIM	LPK TAUFIK SALON	Tata Kecantikan Rambut	3	2
13	MUARA ENIM	LPK SEMESTA GUNA	Opr. Komputer / B. Inggris	5	5
14	MUARA ENIM	LPK BINA WIYATA	Program Tik	-	5
15	MUARA ENIM	LPK LAPAS KELAS IIB MUARA ENIM	Membatik	4	-
16	MUARA ENIM	YLPK KARYA UTAMA	Komputer	2	2
17	MUARA ENIM	LPK SRIE SALON	Tata Kecantikan	-	-
18	KOTA PRABUMULIH	LPK. FRANSEVA	Musik	3	2
19	KOTA PRABUMULIH	LPK. LPMKA YKPP PREBUMULIH	Adm. Perkantoran, Teknik Komputer & Jaringan, Akutansi	5	1
20	KOTA PRABUMULIH	LPK. OSAMARU JAPANESE GAKKOU	Tekotei Ginaou/Manggang Swasta	-	-
21	KOTA PRABUMULIH	LPK. ZAYA BAROKAH	Kursus Mengemudi	2	-
22	KOTA PRABUMULIH	LPK. DUTA PRIMA	Desaign Grafis	2	-
23	KOTA PRABUMULIH	LPK. TOSANDA	Tata Kecantikan Pengantin	4	2
24	KOTA PRABUMULIH	LPK. CV. PRABU LEARNING CENTER	TOEFL, B. Inggris & Bimb. CPNS	-	-
25	KOTA PRABUMULIH	LPK. SARI	Pend. Kecakapan Kerja	3	3
26	KOTA PRABUMULIH	LPK. WIDYA	MS. Office, Akutansi, Digital Marketing, Design Grafis, Video Editing & B. Inggris	5	3
27	KOTA PRABUMULIH	LPK. ADIFA PRABUMULIH	TIDAK AKTIF	-	-
28	KOTA PRABUMULIH	JULIY'S BAKING CENTRE	TIDAK AKTIF	-	-
29	PALI *)	LPK RAHMA	Pelatihan Menjahit	2	1
30	PALI	LPK TUNAS PALI	Pelatihan Komputer	9	5
31	OKU TIMUR *)	LPK ENGLISH COURSE CENTER	Komputer Desain Grafis, Kom.Perkantoran	4	-
32	OKU TIMUR	LPK AUTOMOTIVE TRAINING CENTER	Teknik Las, Montir Sepeda Motor, Mengemudi Mobil	3	-
33	OKU TIMUR	LPK MITRA PRESTASI	Komputer Desain Grafis, Kom.Perkantoran	4	-
34	OKU TIMUR	LPK DUTA COMPUTER CENTER	Komputer Desain Grafis, Kom.Perkantoran	4	-
35	OKU TIMUR	LPK LAKSANA BUTIK	Menjahit	3	-
36	OKU TIMUR	LPK ABDIKA ATAKA	Komputer Desain Grafis, Kom.Perkantoran	2	-
37	OKU TIMUR	LPK PUNCAK MAS JAYA	Menjahit	3	-
38	OKU TIMUR	LPK FAJAR INSANI	Aplikasi Perkantoran Da Desain Grafis	6	-
39	OKU TIMUR	LPK HAMO SKILL TRAINING CENTER	Otomotif Sepeda Motor	3	-
40	OKU TIMUR	LPK CHILMA EDUCATION	Komputer Desain Grafis, Komputer Aplikasi Perkantoran	3	-
41	OKU TIMUR	LPK GRATIA ABADI	Aplikasi Perkantoran, Desain Grafis, Teknisi Komputer	4	-
42	OKU TIMUR	LPK GANTA TRAINING CENTER	Tsm (Teknik Sepeda Motor)	4	-
43	OKU TIMUR	LPK KUMIA KOMPUTER	Aplikasi Perkantoran, Desain Grafis, Teknisi Komputer	2	-
44	OKU TIMUR	LPK MACROMEDIA COMPUTER TRAINING CENTER	Aplikasi Perkantoran, Desain Grafis, Teknisi Komputer	2	-
45	OKU TIMUR	LPK ENGLISH COMER	Bahasa Inggris,Komputer,Bahasa Jepang	3	-
46	OKU TIMUR	LPK ISTANA DARMA	Komputer Muktimedia,Kapal Pesiar	-	-
47	OKU TIMUR	LPK BUMI MODISTE	Menjahit/Tata Busana	6	-
48	OKU TIMUR	LPK FAJAR INSANI BANJAR REJO	Aplikasi Perkantoran Dan Desain Grafis	2	-

NO	LOKASI	NAMA LPK	PELATIHAN / KEJURUAN	INSTRUKTUR	
				TETAP	TDK TETAP
49	OKU TIMUR	LPK ALINI	Aplikasi Perkantoran, Desain Grafis, Teknisi Komputer	3	-
50	OKU TIMUR	LPK NUANSA INDAH TAYLOR	Menjahit (Kritting,Woven)	2	-
51	OKU TIMUR	LPK CENDEKLA	Bahasa Inggris	5	-
52	OKU TIMUR	LPK TULUS ABADI COMPUTER	Microsoft Office, Desain Grafis, Teknisi Komputer	2	-
53	OKU TIMUR	LPK DOGAR JAYA MAKMUR	Sepeda Motor, Jaringan Kelistrikan, Teknisi Ac, Setir Mobil	1	-
54	OKU TIMUR	LPK DARUL MUTTAQIM	Menjahit	1	-
55	OKU TIMUR	LPK ALFI EDUCATION	Komputer	3	-
56	OKU TIMUR	LPK CIPTA SIAPA KERJA	Bisnis Dan Manajemen, Industri Kreatif, Pertanian Dan Perikanan	-	-
57	OKU TIMUR	LPK BINA MANDIRI LAPAS MARTAPURA	Meubelair,Pangkas Rambut,Budi Daya Ikan	5	-
58	OGAN KOMERING ULU	ALGERIAN COMP	Digital Marketing	4	1
59	OGAN KOMERING ULU	GLOBALINDO COMPUTER COURSES	Desain Grafis	5	-
60	OGAN KOMERING ULU	MEKAR JAYA BROTHERS	Desain Grafis	3	3
61	OGAN KOMERING ULU	LPK INSPIRATIF PASHION	Tata Busana	2	3
62	OGAN KOMERING ULU	LKP KECANTIKAN MERY SALON	Tata Kecantikan Rambut	1	1
63	OGAN KOMERING ULU	KARYA BINA ILMI	Barista	2	2
64	OGAN KOMERING ULU	LPK MEDIADATA	Desain Grafis	3	6
65	OGAN KOMERING ULU	LPK DEWANTARA MANDIRI	Teknisi Telepon Saluler	3	4
66	OGAN KOMERING ULU	LPK PINANDITA STAR COLLEGE	Jasa Usaha Makanan (Tata Boga)	3	4
67	OGAN KOMERING ULU	LPK TECHNICO ACADEMY	Tekniik Sepeda Motor	2	1
68	OGAN KOMERING ULU	LPK F. COM	COA - MS. Office	5	-
69	BANYUASIN	LPK SNADA COMPUTER	COA - MS. Office	-	-
70	BANYUASIN	LPK ARI RAHMA KOMPUTER	COA - MS. Office	-	-
71	BANYUASIN	LPK GIOVANI	-	-	-
72	BANYUASIN	LPK WHANIS EDUCATION CENTER	-	-	-
73	BANYUASIN	LPK DZAKI KOMPUTER	COA - MS. Office	-	-
74	BANYUASIN	LPK SANUDIN	-	-	-
75	BANYUASIN	LPK LINGGUA PLUS	-	-	-
76	BANYUASIN	LPK PHONIX	-	-	-
77	BANYUASIN	LPK HARAPAN BANGSA	-	-	-
78	BANYUASIN	LPK MONA	-	-	-
79	BANYUASIN	LPK CIPTA KARYA INSAN SRIWIJAYA	-	-	-
80	BANYUASIN	LPK YAYASAN PENDIDIKAN KOMPUTER TEKUN	COA - MS. Office	-	-
81	BANYUASIN	LPK BINA TERAMPIL NOYUNESMA	-	-	-
82	BANYUASIN	LPK YAYASAN BABUL ULUM	-	-	-
83	BANYUASIN	LPK GLORIA	-	-	-
84	BANYUASIN	LPK PARADIGMA	-	-	-
85	BANYUASIN	LPK SSID SIDOMULYO	-	-	-
86	BANYUASIN	LPK KTM TELANG	-	-	-
87	BANYUASIN	LPK PERMATA	-	-	-
88	BANYUASIN	LPK YAYASAN JITU JAYA SAMPURNA	-	-	-
89	BANYUASIN	LPK UNIVERSAL	-	-	-
90	BANYUASIN	LPK PEMERINTAH BENGKEL KERJA LAPAS KELAS IIA BANYUASIN	-	-	-
91	OGAN ILIR	LPK. MIRA JAYA	Bimbingan Tes Pramagang Ke Jepang	5	1
92	OGAN ILIR	LPK. SAKURA JISSHUU	Bahasa Jepang	-	-
93	OGAN ILIR	LPK DELTA ENTER PRENNEUR WILCARD AL YUZZAKYAH	Ketrampilan Menggunakan Alat-Alat Modern Dan Bahasa	-	-
94	KOTA PALEMBANG	LPK AMIKOM	Komputer,Digital Marketing, Jumputan, Desain Grafis, Otomotif,Menjahit,Bahasa Inggris,Tata Boga	5	-

NO	LOKASI	NAMA LPK	PELATIHAN / KEJURUAN	INSTRUKTUR	
				TETAP	TDK TETAP
95	KOTA PALEMBANG	LPK AMIKOM ENGLISH COURSE	Bahasa Inggris	-	-
96	KOTA PALEMBANG	LPK POTENSI	Bahasa Inggris	3	-
97	KOTA PALEMBANG	LPK INTENSIVE ENGLISH COURSE(IEC)	Bahasa Inggris,Komputer	8	-
98	KOTA PALEMBANG	BIMA SRIWIJAYA	Programmer Komputer	3	-
99	KOTA PALEMBANG	DBIZ DWIKORA BISNIS TERINTEGRASI	K3	6	-
100	KOTA PALEMBANG	YAMAHA MOTOR ENINGEERING TRAINING CENTRE	Otomotif Sepeda Motor	2	-
101	KOTA PALEMBANG	PKLK PANSOS BODRONOYO	Mengemudi	-	-
102	KOTA PALEMBANG	LPK YANET	Menjahit Dan Membordir	-	-
103	KOTA PALEMBANG	LPK PERHOTELAN	Perhotelan	8	-
104	KOTA PALEMBANG	LPTO SIAP MANDIRI	Otomotif	7	-
105	KOTA PALEMBANG	LPK NOVI	Menjahit	3	-
106	KOTA PALEMBANG	LPK INSTITUT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN WIRAUSAHA INDONESIA (IPPWI)	Service Elektronik, Kelistrikan, Kerajinan/Seni Ukir, Seni Lukis, Pertukangan, Adm Perkantoran	3	-
107	KOTA PALEMBANG	YAYASAN BAKTI PERDANA	Pelatihan Baby Sitter	-	-
108	KOTA PALEMBANG	LPK. PT. STANDAR PROFESIONAL INDONESIA - SAFETY TRAINNING SCHOOL	Bahasa Inggris, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Welding, Personal Develomoment	4	-
109	KOTA PALEMBANG	LPK ARINI	Tata Rias Pengantin	5	-
110	KOTA PALEMBANG	LPK ELRAHMA PALEMBANG	Komputer	10	-
111	KOTA PALEMBANG	LPK RIFKY BAKERY & RESTO	Tata Boga	4	-
112	KOTA PALEMBANG	LPK DARUSSALAM EDUCATION END CONSULTING	Bidang K3 (Konstruksi, Scafolding, Las, Kimia, Adversiting	15	-
113	KOTA PALEMBANG	LPK PTS SOLUTION	Produktifitas Dan Industri Kreatif	1	-
114	KOTA PALEMBANG	LPK BINA INDONESIA SEJAHTERA	Net Working(Komputer Operator Internet) Web Design(Desain Grafis)	6	-
115	KOTA PALEMBANG	LPK PELANGI	Tata Boga	4	-
116	KOTA PALEMBANG	LPK AREUMDAUN PALEMBANG	Bahasa Korea	2	-
117	KOTA PALEMBANG	LPK JUNDI LEARNING CENTER	Bahasa Inggris,Bahasa Perancis	7	-
118	KOTA PALEMBANG	LPK EKSELEN	Bahasa Inggris	5	-
119	KOTA PALEMBANG	LPPK SRIWIJAYA TEKNIKGRAPHY	Ac	1	-
120	KOTA PALEMBANG	LPK KARYA NYATA	House Keeping	3	-
121	KOTA PALEMBANG	LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FESFOOD INDONESIA TBK	Kuliner Siap Saji	-	2
122	KOTA PALEMBANG	LPKLKP ALQODRI ACADEMY	K3 Konstruksi, Prog RAB, & SAB	2	-
123	KOTA PALEMBANG	LPK YAYASAN KARYA CIPTA SARANA MANDIRI	Asisten RT	1	-
124	KOTA PALEMBANG	PPTKK AL KAUTSAR	Keperawatan Rumahan	1	-
125	KOTA PALEMBANG	CAPTAINS CLUB	Kapal Pesiar Perhotelan	2	-
126	KOTA PALEMBANG	LPK ITHA YUDISTIRA	Kue Kue	1	-
127	KOTA PALEMBANG	YAYASAN DANILA	Souvenir Asli Palembang	1	-
128	KOTA PALEMBANG	MBAK ELLY	Masakan Kue Roti	1	-
129	KOTA PALEMBANG	POLTEK	Komputer Otomatif	1	-
130	KOTA PALEMBANG	JAYA SERVICE	Montir Elektronik	1	-
131	KOTA PALEMBANG	LPK PT.ANUGRAH MUSI JAYA		-	-
132	KOTA PALEMBANG	PERHOTELAN HOMI	Perhotelan	1	-
133	KOTA PALEMBANG	TRIJAYA	Komputer	1	-
134	KOTA PALEMBANG	MENJAHIT PUSPA	Menjahit	1	-
135	KOTA PALEMBANG	APRILIA	Menjahit	1	-
136	KOTA PALEMBANG	LPK INSTITUT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN WIRAUSAHA INDONESIA (IPPWI)	Barista, Kue, Makanan, Bakery, Web Desain (Desain Grafis), Batako Conblok, Bisnis Manajemen	3	-
137	KOTA PALEMBANG	DIKLAT MENGEMUDI	Mengemudi	1	-
138	KOTA PALEMBANG	PRASETYA MANDIRI SCOOL OF BUSSINESS	Komputer, Sekretariat, Perikanan, Pariwisata	1	-
139	KOTA PALEMBANG	MEDICAL BAKTI HUSADA(LPK MBH)	Alat-Alat Kesehatan	1	-
140	KOTA PALEMBANG	BOGASARI BACKING CENTRE	Kuliner Kue Dan Roti	3	-
141	KOTA PALEMBANG	IPI LEPPINDO	Komputer	2	-

NO	LOKASI	NAMA LPK	PELATIHAN / KEJURUAN	INSTRUKTUR	
				TETAP	TDK TETAP
142	KOTA PALEMBANG	LPK KIAMORY ACADEMY	Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3), Produktivitas, Bisnis & Manajemen, Pertambangan, SDM, Lingkungan & Laboratorium Teknisi AC & Teknisi Scafolding, Teknik Las,Bahasa Asing, Aplikasi Perkantoran	5	-
143	KOTA PALEMBANG	LPK. PERHOTELAN SWARA DWIPA	Perhotelan	2	-
144	KOTA PALEMBANG	LPK. DUTA PRESTASI	Komputer	1	-
145	KOTA PALEMBANG	LPT SRIWIJAYA	Komputer	1	-
146	KOTA PALEMBANG	LPK WIRASENA JAYA SAKTI	Security Dan Hrd	1	-
147	KOTA PALEMBANG	LPK SAKURA GAKUIN CENTER	Bahasa Jepang	2	-
148	KOTA PALEMBANG	UNIVERSAL AMAL INSANI	Keperawatan	2	-
149	KOTA PALEMBANG	KARYA SAKTI	Sales Promotion	1	-
150	KOTA PALEMBANG	PT. CITRA KARYA SEJATI	PMI Keluar Negri	2	-
151	KOTA PALEMBANG	TUNAS MANDIRI	Otomotif, Las	2	-
152	KOTA PALEMBANG	LPK BAHASA ASING DAN KOMPUTER SETYO BUDI	Bahasa Asing (Inggris Dan Mandarin)	2	-
153	KOTA PALEMBANG	KEBAN SCHOOL	Otomotif Sepeda Motor Khusus Honda	1	-
154	KOTA PALEMBANG	LPK SAN MARINO INDONESIA	Kapal Pesiar Perhotelan	1	-
155	KOTA PALEMBANG	AQOBAH TECHNOLOGI BUSINESS CENTRE (ATB CENTRE)	Sales Promotion	1	-
156	KOTA PALEMBANG	LPK KOMPTEN ENERGI	Tekhnik Pengelasan	1	-
157	KOTA PALEMBANG	AVIATION STAR INSTITUTE	Airland Staff	1	-
158	KOTA PALEMBANG	UMIKA MARDIWA JAYA	Ground Staf	1	-
159	KOTA PALEMBANG	YAYASAN ARZETA/PERFECT COURSE	Komputer Dan Bahasa Asing	1	-
160	KOTA PALEMBANG	LPK TRIJASA	Barista	1	-
161	KOTA PALEMBANG	LPK TRAINING CENTER	Barista	1	-
162	KOTA PALEMBANG	YAYASAN JITU JAYA SEMPURNA	Teknik Otomotif Mobil & Motor	1	-
163	KOTA PALEMBANG	DIPINDO TECHNOLOGIY ACADEMY	Lembaga Kursus Komputer	1	-
164	KOTA PALEMBANG	EL. JONASH SWAPRAJA	Baby Sister	2	-
165	KOTA PALEMBANG	BALAI JASA KONSTRUKSI	Bangunan	2	-
166	KOTA PALEMBANG	MUNIRA	Tata Busana	1	-
167	KOTA PALEMBANG	LPK SAMIR	Menjahit	1	-
168	KOTA PALEMBANG	CV. RAV COMMUNICATION	Public Speaking	1	-
169	KOTA PALEMBANG	BIMAX EDUKASI		-	-
170	KOTA PALEMBANG	PT. LEMBAGA PELATIHAN KERJA PENILAIAN ASET INDONESIA	Penilaian Aset	1	-
171	LAHAT	PALCOMTECH	Teknik Komputer - Bahasa Inggris	3	4
172	LAHAT	BINA KARYA	Teknik Komputer	1	1
173	LAHAT	FIRCOM	Digital Marketing	7	-
174	LAHAT	PENJAHIT ANITA	Menjahit	-	3
175	LAHAT	EVEREST EDUCATION CENTER	Teknik Komputer, Bahasa Inggris	-	3
176	LAHAT	BINA PRESTASI	Teknik Komputer	2	2
177	LAHAT	KARYA MULIA	Teknik Perbengkelan, Montir Dan Setir Mobil	1	-
178	LAHAT	LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS MENJAHIT "FARIS"	Menjahit	2	-
179	LAHAT	LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN KERJA SEGANTI SETUNGGUAN	Tata Boga, Teknik Otomotif & Desain Grafis	3	-
180	LAHAT	PT. KAMIBE BANGUN MUSI	Pendidikan Teknik Swasta	88	-
181	EMPAT LAWANG	LPK RACHMA	Komputer, Desain, Grafis, Menjahit	2	-
182	OGAN KOMERING ILIR	LPK COLLECTIVE	Ms Office, Desain Grafis, Teknisi Komputer	2	-
183	OGAN KOMERING ILIR	LPK ANIEKA PRIMA	Aplikasi Perkantoran,Desain Grafis	3	-
184	OGAN KOMERING ILIR	LPK FRIEND SHIP	Englis For Office, Desain Grafis	1	-
185	OGAN KOMERING ILIR	LPK BEE HEPPY	Kursus Bimbel, Bahasa Ingris	1	-
186	OGAN KOMERING ILIR	LPK TANAS. COM	Aplikasi Perkantoran, Desain Grafis, Teknisi Komputer	2	-
187	OGAN KOMERING ILIR	LPK BINA BANGSA	Tata Busana	1	-
188	OGAN KOMERING ILIR	LPK SAHABAT PELANGI	Tata Busana	1	-

NO	LOKASI	NAMA LPK	PELATIHAN / KEJURUAN	INSTRUKTUR	
				TETAP	TDK TETAP
189	OGAN KOMERING ILIR	LPK YOS.COM	Aplikasi Perkantoran, Desain Grafis, Teknisi Komputer	2	-
190	OGAN KOMERING ILIR	LPK CANTIKA	Tata Busana	1	-
191	OGAN KOMERING ILIR	LPK D'SAKURA CANDEKLA	Magang Ke Jepang	1	4
192	MUSI RAWAS	AL-QOLAM	Komputer, Bhs. Inggris	10	-
193	MUSI RAWAS	BINA SATRIA MANDIRI	Komputer	7	4
194	MUSI RAWAS	WURI KOMPUTER	Komputer	1	1
195	MUSI RAWAS	ANEKA INDAH SALON	Salon Kecantikan	1	1
196	MUSI RAWAS	MILA SALON	Salon Kecantikan	4	-
197	MUSI RAWAS	EXCELLEN ENGLISH COURSE (EEC)	Bahasa Inggris	7	2
198	MUSI RAWAS	ARYA MANDIRI KOMPUTER	Komputer	3	8
199	MUSI RAWAS	BINA PRIMA JAYA	Komputer	1	2
200	MUSI RAWAS	ORANGE MUARA KELINGI	Bahasa Inggris, Calistung, Tata Boga	-	2
201	MUSI RAWAS	NEW ENGLISH LENGUAGE CENTRE	Bahasa Inggris	2	1
202	MUSI RAWAS	CINDY SALON	Tata Kecantikan	2	1
203	MUSI RAWAS UTARA	ELANG MUDA TEPI BARAT	Desain grafis, MS Office, Digital Marketing	5	3

*) PALI (Penukal Abab Lematang Ilir)
OKU Timur (Ogan Komering Ulu Timur)

LEMBAGA PELATIHAN KETERAMPILAN SWASTA TERAKREDITASI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

No	Kab/Kot	Lembaga Pelatihan	Program Kejuruan	No. Akreditasi	Masa Berlaku
1	Lahat	LPK Bina Karya	Operator komputer	133/LA-LPK/XII/2020 17 Desember 2020	17/12/2025
2	Lahat	LPK Fircom	Operator komputer	164/LA-LPK/XII/2020 17 Desember 2020	17/12/2025
3	Lahat	Fircom	Audio Vidio	418/LA-LPK/XI/2023 29 Nopember 2023	29/11/2028
4	Lahat	LPKB Bina Karya	Bahasa Inggris	881/LA-LPK/XII/2022 30 Desember 2022	30/12/2027
5	Lubuk Linggau	LPK Barlian Safety Driving	Mengemudi Mobil Keluarga (Family Driver)	322/LALPK/XII/2024 03 Desember 2024	12/03/2029
6	Lubuk Linggau	LPMIK Sssarana Sukses Utama	Operator Komputer	586/LA-LPK/XI/2022 16 November 2022	08/11/2027
7	Lubuk Linggau	LPK Risya	Desain Grafis	731/LA-LPK/XII/2022 26 Desember 2022	08/11/2027
8	Muara enim	LPK Salon Srie	Tata Kecantikan Rambut	166/LA-LPK/XII/2020 17 Desember 2020	17/12/2025
9	Muara enim	LPK Semesta Guna	Desain Grafis	171/LA-LPK/XII/2020 17 Desember 2020	17/12/2025
10	Muara Enim	LPK Zakiah	Junior Desain Grafis	206/LA-LPK/XI/2024 20 Nopember 2024	20/11/2029

No	Kab/Kot	Lembaga Pelatihan	Program Kejuruan	No. Akreditasi	Masa Berlaku
11	Muara Enim	LPK Zakiah	Administrasi Perkantoran	331/LA-LPK/XII/2020 28 Desember 2020	28/12/2025
12	Muara Enim	LPK Semesta Guna	Desain Grafis	409/LA-LPK/XII/2021 27 Desember 2021	27/12/2026
13	Muara Enim	LPK YLPK Karya Utama	Operator Komputer	424/LA-LPK/XII/2021 27 Desember 2021	27/12/2026
14	Muara Enim	Indocomp	Desain Grafis	582/LA-LPK/XI/2022 16 November 2022	08/11/2027
15	Muara Enim	LPK Semesta Guna	Bahasa Ingris	689/LA-LPK/XII/2023 28 Desember 2023	28/12/2028
16	Muara Enim	LPK Zakiah	Teknisi Komputer	841/LA-LPK/XII/2023 28 Desember 2023	28/12/2028
17	Muara Enim	LPK Bina Wiyata	Desain grafis	842/LA-LPK/XII/2023 28 Desember 2023	28/12/2028
18	Musi Rawas	LPK Excellent English Course (EEC)	Bahasa Inggris	588/LA-LPK/XI/2022 16 November 2022	08/11/2027
19	Ogan Ilir	Mirai Jaya	Bahasa Jepang	581/LA-LPK/XI/2022 16 November 2022	08/11/2027
20	OKI	LPK Anaka Prima	Operator Komputer	162/LA-LPK/XII/2020 17 Desember 2020	17/12/2025
21	OKI	LPK Bee Happy Education Center	Bahasa Inggris	404/LA-LPK/XII/2021 27 Desember 2021	27/12/2026
22	OKI	D'Sakura Cendekia	Bahasa Jepang	583/LA-LPK/XI/2022 16 November 2022	08/11/2027
23	OKI	LPK Aneka Prima	Desain Grafis	621/LA-LPK/XII/2023 19 Desember 2023	19/12/2028
24	OKI	LPK Cantika	Menjahit (tata busana)	690/LA-LPK/XII/2023 28 Desember 2023	28/12/2028
25	OKI	LPk LP2K2 Yos. Com	Operator Komputer Muda	692/LA-LPK/XII/2023 28 Desember 2023	28/12/2028
26	OKU	LPK Tehnico	Otomotif Motor	163/LA-LPK/XII/2020 17 Desember 2020	17/12/2025
27	OKU	LPK. Algerian Computer	Pengelolaan Aplikasi Perkantoran	226/LALPK/XI/2024 21 Nopember 2024	21/11/2029
28	OKU	LPK. F Two Com	Operator Komputer Muda	227/LALPK/XI/2024 25 Nopember 2024	25/11/2029
29	OKU	Permata Dewi	Fhotografi	407/LA-LPK/XII/2023 29 Nopember 2023	29/11/2028
30	OKU	LPK Mediadata	Desain grafis	693/LA-LPK/XII/2023 28 Desember 2023	28/12/2028

No	Kab/Kot	Lembaga Pelatihan	Program Kejuruan	No. Akreditasi	Masa Berlaku
31	OKU	LPK Inspiratif Fashion	Keterampilan Menjahit Pakaian	812/LA-LPK/XII/2023 28 Desember 2023	28/12/2028
32	OKU	LPK Algerian	Desain grafis	843/LA-LPK/XII/2023 28 Desember 2023	28/12/2028
33	OKU	LPK Kecantikan Mery Salon	Tata Kecantikan Rambut	854/LA-LPK/XII/2023 28 Desember 2023	28/12/2028
34	OKU	LPK F Two Com	Desain grafis	873/LA-LPK/XII/2023 28 Desember 2023	28/12/2028
35	OKU	LPK Mekar Jaya Brothers	Desain Grafis	934/LA-LPK/XII/2022 30 Desember 2022	30/12/2027
36	OKU	LPK Dewantara Mandiri	Perbaikan Telepon Seluler (HP)	954/LA-LPK/XII/2022 30 Desember 2022	30/12/2027
37	OKU	LPK Pinandita Star College	Tata Boga (Jasa Usaha)	958/LA-LPK/XII/2022 30 Desember 2022	30/12/2027
38	OKU Timur	LPK Cendikia	Operator Komputer	161/LA-LPK/XII/2020 17 Desember 2020	17/12/2025
39	OKU Timur	LPK Fajar insani	Operator Komputer	171/LA-LPK/XII/2020 17 Desember 2020	17/12/2025
40	OKU Timur	LPK Nuansa Indah Tailor	Menjahit	172/LA-LPK/XII/2020 17 Desember 2020	17/12/2025
41	OKU Timur	LPK Mitra Prestasi	Desain Grafis	174/LA-LPK/XII/2020 17 Desember 2020	17/12/2025
42	OKU Timur	LPK Abdika Ataka	Tata busana/garment	175/LA-LPK/XII/2020 17 Desember 2020	17/12/2025
43	OKU Timur	LPK Automotive tc	Otomotive Sepeda Motor	176/LA-LPK/XII/2020 17 Desember 2020	17/12/2025
44	OKU Timur	LPK Alini	Operator Komputer	403/LA-LPK/XII/2021 27 Desember 2021	27/12/2026
45	OKU Timur	LPK Alfi Education	Operator Komputer	405/LA-LPK/XII/2021 27 Desember 2021	27/12/2026
46	OKU Timur	LPK Alini	Desain Grafis	406/LA-LPK/XI/2023 29 Nopember 2023	29/11/2028
47	OKU Timur	LPK English Corner	Digital Marketing	410/LA-LPK/XII/2021 27 Desember 2021	27/12/2026
48	OKU Timur	LPK Fajar Insani Banjar Rejo	Operator Komputer	411/LA-LPK/XII/2021 27 Desember 2021	27/12/2026
49	OKU Timur	Harno Skill Training Center	Teknik Sepeda Motor	622/LA-LPK/XII/2023 20 Desember 2023	20/12/2028
50	OKU Timur	LPK Fajar Insani	Desain grafis	691/LA-LPK/XII/2023 28 Desember 2023	28/12/2028
51	Palembang	LPK Bina Sriwijaya	Operator Komputer Muda	165/LA-LPK/XI/2024 19 Nopember 2024	19/11/2029

No	Kab/Kot	Lembaga Pelatihan	Program Kejuruan	No. Akreditasi	Masa Berlaku
52	Palembang	LPK Standar Profesional Indonesia	K3 umum	165/LA-LPK/XII/2020 17 Desember 2020	17/12/2025
53	Palembang	LP3I	Operator komputer	167/LA-LPK/XII/2020 17 Desember 2020	17/12/2025
54	Palembang	LPK Darusalam	K3 Umum	168/LA-LPK/XII/2020 17 Desember 2020	17/12/2025
55	Palembang	LPKP	Perhotelan	170/LA-LPK/XII/2020 17 Desember 2020	17/12/2025
56	Palembang	LPK BIS	Desain grafis	173/LA-LPK/XII/2020 17 Desember 2020	17/12/2025
57	Palembang	LPK Rifki Bakery & Resto	Tata Boga	299/LA-LPK/XII/2020 28 Desember 2020	28/12/2025
58	Palembang	LPK Kiamory Academy	K3 Umum	300/LA-LPK/XII/2020 28 Desember 2020	28/12/2025
59	Palembang	LPK Bunda Mandiri	Tata Boga	338/LA-LPK/XII/2020 30 Desember 2020	30/12/2025
60	Palembang	LPK. Yayasan Bakti Perdana	Perawat Bayi	361/LA-LPK/XII/2024 09 Desember 2024	12/09/2029
61	Palembang	LPK Samir	Menjahit Busana Modiste	362/LALPK/XII/2024 09 Desember 2024	12/09/2029
62	Palembang	LPK Bhakti Perdana	House Keeper	407/LA-LPK/XII/2021 27 Desember 2021	27/12/2026
63	Palembang	LPK Palembang Training Center	Barista	408/LA-LPK/XII/2021 27 Desember 2021	27/12/2026
64	Palembang	LPK Ekselen	English Frontliner	418/LA-LPK/X/2022 27 Oktober 2022	27/10/2027
65	Palembang	LPK Amikom	Digital Marketing	45/LA-LPK/VII/2023 20 Juli 2023	20/7/2028
66	Palembang	LPK Amikom	Pembuatan Batik Tulis	46/LA-LPK/VII/2023 20 Juli 2023	20/7/2028
67	Palembang	LPK Amikom	Desain Grafis	556/LA-LPK/XI/2022 8 November 2022	08/11/2027
68	Palembang	LPK Perfect Course	Desain Grafis	590/LA-LPK/XI/2022 16 November 2022	08/11/2027
69	Palembang	El - Rahma	Desain Grafis	593/LA-LPK/XI/2022 16 November 2022	08/11/2027
70	Palembang	LPK Elsains	Operator Komputer	650/LA-LPK/XI/2022 23 November 2022	08/11/2027
71	Palembang	LPK Intensive English Course	Bahasa Inggris Perhotelan	698/LA-LPK/XII/2021 29 Desember 2021	29/12/2026
72	Palembang	LPK LPTO Siap Mandiri	Servis Sepeda Motor Konvensional	732/LA-LPK/XII/2022 26 Desember 2022	26/12/2027

No	Kab/Kot	Lembaga Pelatihan	Program Kejuruan	No. Akreditasi	Masa Berlaku
73	Palembang	LPK Perfect Course	Bahasa Inggris	753/LA-LPK/XII/2022 26 Desember 2022	26/12/2027
74	Palembang	LPK Difindo Technology Academy	Desain Grafis Muda	984/LA-LPK/XII/2023 28 Desember 2023	28/12/2028
75	Palembang	LPK El Jonash Swapraja	Baby Sister	Proses pengiriman Sertifkat	
76	Palembang	LPK TRIJASA	Bahasa Jepang	Proses pengiriman Sertifkat	
77	Palembang	LPK. PUTRI TUNGGAL JAYA ABADI	Bahasa Jepang	Proses pengiriman Sertifkat	
78	Penukal Abab Lematang Ilir	Tunas Pali	Operator Komputer	580/LA-LPK/XI/2022 16 November 2022	08/11/2027
79	Prabumulih	LPK Osamaru Japanese Gakkou	Bahasa Jepang	400/LA-LPK/XII/2021 27 Desember 2021	27/12/2026
80	Prabumulih	LPK Franseva	Bahasa Inggris	406/LA-LPK/XII/2021 27 Desember 2021	27/12/2026
81	Prabumulih	LPMK. YKPP	Desain Grafis	587/LA-LPK/XI/2022 16 November 2022	08/11/2027
82	Prabumulih	LPK Sari	Menjahit	961/LA-LPK/XII/2022 30 Desember 2022	30/12/2027

BLK KOMUNITAS TERDAFTAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

NO	BLK KOMUNITAS / PONDOK PESANTREN	LOKASI	TAHUN BERDIRI	KEJURUAN	DAYA TAMPUNG
1	Al Hikmah	Banyuasin	2021	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
2	Darul Ulum Saleh Jaya	Banyuasin	2020	Garmen Apparel	48
3	Muqimus Sunnah	Banyuasin	2019	Bahasa Inggris	48
4	Darul Ulumissyar'Iyyah	Banyuasin	2019	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
5	Al-Khoiriyah	Banyuasin	2019	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
6	Ma'Ariful Ulum	Banyuasin	2019	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
7	Salafiyah Bahrul Ulum	Banyuasin	2018	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
8	Ma'Ariful Ulum	Banyuasin		Tata Busana	48
9	Al-Baroqah	Empat Lawang	2023	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
10	Barokatul Qur'An	Empat Lawang	2022	Teknik Las	48
11	Al-Ikhlas	Lahat	2023	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
12	Darussalam Lahat	Lahat	2021	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
13	Abdur Rohman	Lahat	2020	Teknik Otomotif	48
14	Raudhatun Nasihin	Muara Enim	2022	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
15	Salafiyah Al-Falah Putak	Muara Enim	2023	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
16	Mansya'Ul Huda	Muara Enim	2023	Garmen Apparel, Tata Busana	48
17	Bumi Al-Falah	Muara Enim	2023	Teknik Las	48
18	Darul Ulum Danau Ringkih	Muara Enim	2022	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
19	Yayasan Al-Mashoha Enim	Muara Enim	2023	Teknik Las	48
20	Al Haromain	Muara Enim	2022	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
21	Hidayatul Mubtadiin Sigam	Muara Enim	2020	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
22	Laa - Roiba Muara Enim	Muara Enim	2021	Tik, Bisnis Dan Manajemen, Tata Kecantikan, Tata Busana, Garmen Apparel	48
23	Nurul Iman	Muara Enim	2020	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
24	Rawdhotut Taufiq	Muara Enim	2020	Teknik Otomotif	48
25	Hidayatul Fudhola Walisongo	Musi Banyuasin	2023	Pertanian	48
26	Alfalah Sukajaya	Musi Banyuasin	2020	Garmen Apparel	48
27	Ponpes Annur Gajah Mati	Musi Banyuasin	2021	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
28	Syifaun Nihayah	Musi Banyuasin	2020	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
29	Mamba'Ul Hisan	Musi Banyuasin	2019	Garmen Apparel	48
30	Riyadhus Sholihin	Musi Rawas	2021	Garmen Apparel	48
31	Syifa'Ul Janan	Musi Rawas	2019	Industri Kreatif	48
32	Darussalamah	Musi Rawas	2020	Garmen Apparel	48
33	Miftahussalam	Musi Rawas	2019	Garmen Apparel	48
34	Walisongo	Musi Rawas	2019	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
35	Inayatullah	Ogan Ilir	2022	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
36	Darul Iman Serikembang	Ogan Ilir	1989	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
37	Tarbiyatussibyan Talang Seleman	Ogan Ilir	2023	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
38	Raudhatul Ulum Sakatiga	Ogan Ilir	2022	Processing	48
39	Darussalam Seri Kembang	Ogan Ilir	2019	Bahasa Inggris	48
40	Darul Qur'An	Ogan Komnering Ilir	2023	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
41	Futuhiyyah	Ogan Komnering Ilir	2023	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
42	As-Shiddiqiyah	Ogan Komnering Ilir	2023	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
43	Darussalam	Ogan Komnering Ilir	2021	Tata Busana	48
44	Al Hikmah	Ogan Komnering Ilir	2021	Teknik Otomotif	48
45	Nurul Hidayah Oki	Ogan Komnering Ilir	2021	Teknik Otomotif	48
46	Ubad Bhodo	Ogan Komnering Ilir	2021	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
47	Darul Mustofa Pancawarna	Ogan Komnering Ilir	2020	Teknik Otomotif	48
48	Di'Ayatul Islamiyah Seriguna	Ogan Komnering Ilir	2019	Teknik Otomotif	48
49	Darussyafa'At	Ogan Komnering Ilir	2019	Garmen Apparel	48
50	Sabiilillah	Ogan Komnering Ilir	2019	Teknik Otomotif	48
51	Di Ayatul Islamiyah"	Ogan Komnering Ilir	2019		48
52	Tin Taylor School Ponpes	Ogan Komnering Ilir	2021		48
53	Al-Islah Nahdlotul Muslimin	Ogan Komnering Ulu	2021	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
54	Darul Muttaqin Baturaja	Ogan Komnering Ulu	2019	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
55	Roudlotussholihin	OKU Selatan	2022	Garmen Apparel	48
56	Roudlotul Qur'An	OKU Selatan	2022	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
57	Wasilatul Huda	OKU Selatan	2023	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
58	Ponpes Darul Huda	OKU Selatan	2020	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
59	Ponpes Al Falah Iv	OKU Selatan	2020	Garmen Apparel	48
60	Bahrul Ulum Oku Timur	OKU Timur		Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
61	Komunitas Syafa'Atul Insan	OKU Timur	2022	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
62	Roudlotut Thullab Belitang	OKU Timur	2023	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
63	Raudhatul Istiqomah	OKU Timur	2023	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
64	Salafiyah Darus Sa'Adah	OKU Timur	2023	Bahasa Inggris	48
65	Darussalam Tegal Rejo	OKU Timur	2023	Tata Busana	48
66	Darul Huda	OKU Timur	2020	Menjahit	48

NO	BLK KOMUNITAS / PONDOK PESANTREN	LOKASI	TAHUN BERDIRI	KEJURUAN	DAYA TAMPUNG
67	Al Istiqomah	OKU Timur	2020	Menjahit	48
68	Darussalam Batumarta	OKU Timur	2020	Komputer	48
69	Subulussalam Sriwangi Ulu	OKU Timur	2019	Komputer	48
70	Al Falah Oku Timur	OKU Timur	2019	Menjahit	48
71	Darussalam Mudasentosa	OKU Timur	2022	Tata Busana	48
72	Al Falah	OKU Timur	2023	Otomatif Servis Kendaraan Ringan	48
73	Puncak Jaya Nusantara	OKU Timur	2024	Multimedia	48
74	Al Falah Sumber Harapan	OKU Timur	2025	Komputer	48
75	Darul Muqomah	OKU Timur	2025	Tik	48
76	Minhajul Muttaqin	OKU Timur	2025	Tik	48
77	Darul Muttaqin	OKU Timur	2025	Tik	48
78	Mahmud Badaruddin	Palembang	2021	Bahasa	48
79	Aulia Cendikia	Palembang	2021	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48
80	Ar Rahman	Palembang	2021	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	48

BLK KOMUNITAS TERAKREDITASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

No	Nama Pondok Pesantren / Lokasi	Program Kejuruan	No. Akreditasi	Masa Berlaku
1	Darul Ulumissyar'iyyah – Banyuasin	Computer Operator Asistent	550/LA-LPK/ XII/2021 8/12/2021	28/12/2026
2	Ma'ariful Ulum – Banyuasin	Teknologi Informasi dan Komunikasi	545/LA-LPK /XII/2021, 28/12/2021	28/12/2026
3	Darussalam – Lahat	Video Editing (Multimedia)	591/LA-LPK /XI/2022 16/12/2022	16/11/2027
4	Rawdhotut Taufiq – Muara Enim	Teknisi Sepeda Motor	802/LA-LPK /XII/2021 30/12/2021	30/12/2026
5	Darussalam – OKU Timur	Operator Komputer	730/LA-LPK /XII/2021 29/12/2021	29/12/2026
6	Muqimus Sunnah – Palembang	Bahasa Inggris Front Liner	304/LA-LPK /XII/2021 20/12/2021	20/12/2026
7	Sultan Mahmud Badarudin - Palembang	Bahasa Inggris Front Liner	604/LA-LPK /XII/2021 28/12/2021	28/12/2026

MAGANG DALAM NEGERI BIAYA APBN KEMENTERIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

No	Uraian	MAGANG – TAHUN					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Peserta Magang	450	250	210	176	195	**1.281**
2	Perusahaan	24	25	20	20	20	**109**
3	Kabupaten	5	6	6	3	4	**24**
4	Terserap	222	136	88	100	109	**655**
5	Mandiri	228	114	122	76	86	**626**

PENEMPATAN PESERTA MAGANG PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021-2024

No	Kabupaten/Kota	Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024	
		Orang	Terserap	Orang	Terserap	Orang	Terserap	Orang	Terserap
1	Ogan Komering Ulu	20	14	-	-	-	-	15	15
2	Ogan Komering Ilir	-		-	-	5	2	-	-
3	Muara Enim	10	2	10	5	-	-	-	-
4	Lahat	-		-	-	-	-	-	-
5	Musi Rawas	-		-	-	-	-	-	-
6	Musi Banyuasin	-		-	-	-	-	-	-
7	Banyu Asin	20	16	-	-	-	-	-	-
8	OKU Selatan	-		-	-	-	-	-	-
9	OKU Timur	-		-	-	10	10	35	35
10	Ogan Ilir	-		-	-	-	-	-	-
11	Empat Lawang	-		-	-	-	-	-	-
12	PALI *)	-		-	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-		-	-	-	-	-	-
14	Kota Palembang	180	89	170	65	161	89	125	55
15	Kota Prabumulih	10	5	20	12	-	-	20	4
16	Kota Pagar Alam	-		-	-	-	-	-	-
17	Kota Lubuk Linggau	10	9	10	6	-	-	-	-
Jumlah		**250**	**135**	**210**	**88**	**176**	**101**	**195**	**109**

Data Base Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Tahun 2024

PENCARI KERJA. LOWONGAN KERJA DAN PENEMPATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2024

Tahun	Pencaker	Lowongan	Penempatan	Prosentase Penempatan
Th. 2019	25.325	11.443	10.106	39,91%
Th. 2020	12.789	2.579	2.432	19,02%
Th. 2021	19.310	9.883	8.615	44,61%
Th. 2022	20.830	14.943	12.156	58,36%
Th. 2023	20.296	15.772	14.027	69,11%
Th. 2024	19.736	18.337	14.349	72,70%

PENCARI KERJA. LOWONGAN KERJA DAN PENEMPATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

No	Kabupaten/Kota	Pencari Kerja Terdaftar			Lowongan Kerja Terdaftar			Penempatan Tenaga Kerja		
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1	Ogan Komering Ulu	665	358	1.023	223	206	429	210	200	410
2	Ogan Komering Ilir	516	895	1.411	397	757	1.154	319	719	1.038
3	Muara Enim	1.627	448	2.075	1.018	117	1.135	1.018	171	1.189
4	Lahat	1.144	302	1.446	802	181	983	802	181	983
5	Musi Rawas	1.102	268	1.370	216	81	297	216	81	297
6	Musi Banyuasin	582	747	1.329	793	1.850	2.643	790	1.850	2.640
7	Banyuasin	1.788	1.250	3.038	750	1.241	1.991	349	515	864
8	OKU Selatan	422	306	728	248	208	456	202	171	373
9	OKU Timur	378	380	758	534	1.215	1.749	512	1.176	1.688
10	Ogan Ilir	726	699	1.425	425	735	1.160	306	668	974
11	Empat Lawang	410	501	911	217	306	523	217	306	523
12	PALI	234	57	291	57	25	82	57	25	82
13	Musi Rawas Utara	367	239	606	135	150	285	120	150	270
14	Palembang	988	695	1.683	1.391	2.012	3.403	522	844	1.366
15	Prabumulih	630	356	986	452	207	659	452	207	659
16	Pagar Alam	165	115	280	75	115	190	75	115	190
17	Lubuklinggau	221	155	376	635	563	1.198	403	400	803
	Sumsel	**11.965**	**7.771**	**19.736**	**8.368**	**9.969**	**18.337**	**6.570**	**7.779**	**14.349**

PENCARI KERJA TERDAFTAR TAHUN 2020 - 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Kabupaten / Kota	2024	2023	2022	2021	2020
1	Ogan Komering Ulu	1.023	1.086	1.007	1.340	977
2	Ogan Komering Ilir	1.411	1.026	444	914	657
3	Muara Enim	2.075	2.083	2.433	4.050	1.382
4	Lahat	1.446	1.025	1.506	2.078	1.043
5	Musi Rawas	1.370	582	743	409	632
6	Musi Banyuasin	1.329	967	714	1.981	638
7	Banyuasin	3.038	1.709	736	2.293	1.249
8	OKU Selatan	728	778	528	309	665
9	OKU Timur	758	388	304	354	555
10	Ogan Ilir	1.425	641	615	1.033	477
11	Empat Lawang	911	232	462	655	754
12	Penukal Abab Lematang Ilir	291	209	343	400	220
13	Musi Rawas Utara	606	765	208	441	427
14	Palembang	1.683	6.763	1.033	1.665	1.781
15	Prabumulih	986	765	841	581	172
16	Pagar Alam	280	219	209	204	132
17	Lubuklinggau	376	1.058	428	603	1.028
Prov. Sum Sel		**19.736**	**20.296**	**12.556**	**19.310**	**12.789**

LOWONGAN KERJA TERDAFTAR TAHUN 2020 - 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Kabupaten / Kota	2024	2023	2022	2021	2020
1	Ogan Komering Ulu	429	849	480	886	272
2	Ogan Komering Ilir	1.154	917	486	268	345
3	Muara Enim	1.135	1.977	1.726	1.228	312
4	Lahat	983	911	1.302	222	4
5	Musi Rawas	297	474	128	17	498
6	Musi Banyuasin	2.643	726	714	87	10
7	Banyuasin	1.991	1.445	1.148	82	79
8	OKU Selatan	456	589	561	258	388
9	OKU Timur	1.749	311	419	206	-
10	Ogan Ilir	1.160	493	931	2.800	50
11	Empat Lawang	523	160	841	12	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	82	152	135	265	-
13	Musi Rawas Utara	285	540	156	67	-
14	Palembang	3.403	4.519	4.158	2.608	335
15	Prabumulih	659	751	827	167	-
16	Pagar Alam	190	163	214	13	18
17	Lubuklinggau	1.198	795	717	697	268
Prov. Sum Sel		**18.337**	**15.772**	**14.943**	**9.883**	**2.579**

PENEMPATAN KERJA TERDAFTAR TAHUN 2020 - 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2024	2023	2022	2021	2020
1	Ogan Komering Ulu	410	784	478	886	272
2	Ogan Komering Ilir	1.038	868	486	142	345
3	Muara Enim	1.189	1.869	1.726	1.228	287
4	Lahat	983	842	1.302	222	4
5	Musi Rawas	297	430	128	17	498
6	Musi Banyuasin	2.640	675	708	87	10
7	Banyuasin	864	1.072	313	82	54
8	OKU Selatan	373	558	394	206	363
9	OKU Timur	1.688	282	419	200	-
10	Ogan Ilir	974	422	329	2.381	50
11	Empat Lawang	523	160	841	12	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	82	128	134	265	-
13	Musi Rawas Utara	270	523	156	67	-
14	Palembang	1.366	4.024	2.984	2.608	298
15	Prabumulih	659	523	827	112	-
16	Pagar Alam	190	149	214	13	18
17	Lubuklinggau	803	718	717	87	233
	Prov. Sum Sel	**14.349**	**14.027**	**12.156**	**8.615**	**2.432**

PENCARI KERJA, LOWONGAN KERJA DAN PENEMPATAN KERJA BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2020 - 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pencaker Laki2	7.830	12.163	12.556	11.907	11.965
2	Pencaker Perempuan	4.959	7.147	8.264	8.389	7.771
3	Pencaker	12.789	19.310	20.820	20.296	19.736
4	Lowongan Laki2	1.454	4.910	8.769	9.345	8.368
5	Lowongan Perempuan	1.125	4.973	6.174	6.427	9.969
6	Lowongan Kerja	2.579	9.883	14.943	15.772	18.337
7	Penempatan Laki2	1.526	4.063	7.374	8.445	6.570
8	Penempatan Perempuan	906	4.552	4.782	5.582	7.779
9	Penempatan	2.432	8.615	12.156	14.027	14.349

PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018-2024

No	Asal PMI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	Ogan Komering Ulu	31	16	14	11	-	64	97	233
2	Ogan Komering Ilir	358	276	104	48	280	336	372	1.774
3	Muara Enim	26	25	8	3	34	50	56	202
4	Lahat	133	185	59	23	136	224	168	928
5	Musi Rawas	39	42	21	10	48	69	67	296
6	Musi BanyuAsin	38	25	8	2	48	64	65	250
7	Banyu Asin	134	100	23	2	69	98	106	532
8	OKU Selatan	22	11	13	9	21	57	51	184
9	OKU Timur	42	51	15	2	38	161	94	403
10	Ogan Ilir	440	307	47	8	267	309	211	1.589
11	Empat Lawang	20	65	23	1	77	63	40	289
12	PALI	4	5	3	-	12	6	1	31
13	Musi Rawas Utara	4	2	4	-	5	10	12	37
14	Kota Palembang	517	432	146	57	317	415	294	2.178
15	Kota Prabumulih	13	17	5	1	25	32	23	116
16	Kota Pagar Alam	59	65	33	9	114	107	67	454
17	Kota Lubuk Linggau	6	14	8	4	4	24	12	72
TOTAL		**1.886**	**1.638**	**534**	**190**	**1.495**	**2.089**	**1.736**	**9.568**

PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN JENIS KELAMIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018-2024

NO	ASAL PMI (KAB/KOTA)	2020		2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Ogan Komering Ulu	-	14	1	10	-	-	21	43	33	64
2	Ogan Komering Ilir	11	93	3	45	209	71	43	293	88	284
3	Muara Enim	3	5	2	1	34	-	25	25	6	50
4	Lahat	9	50	4	19	69	67	47	177	47	121
5	Musi Rawas	1	20	3	7	48	-	32	37	7	60
6	Musi BanyuAsin	7	1	1	1	44	4	24	40	26	39
7	Banyu Asin	8	15	2	-	48	21	17	81	25	81
8	OKU Selatan	2	11	-	9	9	12	11	46	12	39
9	OKU Timur	10	5	1	1	26	12	84	77	37	57
10	Ogan Ilir	14	33	-	8	234	33	71	238	62	149
11	Empat Lawang	18	5	1	-	4	73	2	61	12	28
12	PALI	-	3	-	-	3	9	3	3	1	-
13	Musi Rawas Utara	-	4	-	-	1	4	2	8	1	11
14	Kota Palembang	24	122	2	55	275	42	82	333	126	168
15	Kota Prabumulih	1	4	1	-	25	-	12	20	5	18
16	Kota Pagar Alam	9	24	1	8	23	91	29	78	17	50
17	Kota Lubuk Linggau	-	8	1	3	2	2	3	21	2	10
TOTAL		**117**	**417**	**23**	**167**	**1.054**	**441**	**508**	**1.581**	**507**	**1.229**

PMI BEKERJA DISEKTOR FORMAL – INFORMAL TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	ASAL PMI (KAB/KOTA)	PMI FORMAL			PMI INFORMAL			TOTAL PMI		
		L	P	JML	L	P	JML	P	L	JML
1	Ogan Komering Ulu	8	42	50	25	22	47	33	64	97
2	Ogan Komering Ilir	88	168	256	-	124	124	88	292	380
3	Muara Enim	6	50	56	-	-	-	6	50	56
4	Lahat	47	28	75	-	93	93	47	121	168
5	Musi Rawas	-	-	-	7	60	67	7	60	67
6	Musi BanyuAsin	26	10	36	-	29	29	26	39	65
7	Banyu Asin	22	49	71	3	32	35	25	81	106
8	OKU Selatan	11	9	20	1	30	31	12	39	51
9	OKU Timur	37	57	94	-	-	-	37	57	94
10	Ogan Ilir	58	123	181	4	26	30	62	149	211
11	Empat Lawang	-	-	-	12	28	40	12	28	40
12	PALI	-	1	1	-	-	-	-	1	1
13	Musi Rawas Utara	-	10	10	1	1	2	1	11	12
14	Kota Palembang	52	74	126	-	168	168	52	242	294
15	Kota Prabumulih	5	18	23	-	-	-	5	18	23
16	Kota Pagar Alam	16	6	22	1	44	45	17	50	67
17	Kota Lubuk Linggau	2	-	2	-	10	10	2	10	12
Sumatera Selatan		**378**	**645**	**1.023**	**54**	**667**	**721**	**432**	**1.312**	**1.744**

PMI BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	ASAL PMI (KAB/KOTA)	PMI			PENDIDIKAN				
		L	P	JML	SD	SMP	SMA	D3	S1
1	Ogan Komering Ulu	33	64	97	23	45	38	-	-
2	Ogan Komering Ilir	88	292	380	44	107	211	5	5
3	Muara Enim	6	50	56	12	12	26	4	2
4	Lahat	47	121	168	14	38	114	4	4
5	Musi Rawas	7	60	67	10	25	27	-	1
6	Musi BanyuAsin	26	39	65	7	15	40	2	1
7	Banyu Asin	25	81	106	-	-	-	-	-
8	OKU Selatan	12	39	51	-	-	-	-	-
9	OKU Timur	37	57	94	15	20	24	1	3
10	Ogan Ilir	62	149	211	45	32	134	-	-
11	Empat Lawang	12	28	40	-	-	40	-	-
12	PALI	-	1	1	-	1	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	1	11	12	-	7	5	-	-
14	Kota Palembang	52	242	294	-	57	226	4	7
15	Kota Prabumulih	5	18	23	-	-	-	-	-
16	Kota Pagar Alam	17	50	67	5	16	41	2	4
17	Kota Lubuk Linggau	2	10	12	2	3	12	-	-
TOTAL		**432**	**1.312**	**1.744**	**177**	**378**	**938**	**22**	**27**

JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Nama	Gol.	Jenis Kelamin	Jabatan Fungsional	Keterangan
1	Herlina Sari, SP.M.Si	IV	P	PK - Ahli Muda	OKU
2	Agus Sutiyono, SE	III.d	L	PK - Ahli Muda	OKU
3	Rahma Dinda Valentine, SE	III.b	P	PK - Ahli Pertama	OKU
4	Sentia Rapika, SE	III.a	P	PK - Ahli Pertama	OKU
5	Nilawati, SE	IX	P	PK - Ahli Pertama	OKU
6	Melly Pebrianti, S.E	III.c	P	PK - Ahli Muda	OKI
7	Renna Aprina, S.E	III.c	P	PK - Ahli Muda	OKI
8	Windi Trianasari, S. Sos	III.c	P	PK - Ahli Muda	OKI
9	Agung Setiawan, S.TP	IIIc	L	PK - Ahli Muda	ME
10	Ismartini, SE	IIIc	P	PK - Ahli Muda	ME
11	Idul Aguscik, SH	IIIc	L	PK - Ahli Muda	ME
12	Eva Novalinda, S.E.	IX	P	PK - Ahli Pertama	ME
13	Ruslim, SE, M.Si	IV/b	L	PK - Ahli Madya	ME
14	Desti Lasmiyanti, Sp	III/d	P	PK - Ahli Muda	MURA
15	Nuranti Eka Oktaviana, S. E	III/d	P	PK - Ahli Muda	MURA
16	Agus Tomi, S. E	IIIc	L	PK - Ahli Muda	MURA
17	Emiwarni, SE., MM	IV.a	P	PK - Ahli Muda	MUBA
18	Titin Maryati, SH	III/d	P	PK - Ahli Muda	MUBA
19	Afrida Linda Hastuti, SH., M.Si	IV.a	P	PK - Ahli Muda	MUBA
20	Fitri Haryani, SE.,M.Si	IV.a	P	PK - Ahli Muda	MUBA
21	Eva Anggraeni, SE	IX	P	PK - Ahli Pertama	MUBA
22	Thomas Bagas Wisnu Putra, S.Psi	IX	L	PK - Ahli Pertama	MUBA
23	Wahab Sugiarto, St. M.M	III/d	L	PK - Ahli Muda	OKUS
24	Esmet Vahlevi Cantiago, Se	III/d	L	PK - Ahli Muda	OKUS
25	Turwapit, S. IP	IX	L	PK - Ahli Pertama	OKUT
26	Sicilia Gandasari, SE	IX	P	PK - Ahli Pertama	OKUT
27	Wahyuddin, S. Sos	IX	L	PK - Ahli Pertama	OKUT
28	M.Tony Afrianto	IIIc	L	PK - Ahli Pertama	OI
29	Yudhi Endrya Putra	IX	L	PK - Ahli Pertama	OI
30	Ifdillah Fahlevi	IX	L	PK - Ahli Pertama	OI
31	Asnawi, S.E., M.E.	III/d	L	PK - Ahli Muda	MURATARA
32	Eka Tri Mardiana, S.E	IX	P	PK - Ahli Pertama	PALI
33	Muhairia, S.E	III.a	P	PK - Ahli Pertama	PALI
34	Ade Indri Yani Putri, S.E	III.a	P	PK - Ahli Pertama	PALI
35	Teni Tanzilal, S.E	III.a	P	PK - Ahli Pertama	PALI

No.	Nama	Gol.	Jenis Kelamin	Jabatan Fungsional	Keterangan
36	Marlena Utary, SE, MM	IV/a	P	PK - Ahli Muda	PLG
37	Leo Eka Fitria R, SE, MM	IV/a	P	PK - Ahli Muda	PLG
38	Yunita Puji Astuti, SE	III/a	P	PK - Ahli Pertama	PLG
39	Okta Ariyani, S.H	III/a	P	PK - Ahli Pertama	PLG
40	Vina Astika	III/a	P	PK - Ahli Pertama	PBM
41	Windy Sevia Wulandary	III/a	P	PK - Ahli Pertama	PBM
42	Marlin Oktarini	IX	P	PK - Ahli Pertama	PBM
43	Suryani	IX	P	PK - Ahli Pertama	PBM
44	Amsisdin Jumedi	IX	L	PK - Ahli Pertama	PBM
45	Keristiana Sari	IX	P	PK - Ahli Pertama	PBM
46	Deli Supriyati	IX	P	PK - Ahli Pertama	PBM
47	Pratiwi	IX	P	PK - Ahli Pertama	PBM
48	Valen Tri Wahyuni	IX	P	PK - Ahli Pertama	PBM
49	Elly Oktayani	IX	P	PK - Ahli Pertama	PBM
50	Yen An Yasikara	IX	P	PK - Ahli Pertama	PBM
51	Yatini	IX	P	PK - Ahli Pertama	PBM
52	Hastri Rahma	IX	P	PK - Ahli Pertama	PBM
53	Meily Dwi Ramadhani	IX	P	PK - Ahli Pertama	PBM
54	M. Geraldi Prihandana, S.Sos	III.d	L	PK - Ahli Muda	LLG
55	Sukma Rianty, SE	III.C	P	PK - Ahli Muda	LLG
56	Suci Puji Lestari, S.Sos	III.a	P	PK - Ahli Pertama	LLG
57	Aminah, S.H., M.Si.	IV/a	P	PK - Ahli Madya	BP3MI
58	Angga Atmajaya, S.I.Kom	III/c	L	PK - Ahli Muda	BP3MI
59	Rini, S.H.	IX	P	PK - Ahli Pertama	BP3MI
60	Somady Meidy, SE	III/c	L	PK - Ahli Muda	BP3MI
61	Nopriansyah, SE	III/c	L	PK - Ahli Muda	BP3MI
62	Ria Liana, S.Sos	III/d	P	PK - Ahli Muda	Prov. Sumsel

Data Base Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tahun 2024

LEMBAGA HUBUNGAN INDUSTRIAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	PP	PKB	SP/SB	LKS BIPARTIT
1	Ogan Komering Ulu	44	30	56	34
2	Ogan Komering Ilir	41	33	107	61
3	Muara Enim	154	82	92	86
4	Lahat	134	24	48	54
5	Musi Rawas	30	42	98	23
6	Musi Banyuasin	101	44	117	103
7	Banyuasin	390	85	341	92
8	Oku Selatan	17	4	4	4
9	Oku Timur	70	18	21	31
10	Ogan Ilir	55	18	77	31
11	Empat Lawang	37	15	6	15
12	Penukal Abab Lematang Ilir	15	9	20	4
13	Musi Rawas Utara	34	18	58	43
14	Palembang	1.231	346	362	150
15	Prabumulih	51	4	13	9
16	Pagar Alam	44	32	47	14
17	Lubuk Linggau	69	5	9	7
18	Prov. Sum Sel	86	28	-	-
	JUMLAH	**2.603**	**837**	**1.476**	**761**

PERATURAN PERUSAHAAN (PP) TERDAFTAR TAHUN 2020 - 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Jml
1	Ogan Komering Ulu	29	5	7	-	3	44
2	Ogan Komering Ilir	29	3	3	3	3	41
3	Muara Enim	113	12	7	10	12	154
4	Lahat	73	9	25	11	16	134
5	Musi Rawas	19	1	5	-	5	30
6	Musi Banyuasin	65	15	18	-	3	101
7	Banyuasin	314	35	15	2	24	390
8	Oku Selatan	7	4	-	1	5	17
9	Oku Timur	57	5	6	-	2	70
10	Ogan Ilir	31	12	8	-	4	55
11	Empat Lawang	31	-	3	-	3	37
12	Penukal Abab Lematang Ilir	7	1	4	2	1	15
13	Musi Rawas Utara	24	3	1	3	3	34
14	Palembang	948	112	84	19	68	1.231
15	Prabumulih	46	1	2	1	1	51
16	Pagar Alam	44	-	-	-	-	44
17	Lubuk Linggau	55	7	4	1	2	69
18	Prov. Sum Sel	39	14	17	7	9	86
JUMLAH		**1.931**	**239**	**209**	**60**	**164**	**2.603**

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) TERDAFTAR TAHUN 2020 - 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Jml
1	Ogan Komering Ulu	30	-	-	-	-	30
2	Ogan Komering Ilir	24	2	3	1	3	33
3	Muara Enim	80	-	-	-	2	82
4	Lahat	21	-	3	-	-	24
5	Musi Rawas	37	1	3	1	-	42
6	Musi Banyuasin	30	5	4	-	5	44
7	Banyuasin	63	4	4	-	14	85
8	OKU Selatan	4	-	-	-	-	4
9	OKU Timur	9	-	9	-	-	18
10	Ogan Ilir	15	1	1	-	1	18
11	Empat Lawang	12	-	-	-	3	15
12	Penukal Abab Lematang Ilir	9	-	-	-	-	9
13	Musi Rawas Utara	11	2	-	4	1	18
14	Palembang	319	13	10	-	4	346
15	Prabumulih	4	-	-	-	-	4
16	Pagar Alam	31	-	-	-	1	32
17	Lubuk Linggau	5	-	-	-	-	5
18	Prov. Sum Sel	17	-	-	-	11	28
	JUMLAH	**721**	**28**	**37**	**6**	**45**	**837**

SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH TAHUN 2020 - 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Jml
1	Ogan Komering Ulu	46	3	4	-	2	55
2	Ogan Komering Ilir	46	25	7	29	10	117
3	Muara Enim	71	2	9	9	24	115
4	Lahat	37	1	2	3	5	48
5	Musi Rawas	75	1	18	-	2	96
6	Musi Banyuasin	78	10	11	5	13	117
7	Banyuasin	312	13	4	6	6	341
8	OKU Selatan	2	1	1	-	-	4
9	OKU Timur	11	-	5	-	-	16
10	Ogan Ilir	64	3	3	2	3	75
11	Empat Lawang	4	2	-	-	-	6
12	Penukal Abab Lematang Ilir	16	3	-	1	2	22
13	Musi Rawas Utara	32	7	14	5	2	60
14	Palembang	338	8	-	16	4	366
15	Prabumulih	12	1	-	-	-	13
16	Pagar Alam	37	9	-	1	-	47
17	Lubuk Linggau	6	3	-	-	1	10
18	Prov. Sumsel	-	-	-		-	-
	JUMLAH	**1.187**	**92**	**78**	**77**	**74**	**1.508**

LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT (LKS BIPARTIT) TAHUN 2020 - 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Jml
1	Ogan Komering Ulu	26	3	3	2	-	34
2	Ogan Komering Ilir	35	3	16	7	1	62
3	Muara Enim	65	-	9	12	1	87
4	Lahat	34	4	4	12	-	54
5	Musi Rawas	9	5	-	-	-	14
6	Musi Banyuasin	76	9	9	8	6	108
7	Banyuasin	57	14	-	17	7	95
8	OKU Selatan	2	-	1	1	-	4
9	OKU Timur	10	1	10	-	16	37
10	Ogan Ilir	25	2	3		-	30
11	Empat Lawang	8	-	6	-	-	14
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1	-	1	2	-	4
13	Musi Rawas Utara	25	5	5	7	2	44
14	Palembang	119	3	7	9	7	145
15	Prabumulih	7	-	1	1	-	9
16	Pagar Alam	6	8	-	-	-	14
17	Lubuk Linggau	3	1	2	1	-	7
18	Prov. Sumsel	-	-	-		-	-
Jumlah		**508**	**58**	**77**	**79**	**40**	**762**

KASUS PERSELISIHAN YANG SELESAI TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah		Penyelesaian		
		Kasus	T. Kerja	PB	Anjuran	Proses
1	Ogan Komering Ulu	3	3	-	3	1
2	Ogan Komering Ilir	7	8	5	2	-
3	Muara Enim	23	777	7	16	-
4	Lahat	11	19	5	6	-
5	Musi Rawas	11	27	4	7	-
6	Musi Banyuasin	33	229	20	13	-
7	Banyuasin	43	198	13	30	-
8	OKU Selatan	-	-	-	-	-
9	OKU Timur	-	-	-	-	-
10	Ogan Ilir	5	41	3	2	-
11	Empat Lawang	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-
14	Palembang	81	212	26	48	7
15	Prabumulih	6	8	5	1	-
16	Pagar Alam	-	-	-	-	-
17	Lubuk Linggau	26	26	26	-	22
18	Prov. Sum Sel	3	3	3	-	-
	Jumlah	**252**	**1.551**	**117**	**128**	**30**

KASUS PERSELISIHAN YANG MASUK TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah		Jenis Perselisihan					
				Hak		PHK		Kepentingan	
		Kasus	T. Kerja	Kasus	T. Kerja	Kasus	T. Kerja	Kasus	T. Kerja
1	Ogan Komering Ulu	3	3	2	2	1	1	-	-
2	Ogan Komering Ilir	7	8	-	-	5	6	2	2
3	Muara Enim	23	777	3	708	19	68	1	1
4	Lahat	11	19	7	15	3	3	1	1
5	Musi Rawas	11	27	-	-	11	27	-	-
6	Musi Banyuasin	33	229	1	138	32	91	-	-
7	Banyuasin	43	198	4	61	38	136	1	1
8	OKU Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
9	OKU Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ogan Ilir	5	41	2	3	3	38	-	-
11	Empat Lawang	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Palembang	81	212	-	-	81	212	-	-
15	Prabumulih	6	8	-	-	6	8	-	-
16	Pagar Alam	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Lubuk Linggau	26	26	18	18	8	8	-	-
18	Prov. Sum Sel	3	3	-	-	3	3	-	-
	Jumlah	**252**	**1.551**	**37**	**945**	**210**	**601**	**5**	**5**

JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

No.	Nama	Lokasi	Jabatan
1	Aliyya Muroqobah, S.I. Kom., Mm	Banyuasin	Fungsional Mediator
2	Dovi Eka Andriyani, SPd., SH., M.H	Banyuasin	Fungsional Mediator
3	Akhmad Aidil Fitrisyah, SH	Empat Lawang	Fungsional Mediator
4	Endro Purnomo, SAP	Lahat	Fungsional Mediator
5	Yulindar, SE	Lahat	Fungsional Mediator
6	Adi Sudarja Pemuka, SH	Lubuk Linggau	Fungsional Mediator
7	Dahri Iskandar, SE,. Mm	Lubuk Linggau	Fungsional Mediator
8	Heny Yulia Rahmadani, ST	Lubuk Linggau	Fungsional Mediator
9	Retno Arini, ST., Mm	Lubuk Linggau	Fungsional Mediator
10	Adi Chandra, SE	Muara Enim	Fungsional Mediator
11	Delli Arsyah, SH	Muara Enim	Fungsional Mediator
12	Fajar Fitrio Dwi N, SH	Muara Enim	Fungsional Mediator
13	Iwan Efandri, Se	Muara Enim	Fungsional Mediator
14	Joko Triono, Se	Muara Enim	Fungsional Mediator
15	Dodi Eka Saputra, SE, Mm	Musi Banyuasin	Fungsional Mediator
16	Faezal Pratama. A, SH, M.Si	Musi Banyuasin	Fungsional Mediator
17	H. Mariono, SH, M.Si	Musi Banyuasin	Fungsional Mediator
18	Juanda, SE, M.Si	Musi Banyuasin	Fungsional Mediator
19	Mariono, SH,. M. Si	Musi Banyuasin	Fungsional Mediator
20	Linda Mardalena, S. Ip	Musi Rawas	Fungsional Mediator
21	Subiyanto, SH	Musi Rawas	Fungsional Mediator
22	Tatri Riyanti, SP	Musi Rawas	Fungsional Mediator
23	Istilahandayani, SP,. M. Si	Ogan ilir	Fungsional Mediator
24	Merry, S. Sos,.I,. M. Pd	Ogan ilir	Fungsional Mediator
25	Hadi Purnawan, SE	Ogan Komering Ilir	Fungsional Mediator
26	M. Arief Budhiman, SH	Ogan Komering Ulu	Fungsional Mediator
27	Andika Marvianti Irawan, S.E	OKU Selatan	Fungsional Mediator
28	Jazuli, SE	OKU Selatan	Fungsional Mediator
29	Malik Surya Alam, S. Sos,. Mm	OKU Selatan	Fungsional Mediator
30	Afick Efrizal, SH., Mh	Palembang	Fungsional Mediator
31	Ir. Darwan Sanwan, M. Si	Palembang	Fungsional Mediator
32	Nofiar Marlena, SP., M. Si	Palembang	Fungsional Mediator
33	R. Muhammad Ismail, SH	Palembang	Fungsional Mediator
34	Rolanda, S. Kom	Palembang	Fungsional Mediator
35	Tri Yulianti, SR, SH	PALI	Fungsional Mediator
36	Nur Hikmah, ST., MM	Prabumulih	Fungsional Mediator

Data Base Ketenagakerjaan Bidang Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2024

JUMLAH PERUSAHAAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020-2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ogan Komering Ulu	258	278	284	284	284
2	Ogan Komering Ilir	93	117	162	162	184
3	Muara Enim	366	392	399	403	403
4	Lahat	126	136	136	157	188
5	Musi Rawas	82	90	75	89	75
6	Musi Banyuasin	395	432	396	420	416
7	Banyuasin	288	439	366	450	439
8	OKU Selatan	69	143	73	73	74
9	OKU Timur	129	73	143	143	143
10	Ogan Ilir	133	141	94	94	97
11	Empat Lawang	40	45	32	32	35
12	Penukal Abab Lematang Ilir	63	73	73	73	36
13	Musi Rawas Utara	25	37	23	37	42
14	Palembang	4.131	4.401	4.401	4.513	4.679
15	Prabumulih	384	396	439	444	448
16	Pagar Alam	48	38	50	50	50
17	Lubuk Linggau	26	37	37	92	99
	Total	**6.656**	**7.268**	**7.183**	**7.516**	**7.692**

KELAS PERUSAHAAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Kabupaten/Kota	Kecil	Sedang	Besar	Jumlah
1	Ogan Komering Ulu	205	45	34	284
2	Ogan Komering Ilir	63	53	68	184
3	Muara Enim	94	113	196	403
4	Lahat	82	38	68	188
5	Musi Rawas	37	10	28	75
6	Musi Banyuasin	137	135	144	416
7	Banyuasin	170	131	138	439
8	Oku Selatan	63	6	5	74
9	Oku Timur	110	24	9	143
10	Ogan Ilir	58	24	15	97
11	Empat Lawang	23	9	3	35
12	Penukal Abab Lematang Ilir	20	8	8	36
13	Musi Rawas Utara	23	12	7	42
14	Palembang	3.010	1.220	449	4.679
15	Prabumulih	283	105	60	448
16	Pagar Alam	39	9	2	50
17	Lubuk Linggau	74	22	3	99
	Total	**4.491**	**1.964**	**1.237**	**7.692**

STATUS PERUSAHAAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Kabupaten/Kota	Swasta	PMDN	PMA	JF	JML
1	Ogan Komering Ulu	269	15	-	-	284
2	Ogan Komering Ilir	153	6	2	-	161
3	Muara Enim	282	104	17	-	403
4	Lahat	171	10	7	-	188
5	Musi Rawas	69	6	-	-	75
6	Musi Banyuasin	329	67	16	4	416
7	Banyuasin	369	54	16	-	439
8	Oku Selatan	65	8	1	-	74
9	Oku Timur	142	1	-	-	143
10	Ogan Ilir	97	11	-	-	108
11	Empat Lawang	24	15	-	-	39
12	Penukal Abab Lematang Ilir	28	7	-	-	35
13	Musi Rawas Utara	50	-	1	-	51
14	Palembang	4.313	292	54	20	4.679
15	Prabumulih	313	123	12	-	448
16	Pagar Alam	49	1	-	-	50
17	Lubuk Linggau	99	-	-	-	99
	Total	**6.822**	**720**	**126**	**24**	**7.692**

PERUSAHAAN STATUS PERMODALAN SWASTA TAHUN 2020-2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ogan Komering Ulu	260	260	269	269	269
2	Ogan Komering Ilir	99	126	154	154	153
3	Muara Enim	276	276	301	276	282
4	Lahat	109	109	94	109	171
5	Musi Rawas	85	148	154	154	69
6	Musi Banyuasin	369	371	251	371	329
7	Banyuasin	369	369	315	369	369
8	Oku Selatan	64	48	48	64	65
9	Oku Timur	142	114	109	142	142
10	Ogan Ilir	123	20	21	94	97
11	Empat Lawang	31	31	35	35	24
12	Penukal Abab Lematang Ilir	44	140	142	140	28
13	Musi Rawas Utara	28	74	72	72	50
14	Palembang	4.035	4.035	4.035	4.058	4.313
15	Prabumulih	251	68	85	68	313
16	Pagar Alam	49	30	27	49	49
17	Lubuk Linggau	38	203	203	203	99
	Total	**6.372**	**6.422**	**6.315**	**6.627**	**6.822**

PERUSAHAAN STATUS PERMODALAN PMDN TAHUN 2020-2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ogan Komering Ulu	-	15	15	15	15
2	Ogan Komering Ilir	-	6	6	6	6
3	Muara Enim	-	67	67	104	104
4	Lahat	-	10	10	10	10
5	Musi Rawas	-	6	6	6	6
6	Musi Banyuasin	-	133	133	67	67
7	Banyuasin	-	104	104	54	54
8	Oku Selatan	-	1	1	8	8
9	Oku Timur	-	10	10	1	1
10	Ogan Ilir	-	11	11	11	11
11	Empat Lawang	-	15	15	15	15
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	1	1	1	7
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-
14	Palembang	-	292	292	292	292
15	Prabumulih	-	28	28	133	123
16	Pagar Alam	-	6	6	6	1
17	Lubuk Linggau	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**705**	**705**	**729**	**720**

PERUSAHAAN STATUS PERMODALAN PMA TAHUN 2020-2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	-	1	2	2	2
3	Muara Enim	-	12	16	17	17
4	Lahat	-	17	17	17	7
5	Musi Rawas	-	-	2	-	-
6	Musi Banyuasin	-	14	12	16	16
7	Banyuasin	-	16	17	16	16
8	Oku Selatan	-	-	-	1	1
9	Oku Timur	-	1	17	-	-
10	Ogan Ilir	-	-	-	-	-
11	Empat Lawang	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	1	1	1	1
14	Palembang	-	54	54	54	54
15	Prabumulih	-	1	1	12	12
16	Pagar Alam	-	-	-	-	-
17	Lubuk Linggau	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	117	139	136	126

PERUSAHAAN STATUS PERMODALAN JOINT VENTURE TAHUN 2020-2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-
2	Ogan Komering Ilir	-	-	-	-	-
3	Muara Enim	-	-	-	-	-
4	Lahat	-	-	-	-	-
5	Musi Rawas	-	-	-	-	-
6	Musi Banyuasin	4	4	4	4	4
7	Banyuasin	-	-	-	-	-
8	Oku Selatan	-	-	-	-	-
9	Oku Timur	-	-	-	-	-
10	Ogan Ilir	-	-	-	-	-
11	Empat Lawang	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-
14	Palembang	20	20	20	20	20
15	Prabumulih	-	-	-	-	-
16	Pagar Alam	-	-	-	-	-
17	Lubuk Linggau	-	-	-	-	-
	Total	24	24	24	24	24

TENAGAKERJA TERDAFTAR WLKP
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ogan Komering Ulu	10.719	10.831	12.906	8.606	8.605	9.717
2	Ogan Komering Ilir	24.996	25.219	41.522	36.265	37.471	41.772
3	Muara Enim	25.487	26.294	13.727	34.298	33.347	37.906
4	Lahat	12.232	9.932	7.986	9.849	11.697	12.990
5	Musi Rawas	14.469	15.329	15.417	12.830	12.810	14.250
6	Musi Banyuasin	59.017	37.876	55.540	55.569	55.655	61.827
7	Banyuasin	36.669	61.241	61.233	61.272	61.201	68.023
8	OKU Selatan	1.376	1.424	1.434	1.424	1.482	1.647
9	OKU Timur	6.572	6.699	9.837	6.698	6.697	7.437
10	Ogan Ilir	7.825	8.517	8.511	7.990	62.152	69.024
11	Empat Lawang	1.849	1.925	1.926	2.281	2.461	2.733
12	Penukal Abab Lematang Ilir	12.680	13.483	13.476	13.477	13.473	14.962
13	Musi Rawas Utara	7.221	7.557	7.559	7.562	4.855	5.396
14	Palembang	220.702	222.773	222.716	222.768	227.883	253.116
15	Prabumulih	12.912	13.650	13.649	13.654	16.387	18.197
16	Pagar Alam	858	1.450	1.452	1.450	1.450	1.610
17	Lubuk Linggau	320	447	7.563	230	3.079	3.419
	TOTAL	**455.904**	**464.647**	**496.454**	**496.223**	**560.705**	**624.026**

TENAGA KERJA LOKAL (WNI) TAHUN 2020-2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ogan Komering Ulu	10.829	12.810	8.605	8.605	9.554
2	Ogan Komering Ilir	25.200	61.201	36.151	37.471	41.607
3	Muara Enim	26.184	55.535	33.347	33.347	37.028
4	Lahat	9.837	7.972	9.837	11.697	12.988
5	Musi Rawas	15.323	36.151	12.810	12.810	14.224
6	Musi Banyuasin	37.811	13.649	55.535	55.655	61.798
7	Banyuasin	61.201	33.347	61.201	61.201	67.956
8	Oku Selatan	6.697	9.837	1.422	1.482	1.645
9	Oku Timur	1.422	1.450	6.697	6.697	7.436
10	Ogan Ilir	8.511	2.281	7.972	62.152	69.011
11	Empat Lawang	1.925	8.605	2.281	2.461	2.733
12	Penukal Abab Lematang ilir	13.475	6.697	13.475	13.473	14.960
13	Musi Rawas Utara	7.557	1.422	7.557	4.855	5.391
14	Palembang	222.700	222.700	222.700	227.883	253.035
15	Prabumulih	1.450	13.475	13.649	16.387	18.196
16	Pagar Alam	447	7.557	1.450	1.450	1.610
17	Lubuk Linggau	13.649	230	230	3.079	3.419
	TOTAL	**464.218**	**494.919**	**494.919**	**560.705**	**622.591**

TENAGA KERJA WNI BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2020-2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	KAB/KOTA	2020		2021		2022		2023		2024	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	OKU	8.699	2.130	9.815	2.995	7.160	1.445	7.160	1.445	7.950	1.604
2	OKI	22.180	3.020	51.300	9.901	32.384	3.767	33.566	3.905	37.271	4.336
3	Muara Enim	18.204	7.980	47.582	7.953	25.367	7.980	25.367	7.980	28.167	8.861
4	Lahat	9.108	729	6.054	1.918	9.108	729	10.830	867	12.025	963
5	Musi Rawas	11.200	4.123	32.384	3.767	9.815	2.995	9.815	2.995	10.898	3.326
6	Musi Banyuasin	27.904	9.907	11.240	2.409	47.582	7.953	47.685	7.970	52.948	8.850
7	Banyuasin	51.300	9.901	25.367	7.980	51.300	9.901	51.300	9.901	56.962	10.994
8	Oku Selatan	4.687	2.010	9.108	729	1.010	412	1.053	429	1.169	476
9	Oku Timur	1.010	412	840	610	4.687	2.010	4.687	2.010	5.204	2.232
10	Ogan Ilir	6.102	2.409	1.821	460	6.054	1.918	60.228	1.924	66.875	2.136
11	Empat Lawang	1.465	460	7.160	1.445	1.821	460	1.965	496	2.182	551
12	Pali	10.567	2.908	4.687	2.010	10.567	2.908	10.567	2.906	11.733	3.227
13	Musi Rawas Utara	6.590	967	1.010	412	6.590	967	3.888	967	4.317	1.074
14	Palembang	152.200	70.929	152.200	70.500	152.200	70.500	159.156	68.727	176.722	76.313
15	Prabumulih	11.240	2.409	10.567	2.908	11.240	2.409	13.271	3.116	14.736	3.460
16	Pagar Alam	324	123	6.590	967	840	610	840	610	933	677
17	Lubuk Linggau	840	610	821	944	840	694	2.467	612	2.739	680
	Total	**343.620**	**121.027**	**378.546**	**117.908**	**378.565**	**117.658**	**443.845**	**116.860**	**492.831**	**129.760**

TENAGA KERJA ASING (WNA) TAHUN 2020-2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ogan Komering Ulu	2	96	1	44	163
2	Ogan Komering Ilir	19	78	114	184	165
3	Muara Enim	110	32	951	947	878
4	Lahat	95	14	12	2	2
5	Musi Rawas	6	94	20	20	26
6	Musi Banyuasin	65	5	34	34	29
7	Banyuasin	40	1.176	71	70	67
8	Oku Selatan	2	-	2	2	2
9	Oku Timur	2	12	1	1	1
10	Ogan Ilir	6	-	18	13	13
11	Empat Lawang	-	1	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang ilir	8	1	2	2	2
13	Musi Rawas Utara	-	2	5	5	5
14	Palembang	72	16	68	77	81
15	Prabumulih	-	2	5	5	1
16	Pagar Alam	-	6	-	-	-
17	Lubuk Linggau	1	-	-	-	-
	TOTAL	**428**	**1.535**	**1.304**	**1.406**	**1.435**

TENAGA KERJA ASING (WNA)
BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2020-2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	KAB/KOTA	2020		2021		2022		2023		2024	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Ogan Komering Ulu	2	-	96	-	1	-	44	-	163	-
2	Ogan Komering Ilir	19	-	78	-	114	-	184	-	165	-
3	Muara Enim	110	-	32	-	951	-	947	-	878	-
4	Lahat	95	-	14	-	12	-	2	-	2	-
5	Musi Rawas	6	-	94	-	20	-	20	-	26	-
6	Musi Banyuasin	65	-	5	-	34	-	34	-	29	-
7	Banyuasin	40	-	1.176	-	71	-	70	-	67	-
8	Oku Selatan	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-
9	Oku Timur	2	-	12	-	1	-	1	-	1	-
10	Ogan Ilir	6	-	-	-	18	-	13	-	13	-
11	Empat Lawang	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang ilir	8	-	1	-	2	-	2	-	2	-
13	Musi Rawas Utara	-	-	2	-	5	-	5	-	5	-
14	Palembang	72	-	16	-	68	-	77	-	81	-
15	Prabumulih	-	-	2	-	5	-	5	-	1	-
16	Pagar Alam	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
17	Lubuk Linggau	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**428**	**-**	**1.535**	**-**	**1.304**	**-**	**1.406**	**-**	**1.435**	**-**

PERUSAHAAN TERDAFTAR WLKP ONLINE TAHUN 2020-2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Kabupaten / Kota	Th.2020	Th.2021	Th.2022	Th.2023	TH.2024
1	Ogan Komering Ulu	26	44	142	175	219
2	Ogan Komering Ilir	31	48	132	110	116
3	Muara Enim	62	82	187	216	372
4	Lahat	28	54	125	94	96
5	Musi Rawas	38	42	64	84	67
6	Musi Banyuasin	60	68	149	248	258
7	Banyuasin	63	72	286	368	402
8	OKU Selatan	47	54	68	58	64
9	OKU Timur	16	26	132	98	107
10	Ogan Ilir	34	54	87	87	92
11	Empat Lawang	4	8	30	45	113
12	Penukal Abab Lematang Ilir	17	24	68	85	89
13	Muratara	6	12	18	52	58
14	Palembang	733	749	1387	1548	1979
15	Prabumulih	50	58	205	288	320
16	Pagar Alam	2	2	42	48	149
17	Lubuk Linggau	18	18	32	188	235
	Jumlah	**1.235**	**1.415**	**3.154**	**3.792**	**4.735**

PERUSAHAAN MENERAPKAN SMK3
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	KAB/KOTA	WLKP	PERUSAHAAN YG TELAH DIAUDIT SMK3					P2K3 2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Ogan Komering Ulu	219	2	3	4	4	4	5
2	Ogan Komering Ilir	224	2	3	3	3	3	5
3	Muara Enim	270	2	3	5	5	5	5
4	Lahat	230	-	1	2	2	2	8
5	Musi Rawas	105	2	3	4	4	4	5
6	Musi Banyuasin	209	3	5	6	6	6	8
7	Banyuasin	402	3	6	7	7	8	20
8	OKU Selatan	102	2	3	3	3	3	2
9	OKU Timur	219	2	3	3	3	3	3
10	Ogan Ilir	149	2	3	3	3	3	7
11	Empat lawang	186	2	3	3	3	3	1
12	Penukal Abab Lematang Ilir	175	2	3	3	3	3	3
13	Muratara	109	-	1	2	2	2	3
14	Palembang	1.467	5	8	9	10	10	31
15	Prabumulih	288	1	3	4	4	4	15
16	Pagar Alam	149	2	3	3	3	4	1
17	Lubuk Linggau	235	3	3	5	5	5	13
	JUMLAH	**4.735**	**35**	**57**	**69**	**70**	**72**	**134**

DATA OBYEK PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

No	Nama	Perusahaan	Pesawat Uap	Bejana Tekan	Pesawat Angkat Angkut	Pesawat Tenaga dan Produksi	Instansi Listrik, Lift dan Petir	Penanggulangan Kebakaran	Kesehatan Kerja	Konstruksi Bangunan	Lingkungan Kerja	Sarana K3	Opr./Petg./Teknis K3	Perusahaan Jasa K3	Panitia Pembina K3
1	Ogan Komering Ulu	284	2	12	18	2	17	4	6	-	-	5	-	-	9
2	gan Komering Ilir	161	6	30	50	45	30	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Muara Enim	403	15	84	32	45	76	34	1	-	1	-	25	7	17
4	Lahat	188	4	24	20	36	24	-	-	-	-	-	-	-	2
5	Musi Rawas	75	4	11	99	121	18	6	-	-	-	-	98	-	1
6	Muba	416	132	99	146	88	97	27	-	12	-	34	1	-	14
7	Banyuasin	439	12	182	99	115	100	-	-	-	-	-	2	-	24
8	OKU Selatan	74	2	1	1	-	7	2	2	-	-	1	-	-	3
9	OKU Timur	143	2	-	14	2	10	3	2	-	-	2	-	-	5
10	Ogan Ilir	108	4	26	24	30	15	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Empat Lawang	39	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	35	1	4	19	4	10	4	-	-	13	13	55	-	1
13	Muaratara	51	-	-	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Palembang	4.679	30	305	155	327	332	6	7	8	4	-	13	11	90
15	Prabumulih	448	1	1	48	9	4	10	-	1	31	32	138	-	-
16	Pagar Alam	50	-	1	2	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Lubuk Linggau	99	5	12	1	40	56	-	-	-	-	3	2	-	4
	Jumlah	**7.692**	**220**	**792**	**730**	**870**	**807**	**96**	**18**	**21**	**49**	**90**	**334**	**18**	**172**

PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Nama	Jenjang	Jabatan	Wilayah Kerja
1	Andri K Gusti, SE, SH, MM,M.Si		Struktural	Prov. Sumsel
2	Effrico, ST, MH		Struktural	Prov. Sumsel
3	M. Yusuf Firdaus, ST		Struktural	Prov. Sumsel
4	Sahadi, SE,ST, MAB	Madya	Jabfung	Palembang
5	Ir. Akhmad Riadi, M.Si	Madya	Jabfung	Palembang
6	Marlian Fajri, SE, M.Si	Madya	Jabfung	Palembang
7	Tina Suzan, SE, M.Si	Madya	Jabfung	Palembang
8	Suslindawati, S.Sos	Madya	Jabfung	Palembang
9	Efrin Heri, S.KM	Muda	Jabfung	Palembang
10	Linda Oktavia, ST	Muda	Jabfung	Palembang
12	Robi Parlindungan, SH	Pertama	Jabfung	Palembang
13	Depiarman, A.Md	-	Belum Jabfung	Palembang
14	Budi Hendra Fiet, SE	Pertama	Jabfung	Palembang
15	Ismaleni, SE	Pertama	Jabfung	Palembang
16	Nanang Sukrisna, ST	Muda	Jabfung	Kab. OKI & OI
17	Mohd. Riza Rasyid, SH	Pertama	Jabfung	Kab. OKI & OI
18	Ir. H. Matnursan, M.Si	Madya	Jabfung	Kab. Banyuasin
19	Fangki Isha Saputra, SP	Muda	Jabfung	Kab. Banyuasin
20	Ebel Garensi, ST	Muda	Jabfung	Kab. Prabu & Pali
21	Tiranda, ST	Muda	Jabfung	Kab. Prabu & Pali
22	Yuanita Ri Isti, S.IP, M.Si	Muda	Jabfung	Kab. Musi Banyuasin
23	Ahmad fajriman, ST	Muda	Jabfung	Kab. Musi Banyuasin
24	Iskandar Agung, SH	Muda	Jabfung	Kab. Musi Banyuasin
25	Edy Haryanto, ST	Muda	Jabfung	Kab. Musi Banyuasin
26	Anik Wijayanti, ST, M.Si	Madya	Jabfung	Kab. Musi Raya
27	Yasmi Apriansyah, ST, M.Si	Madya	Jabfung	Kab. Musi Raya
28	Jimi Saputra, SH	Muda	Jabfung	Kab. Musi Raya
29	Rizki Mirwansyah, SH	Muda	Jabfung	Kab. Musi Raya
30	Soekiswo, ST	Muda	Jabfung	Kab. Musi Raya
31	Yuli Dian Fisnanto, SH	Pertama	Jabfung	Kab. Musi Raya
32	Muhammad Bobby, ST	Muda	Jabfung	Kab. Musi Raya
33	Andreas Joseph Tedja, SH	Muda	Jabfung	Kab. Musi Raya
34	Ahlian Rasul, S.Kom	Muda	Jabfung	Kab. Musi Raya
35	Ani Yuniarti, SH	Muda	Jabfung	Kab. Muara Enim
37	Rudy Ramdhanie, SE	-	Belum Jabfung	Kab. Muara Enim
38	Syofyan Rasyid, SE	Muda	Jabfung	Kab. Lahat
39	Edy Kurniawan, SE	-	Belum Jabfung	Kab. Lahat
40	Eddy Agustiawan, SH	Muda	Jabfung	Kab. OKU Raya
42	Zuhdi Effendi, S.Sos	Muda	Jabfung	Kab. OKU Raya
43	Desi Puspita Sari, SE		Belum Jabfung	Kab. OKU Raya

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANMSIGRASI

Palembang 2025